

e-ISSN 2798-8961



**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

# **HITA AKUNTANSI DAN KEUANGAN**

**VOLUME 5 NOMOR 4 TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI BISNIS  
DAN PARIWISATA**

**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

## **DAFTAR ISI**

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN

**Ni Made Aprila Wati, I Putu Deddy Samtika Putra, Ni Wayan Yuniasih (1-12)**

PENGARUH MODAL USAHA, LITERASI KEUANGAN DAN *DIGITAL MARKETING* TERHADAP KEBERLANJUTAN UMKM DI KOTA DENPASAR

**Ni Kadek Asri Pramesti, Ni Made Wisni Arie Pramuki, Ni Putu Yeni Yuliantari (13-22)**

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, *TAX MORALE*, DAN SIKAP *LOVE OF MONEY* TERHADAP NIAT PATUH WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT)

**Ni Putu Ayu Febriani, Putu Nuniek Hutnaleontina, I Wayan Budi Satriya (23-35)**

PENGARUH EFEKTIVITAS DANA BANTUAN USAHA MIKRO (BPUM) PENGGUNAAN *E-COMMERCE*, DAN MODAL USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SE-KECAMATAN DENPASAR TIMUR

**Ni Luh Ayu Mahayuni, Kadek Dewi Padnyawati, Putu Cita Ayu (36-46)**

PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA, PERAN PERANGKAT DESA, DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SE-KECAMATAN UBUD)

**Ni Komang Ayu Narayanti, Ni Komang Sumadi (47-55)**

PENGARUH PERMODALAN, KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABANAN

**Desi Rahmadani Susilo, Ni Komang Sumadi, I Made Endra Lesmana Putra (56-66)**

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA INDUSTRI PROPERTIES & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 - 2022)

**Putu Dhea Apriyanti Utami, Ni Wayan Alit Erlina Wati, Kadek Dewi Padnyawati (67-78)**

PERAN BADAN PENGAWAS MEMODERASI PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA SE-KECAMATAN MENGWI

**Komang Ayu Pradnya Lestari Sangging, Ni Putu Ayu Kusumawati, Putu Cita Ayu (79-89)**

PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI *COVID-19* SESEUAI PMK NO.9/PMK.03/2021 DI KABUPATEN BADUNG

**Kadek Dwiyanti Agustini, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Ni Wayan Yuniasih (90-99)**

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR KRISNA YUNA DANA

**Ni Kadek Natalia Pratiwi, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (100-110)**

PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, KEMAMPUAN TEKNIK PERSONAL, DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA BUMDES DI KECAMATAN SUKAWATI

**Ni Kadek Feby Arsita Dewi, Ni Komang Sumadi, Ni Ketut Muliati (111-122)**

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KECAMATAN GIANYAR

**I Wayan Ardiyasa, Putu Cita Ayu, Ni Made Wisni Arie Pramuki (123-137)**

PENGARUH PENGAKUAN PROFESIONALISME, PENGHARGAAN FINANSIAL, DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA TERHADAP MINAT UNTUK BERKARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA)

**I Gusti Ayu Putu Mirah Intari Dewi, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, I Wayan Budi Satriya (138-148)**

PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, PENGALAMAN KERJA PERSONAL DAN KINERJA INDIVIDU TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA SE-KECAMATAN KUTA UTARA

**Ni Luh Putu Diah Lokita Pratami, Cokorda Gde Bayu Putra, Putu Cita Ayu (149-159)**

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, ASMETRI INFORMASI DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD) AKUNTANSI PADA LPD SE-KECAMATAN TABANAN

**Kadek Sintya Dewi, Kadek Dewi Padnyawati, Putu Nuniek Hutnaleontina (160-169)**

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENDAPATAN OBJEK WISATA GUNUNG KAWI DESA SEBATU

**Ni Ketut Erlina Yanti, I Made Endra Lesmana Putra, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (170-179)**

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN

**Ni Made Novi Cahyanti, I Putu Deddy Samtika Putra (180-190)**

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI DI KECAMATAN MANGGIS  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 BERDASARKAN PETUNJUK TEKNIS  
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN NO. 15 TAHUN 2021

**I Made Dedikurniawan, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, I Made Endra Lesmana  
Putra (191-201)**

BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KINERJA LEMBAGA  
PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KECAMATAN TAMPAKSIRING

**Ida Ayu Diah Maharani, Ni Putu Ayu Kusumawati (202-215)**

ANALISIS ATAS PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ATAS  
BANTUAN ATAU SUMBANGAN

**Luh Putu Yuniasih (216-226)**

PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN KEAMANAN TERHADAP KEPUASAN  
PENGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGI* (FINTECH) *PEER TO PEER* (P2P)  
LENDING DI DENPASAR

**Ni Luh Putu Eka Anatasia, Ni Ketut Muliati (227-236)**

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
BUDAYA ETIS ORGANISASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN  
AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDESA) SE KABUPATEN KLUNGKUNG

**Ni Ketut Mulyadewi, Ni Komang Sumadi (237-250)**

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN  
PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH  
DAERAH (STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
TABANAN)

**Anak Agung Putu Agung Wahyu Pratama, Putu Cita Ayu, Ni Putu Trisna Windika  
Pratiwi (251-264)**

PENGARUH PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBEBASAN BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DENGAN SOSIALIASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(STUDI PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN GIANYAR)

**I Kadek Bayu Mahardika, I Wayan Sudiana, Ni Wayan Alit Erlina Wati (265-282)**

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL  
MENENGAH (SAK EMKM) DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI APLIKASI  
PENCATATAN INFORMASI KEUANGAN (SI APIK) PADA LAPORAN KEUANGAN  
ANUGERAH BALI COMPUTER

**Made Hari Krisnayanti, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, I Wayan Budi Satriya (283-  
292)**

PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, PERSEPSI RISIKO INVESTASI DAN MODAL MINIMAL INVESTASI TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM BERINVESTASI DI PASAR MODAL (STUDI PADA MAHASISWA S1 PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA)

**Luh Putu Dian Athari Cahyani, Ni Wayan Yuniasih (293-304)**

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM LEMBAGA PERKREDITAN DESA.

**I Ketut Bagus Demi Ryana Putra, Ni Komang Sumadi, Ni Wayan Alit Erlinawati (305-313)**

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENJALANI PROGRAM BREVET PAJAK

**Ni Komang Juliantari, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Rai Dwi Andayani W (314-329)**

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA, KOMPETENSI APARAT DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BERPENGARUH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI DENPASAR BARAT

**I Gusti Ayu Made Budiani, Cokorda Gede Bayu Putra, Putu Cita Ayu (330-340)**

PENGARUH LITERASI KEUANGAN, *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN PENGGUNAAN *E-COMMERCE* PADA KINERJA UMKM DI DENPASAR

**Ni Ketut Ulan Anjelina Sugi Artini, Ni Komang Sumadi, I Putu Deddy Samtika Putra (341-351)**





akuntabilitas, diperlukan sistem, prosedur, dan mekanisme kontrol yang efektif dalam pengelolaan dana desa (Dewi, 2023).

Jumlah dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga dalam pengelolaannya harus memperhatikan prinsip transparansi dan adanya kejelasan sasaran anggaran. Berdasarkan penjelasan (K. P. Dewi & Wati, 2020), kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa spesifik dan mudah dimengerti tujuan yang ditetapkan dalam anggaran oleh pihak yang mengelolanya. Menetapkan tujuan anggaran yang terperinci dapat mendorong para pengelola anggaran untuk melakukan tugasnya penuh dengan dedikasi tinggi, berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut bisa mengoptimalkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sistem pelaporan adalah mekanisme yang menunjukkan proses pertanggungjawaban dari staf ke pimpinan (Arta & Rasmini, 2019). Sistem pelaporan adalah instrumen yang penting guna memonitor serta mengevaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam pelaporan, penting untuk menyajikan secara detail dari hasil kerja dari pertanggungjawaban dan alokasi anggarannya. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Sistem pelaporan yang efektif dapat menentukan kinerja manajerial dalam mengelola keuangan, sehingga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Ronal, 2023).

Pegawai desa berfungsi guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan dana desa agar dapat terealisasikan dengan baik berdasarkan sasaran anggaran yang telah ditetapkan serta pelaporan yang tepat waktu perlu adanya peran perangkat desa yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa berperan penting untuk manajemen keuangan desa dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menggunakan sumber daya sesuai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Apabila perangkat desa menjalankan perannya dengan baik, maka dapat membantu memastikan dana desa dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan sasaran anggaran.

Didasarkan pemaparan diatas, penulis melaksanakan kajian yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”. Studi ini bertujuan guna “menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan







## Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Indikator	Uji Validitas			Uji Realibilitas		
	<i>Pearson Correlation</i>	Batas	Ket	<i>Cronbach Alpha</i>	Batas	Ket
Variabel X1 X1.1; X1.2; X1.3; X1.4; X1.5; X1.6; X1.7	0,639; 0,696; 0,705; 0,506; 0,644; 0,593; 0,726	0,30	Valid	0,760	0,60	Reliable
Variabel X2 X2.1; X2.2; X2.3; X2.4; X2.5	0,660; 0,618; 0,560; 0,719; 0,632	0,30	Valid	0,638	0,60	Reliable
Variabel X3 X3.1; X3.2; X3.3; X3.4; X3.5; X3.6; X3.7	0,643; 0,620; 0,570; 0,631; 0,538; 0,575; 0,657	0,30	Valid	0,710	0,60	Reliable
Variabel Y Y.1; Y.2; Y.3; Y.4	0,776; 0,854; 0,859; 0,793	0,30	Valid	0,839	0,60	Reliable

Hasil uji validitas berdasarkan nilai *pearson correlation* berada di atas 0,30 dan pada uji reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach alpha* > 0,60 maka seluruh instrument penelitian dikatakan valid dan reliable sehingga bisa diperuntukan sebagai instrument penelitian.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas mengindikasikan tingkat signifikansi 0,056, menandakan data penelitian memenuhi asumsi distribusi normal. Dari hasil pengujian multikolinearitas, nilai toleransi dari setiap variabel melebihi 10% (X1=0.605; X2=0.584; X3=0.668) dan nilai VIF < 10 (X1=1.652; X2=1.712; X3=1.496) artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independennya. Hasil uji heterokedasitas menunjukkan hasil X1=0.237; X2=0.594; X3=0.720 berarti model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

**Tabel 3 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Strandardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig
(Constant)	6.529	3.721		1.996	.050
X1	.290	.108	.392	2.692	.009
X2	.008	.156	.008	-.055	.957
X3	.069	.110	.087	.630	.531
R					0,437
<i>R Square</i>					0,191
<i>Adjusted R Square</i>					0,153
Uji F					4,961
Sig. Uji F					0,004

Berlandaskan hasil uji regresi dalam tabel 4.6, maka persamaan regresi linear berganda yakni:

$$Y = 6.529 + 0,290 X_1 - 0,008 X_2 + 0,069 X_3 + e$$

### Uji Kelayakan Model

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil analisis regresi,  $R^2$  memperlihatkan sejauh mana variasi variabel independen mempengaruhi variabel terikatnya. Nilai *Adjusted R-Square* 0,153 mengindikasikan 15,3% dari variasi variabel bebas dapat diterangkan variabel terikatnya. Sementara itu, 84,7% dari variasi tersebut diatribusikan pada variable lainnya.

#### Uji Signifikansi Nilai F (F Test)

Uji F diperuntukan guna menilai apakah seluruh variabel independennya secara simultan berdampak signifikan pada variabel dependen. Dari pengujian F, nilai Fhitung adalah 4.961 dengan level sig. 0,004. Nilai ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Karena nilai sig. (0,004) kurang dari batas signifikansi yang umumnya ditetapkan (0,05), maka kesimpulannya model regresi yang dipergunakan dapat mengasumsikan variabel dependen. Diartikan secara keseluruhan variabel independen berdampak signifikan pada variabel dependennya, maka model pada studi ini dianggap valid.

#### Uji Parsial (Uji t)

Pengujian yang diperuntukan guna menilai pengaruh satu variabel independen pada variabel dependennya. Hasil pengujian diperoleh nilai uji t untuk setiap variabel independen adalah:

- a. Variabel X1 berdampak positif signifikan pada variabel Y dengan koefisien 0.290 dan tingkat signifikansi 0.009. Hipotesis pertama (H1) diterima berdasarkan temuan ini.





- Mardiasmo. (2020). *Akuntabilitas* (andi, ed.).
- Noventiningtyas, a. P. (2018). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di kecamatan karangmojo, kabupaten gunung kidul. *E-journal uajy*.
- Nusabali.com. (2023). 27 desa di tabanan dapat tambahan dana desa. <https://www.nusabali.com/berita/153883/27-desa-di-tabanan-dapat-tambahan-dana-desa>
- Pebriyanto, w., & sumadi, k. (2021). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris di se-kecamatan sukawati). *Hita akuntansi dan keuangan universitas hindu indonesia, oktober*.
- Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2015 pasal 1 ayat 2 mengenai penentuan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, indonesia (2016).
- Peraturan menteri keuangan no. 98 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa (2023).
- Peraturan pemerintah republik indonesia no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.
- Perda no 2 tahun 2018 tentang perangkat desa, indonesia (2018).
- Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (2018).
- Pratiwi, n., kusumawati, a., & wati, a. E. (2022). Pengaruh financial governance, peran perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan mengwi. *Hita akuntansi dan keuangan universitas hindu indonesia edisi januari 2022*.
- Rahmadani, a., & syahdan, a. (2022). Pengaruh peran perangkat desa, pemahaman perangkat desa dan penerapan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se kecamatan pulau laut barat di kabupaten kotabaru. *Prosiding national seminar on accounting ukmc, 1*.
- Ronal, m. (2023). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada lembang salu sarre kecamatan sopai kabupaten toraja utara. *Jurnal riset manajemen dan ekonomi, vol.1*.
- Sawitri, & gayatri. (2021). Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-jurnal akuntansi, 31*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d* (2nd ed.). Alfabeta, bandung.
- Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, indonesia (2014).







kelangsungan UMKM meningkat seiring dengan peningkatan modal usaha. Maka hipotesis dinyatakan:

H1 : Modal Usaha berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM

Suatu usaha dapat mencapai suatu keunggulan kompetitif berkelanjutan apabila memperoleh sumber daya yang bernilai, salah satunya literasi keuangan, yang merupakan aset tidak berwujud. Dengan pengetahuan keuangan yang baik, pelaku usaha dapat membuat keputusan yang tepat dengan menggunakan kemampuan di bidang keuangannya. Hasil penelitian Dewi & Herawati (2023) menyatakan literasi keuangan memiliki dampak positif signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Maka hipotesis dinyatakan:

H2 : Literasi keuangan memberikan dampak yang menguntungkan bagi kelangsungan UMKM

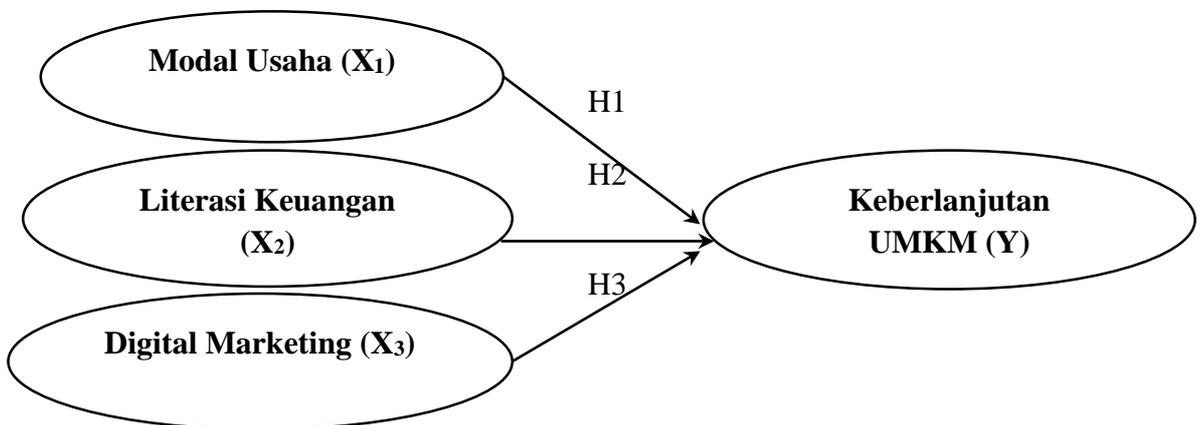
*Digital marketing* merupakan kegiatan promosi melalui media digital, seperti jejaring sosial media (Sari, dkk 2021). Febriyantoro et al berpendapat bahwa *digital marketing* memungkinkan UMKM berinteraksi dan menambah kesadaran. Hasil penelitian Mufidah, dkk (2023) menunjukkan *Digital marketing* memiliki dampak yang positif serta penting pada *sustainability* UMKM. Maka hipotesis dinyatakan:

H3 : *Digital Marketing* mempunyai dampak positif pada keberlanjutan UMKM.

## METODE PENELITIAN

**Gambar 1.**

### Desain Penelitian



Sumber: hasil pemikiran peneliti (2023)















**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Tax Morale*, dan Sikap *Love of Money* Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat)**

**Ni Putu Ayu Febriani<sup>(1)</sup>  
Putu Nuniek Hutnaleontina<sup>(2)</sup>  
I Wayan Budi Satriya<sup>(3)</sup>**

<sup>(1)(2)(3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
Jl. Sanggalangit, Tembawu, Penatih, Denpasar Timur  
*e-mail:* [putuayufebriani@gmail.com](mailto:putuayufebriani@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The study aims to examine tax knowledge, tax morale, and love of money attitudes that influence non-employee individual taxpayers regarding the intention to comply with taxation. This research was conducted in the coverage area of KPP Pratama West Denpasar using a questionnaire. Accidental sampling was used, and the samples were 100 respondents involved in this study. The SEM PLS to analyze data, in the Smart PLS software. The results indicate tax knowledge and tax morale have a significant positive effect on the intention to comply with non-employee individual taxpayers. The love of money attitude has positive insignificant effect on the intention to comply with non-employee individual taxpayers.*

**Keywords:** *Taxation Knowledge, Tax Morale, Love of Money Attitude, Compliance Intention, Taxpayer*

**PENDAHULUAN**

Sektor perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk penopang jalannya perekonomian dan pembangunan nasional. Penerimaan dan pendapatan dari pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pajak digambarkan sebagai kewajiban individu untuk menyeter sebagian dari penghasilan mereka atau sumbangsih kepada negaranya dengan tujuan untuk mendukung terlaksananya program pemerintah, yang hasilnya dinikmati bersama dalam bentuk fasilitas Negara. Meskipun pajak disebut sebagai sumbangsih, pajak memiliki sifat memaksa yang setiap prosesnya berlandaskan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan pajak, tidak hanya mengandalkan kesadaran dan usaha dari pegawai perpajakan, namun juga diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Kepatuhan pajak dapat dikatakan sebagai perilaku dan motivasi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya dan memperoleh hak berkaitan dengan aspek perpajakan. Kepatuhan terhadap pajak menjadi bahasan yang cukup penting, untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak dan wajib pajak

melakukan kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa banyak wajib pajak orang pribadi (WP OP) non karyawan yang belum patuh untuk mengungkapkan pajak tahunan mereka. Dari keseluruhan 4,4 juta wajib pajak, hanya 1,5 juta atau sekitar 34,09% yang telah melaporkan SPT mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Siswanto, 2023). Ini mengindikasikan masih banyak WP OP non karyawan yang belum membayar kewajiban perpajakannya dengan benar.

Mematuhi kewajiban perpajakan seringkali menjadi tantangan bagi wajib pajak. Banyak dari mereka yang cenderung menghindari atau tidak memperhatikan kewajiban perpajakannya. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang hal ini, berikut disajikan jumlah kepatuhan WP OP non karyawan di KPP Pratama Denpasar Barat.

**Table 1 Realisasi Pelaporan SPT 2018-2022**

Tahun	WP OP Non Karyawan Terdaftar	Realisasi SPT	Persentase Tingkat Kepatuhan
2018	9.892	9.876	99,83%
2019	9.934	9.713	97,53%
2020	11.578	8.730	75,16%
2021	10.298	7.651	74,60%
2022	11.207	8.072	72,64%

Sumber: data diolah (2024)

Jika dilihat dari data jumlah wajib pajak WP OP non karyawan yang tercatat KPP Pratama Denpasar Barat dari 2018 sampai 2022, terjadi penurunan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kepatuhan WP OP non karyawan adalah minimnya kesadaran mereka untuk menjalankan kewajiban *self assessment*-nya. Sistem *self assessment* merupakan pendekatan dalam pengenaan pajak di mana wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, memiliki tanggung jawab dan kebebasan untuk menentukan, menghitung, dan membayar jumlah pajaknya. Melalui sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak guna mengelola dan memenuhi kewajiban pajak mereka secara mandiri sesuai peraturan yang berlaku.

Dari studi sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mereka mengenai sistem perpajakan (Haryanti et al., 2022). Pemahaman seorang wajib pajak tentang sistem perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban pajaknya. Pengetahuan mengenai yang sangat mendalam dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

(Wijayanti & Ekowati, 2022). Hasil studi dari Wijayanti & Ekowati (2022) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

*Tax morale* dipandang sebagai motivasi instrinsik untuk membayar pajak (Sumule & Erawati, 2023). Wajib pajak yang memiliki *tax morale* yang baik akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya, serta cenderung bertindak jujur dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian dari Sumule & Erawati (2023), menyatakan bahwa *tax morale* berdampak positif pada kepatuhan calon wajib pajak. Niat kepatuhan terhadap pajak juga ditentukan oleh sikap kecenderungan berlebihan individu terhadap uang atau *love of money*. *Love of money* merupakan tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dan cara orang tersebut dalam mengartikan pentingnya uang bagi kehidupannya (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021). Hubungan *Love of money* dengan kepatuhan masyarakat terhadap pajak dapat dilihat dari, cara individu dalam mendapatkan dan mengumpulkan uang dengan menekan pengeluaran, begitu pula saat mereka membayar pajak (Choiriyah & Damayanti, 2020). Hasil kajian dari Harfiani & Tjan (2021) menyatakan *love of money* berdampak negatif pada ketaatan wajib pajak, sedangkan hasil studi Ratnawardhani et al. (2020), menyatakan *love of money* mempengaruhi positif pada ketaatan calon wajib pajak.

Pada studi ini, peneliti menjadikan WP OP non karyawan sebagai subjek penelitian karena tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh WP OP non karyawan masih tergolong rendah dibandingkan wajib pajak lainnya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar niat yang dimiliki oleh WP OP non karyawan. Dari penjelasan latar belakang, maka peneliti memutuskan mengkaji fenomena ini berjudul: “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Tax Morale*, dan Sikap *Love of Money* Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat)”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Kepatuhan**

Teori Kepatuhan yang dikembangkan oleh Stanley Milgram tahun 1963 menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam mematuhi perintah atau aturan tertentu. Teori ini mengidentifikasi 2 perspektif utama tentang kepatuhan pada hukum. Pertama, Perspektif Instrumental, yang menekankan bahwa individu cenderung mematuhi hukum karena dorongan kepentingan pribadi dan persepsi mereka tentang konsekuensi dari tindakan yang

dilakukan. Kedua, Perspektif Normatif, yang mengaitkan kepatuhan dengan keyakinan individu terhadap moralitas dan prinsip keadilan yang lebih tinggi dari kepentingan pribadi mereka. Seorang individu yang mematuhi hukum biasanya dianggap memiliki konsistensi dengan nilai-nilai dan norma internal yang mereka pegang.

Kepatuhan dapat diinterpretasikan sebagai perubahan dalam perilaku seseorang dari tidak mematuhi menjadi mematuhi aturan atau peraturan yang berlaku (Putri et al., 2022). Teori Kepatuhan yang relevan dapat memotivasi seseorang untuk lebih taat terhadap aturan yang ada, seperti halnya wajib pajak yang berupaya memenuhi kewajiban perpajakannya tepat pada waktunya (Wangi et al., 2023). Teori Kepatuhan dapat diterapkan untuk menilai pengaruh setiap variabel dalam penelitian ini, diantaranya pengetahuan perpajakan, *tax morale*, dan sikap *love of money* terhadap niat patuh WP OP non karyawan.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan adalah informasi atau keahlian yang seseorang peroleh melalui pengalaman pribadi atau observasi langsung (Pratiwi & Jati, 2020). Memiliki pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal esensial bagi wajib pajak, dengan harapan dapat membuka pemikiran masyarakat akan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara (Wijayanti & Ekowati, 2022). Dengan adanya pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan diharapkan wajib pajak akan sadar dan taat guna membayarkan kewajiban pajaknya. Dari penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H1 : “Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan”.

### ***Tax Morale***

*Tax Morale* ialah motivasi yang bersumber dari dalam diri wajib pajak, Wardani & Anugrah (2023) juga menjelaskan bahwa *Tax Morale* atau moral pajak diartikan sebagai motivasi yang timbul pada individu yang mempercayai pajak merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab bersama. *Tax morale* merupakan salah satu hal yang mendorong individu untuk mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Subiantoro et al. (2023) menjelaskan bahwa *tax morale* memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak seseorang membayarkan pajaknya secara sukarela. Wajib pajak dengan *tax morale* yang baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya, serta bersikap jujur dan patuh untuk mentaati peraturan perpajakan (Sumule & Erawati, 2023). Daeri penjelasan diatas, dirumuskan hipotesis berikut ini:

H2 : “*Tax Morale* Berpengaruh Positif Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.”

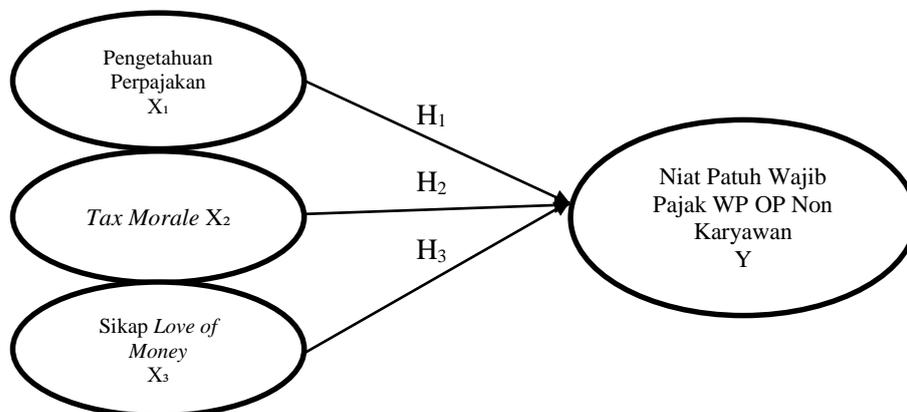
### Sikap *Love of Money*

Diartikan sebagai level kecintaan individu terhadap uang. Tingginya sikap ini dalam diri individu akan membuatnya menganggap bahwa uang merupakan segalanya yang memegang peranan penting dalam kehidupan. *Love of money* sering dikaitkan dengan kerakusan dan ketamakan (Farhan et al., 2019). Dalam hal ini, maksud dari sikap *love of money* yaitu cara individu melakukan berbagai cara untuk mendapatkan banyak uang dengan menekan pengeluaran, begitu pula ketika mereka membayar kewajiban pajaknya (Choiriyah & Damayanti, 2020). Seseorang yang memiliki kecintaan berlebih terhadap uang, mungkin dapat menjadikan seseorang tersebut akan mempertimbangkan kembali untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun, seseorang menunjukkan *love of money* yang tinggi, tidak menutup kemungkinan jika tingginya sikap tersebut, masih memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ratnawardhani et al., 2020). Dari penjelasan diatas, dirumuskan hipotesis yaitu:

H3 : “Sikap *Love of Money* Berpengaruh Positif Terhadap Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan”.

### METODE PENELITIAN

Dari pemaparan di atas, maka disusunlah desain penelitian ini yang tersaji dalam gambar 1.



Gambar 1. Desain Penelitian

Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2019), Variabel penelitian adalah karakteristik atau nilai yang berbeda dari individu, objek, atau kegiatan yang dipilih peneliti untuk dikaji dan disimpulkan. Dalam studi ini menggunakan variabel independent meliputi Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>), *Tax Morale* (X<sub>2</sub>), dan Sikap *Love of Money* (X<sub>3</sub>) dan variabel *dependen* yakni Niat Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Y). Adapun populasinya merupakan WP OP non karyawan yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat berjumlah

11.207 orang. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menerapkan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad n = \frac{11.207}{1 + 11.207(0,1)^2} = 99,11 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin, jumlah sampelnya sebanyak 99,34 dibulatkan menjadi 100 responden. Metode pengambilan sampelnya yakni *non probability sampling (accidental sampling)*, yaitu pengambilan sampel secara acak dari individu yang memenuhi kriteria sebagai sampel.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan teknik statistik deskriptif. Teknik ini difokuskan pada analisis data dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang bisa digeneralisasi untuk seluruh populasi, melainkan lebih pada pemahaman dan interpretasi data yang ada (Sugiyono, 2019). Pada studi ini, teknik analisis data yang diterapkan yaitu Partial Least Square (PLS), sebagai salah satu model dari SEM. Metode PLS ini dianggap efektif karena tidak memerlukan asumsi bahwa data wajib berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2021) PLS-SEM mencakup model pengukuran (*Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Reliability*), dan model structural (*R-Square, F-Square, Path Analysis dan Pengujian Hipotesis*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis deskriptif, pengetahuan perpajakan menunjukkan skor rerata indikator yaitu 4,08, menunjukkan tingkat penilaian yang tinggi. Variabel *tax morale* mendapatkan penilaian tinggi dengan skor rerata indikator 4,09. Sementara itu, sikap *love of money* dinilai tinggi dengan skor rerata 3,85. Selanjutnya, variabel niat patuh wajib pajak mendapatkan penilaian yang sangat tinggi, skor rerata indikator sebesar 4,23.

Karakteristik responden, yaitu: 1) Berdasarkan Jenis kelamin: perempuan lebih mendominasi, yang berjumlah 64 orang (64%), 2) Usia responden: kebanyakan responden berusia 26-35 Tahun, yang berjumlah 41 orang (41%), 3) Berdasarkan Pendidikan: Lebih banyak responden yang merupakan tamatan S1 sebanyak 59 responden (59%), 4) Karakteristik Pekerjaan dalam penelitian ini didominasi berasal dari pekerja bebas lainnya sebanyak 69 responden (69%), dan 5) Karakteristik Domisili dalam penelitian ini didominasi berasal dari daerah Denpasar Barat sebanyak 52 responden (52%).

## Uji Model Pengukuran

### *Convergent Validity*

**Tabel 1. Nilai *Outer Loading***

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
<b>Pengetahuan Perpajakan (X1)</b>	X1.2	0,735
	X1.3	0,757
	X1.4	0,659
	X1.5	0,778
	X1.6	0,830
	X1.7	0,636
	<b>Tax Morale (X2)</b>	X2.2
X2.3		0,833
X2.6		0,712
X2.7		0,745
<b>Sikap <i>Love of Money</i> (X3)</b>	X3.7	1,000
<b>Niat Patuh Wajib Pajak (Y)</b>	Y1.1	0,715
	Y1.2	0,765
	Y1.3	0,647
	Y1.4	0,819
	Y1.5	0,784
	Y1.6	0,655
	Y1.7	0,779

Sumber: data diolah (2024)

Didasarkan hasil dalam Tabel 1, ditunjukkan semua indikator sudah memenuhi ketentuan validitas yaitu nilai *outer loading* berada diatas 0,60.

### *Discriminant Validity*

**Tabel 2. Uji *Discriminant Validity***

Variabel	AVE	$\sqrt{\text{AVE}}$	Pengetahuan perpajakan (X1)	Tax morale (X2)	Sikap Love of Money (X3)
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,541	0,736			
Tax morale (X2)	0,568	0,754	0,583		
Sikap Love of Money (X3)	1,000	1,000	0,380	0,475	
Niat Patuh WP (Y)	0,548	0,740	0,607	0,709	0,419

Berdasarkan Tabel 2, seluruh konstruk menunjukkan nilai AVE > 0,50, dan nilai  $\sqrt{\text{AVE}}$  dari tiap variabel berada dalam rentang 0,736 hingga 1,000. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar variabel, yang berkisar antara 0,380 hingga 0,709. Dengan demikian, data memenuhi ketentuan validitas sesuai kriteria *discriminant validity*.

### *Composite Reliability dan Cronbach Alpha*

**Tabel 3. *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha***

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,831	0,875
Tax Morale (X2)	0,746	0,840
Sikap love of money (X3)	1,000	1,000
Niat patuh WP (Y)	0,862	0,894

Ditunjukkan dalam Tabel 3, nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* untuk setiap konstraknya melebihi 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa data memenuhi kriteria reliabilitas berdasarkan standar *Composite Reliability*.

## Evaluasi Model Struktural

Melaui pengujian *R-Square* ( $R^2$ )

**Tabel 4. Evaluasi Melalui *R-Square***

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
<b>Niat patuh wp</b>	0,563	0,549

Tabel 4 memperlihatkan nilai *R-Square* niat patuh wajib pajak 0,563 merujuk pada kriteria Chin (Ghozali, 2021), sehingga model ini dikategorikan sebagai model moderat cenderung kuat, bahwasannya niat patuh WP OP non karyawan mampu dipengaruhi pengetahuan perpajakan, *tax morale*, dan sikap *love of money* sebesar 0,563.

## Melalui *F-Square*

**Tabel 5. Evaluasi Melalui *F-Square***

Variabel	Niat Patuh WP
Pengetahuan perpajakan (X1)	0,118
<i>Tax Morale</i> (X2)	0,350
Sikap <i>love of money</i> (X3)	0,008

Sumber: data diolah (2024)

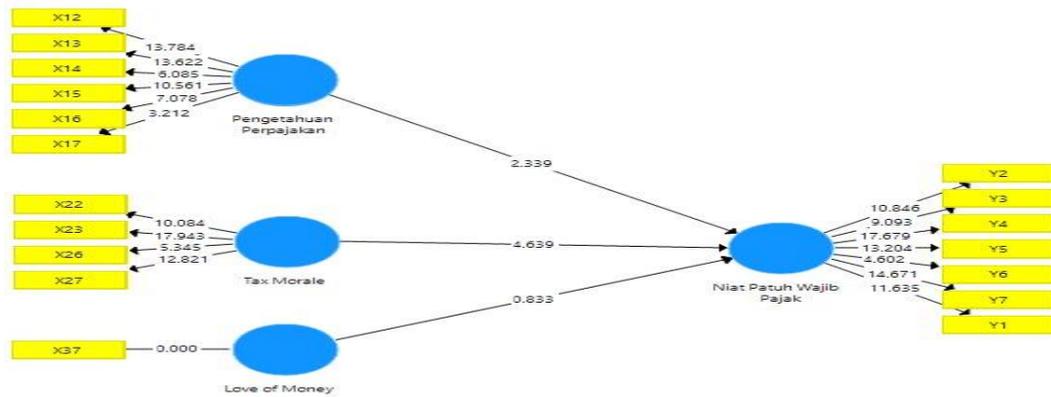
Tabel 5 mengindikasikan pengetahuan perpajakan memperlihatkan pengaruh yang moderat (tidak lemah tidak kuat) terhadap niat patuh wajib pajak sebesar 0,118. *Tax morale* berpengaruh kuat terhadap niat patuh wajib pajak yaitu 0,350, sedangkan sikap *love of money* pengaruhnya lemah terhadap niat patuh wajib pajak yaitu 0,008.

## Path Analisis dan Pengujian Hipotesis

**Tabel 6. Path Analisis dan Pengujian Statistik**

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values	Keterangan Hipotesis
<b>Pengetahuan Perpajakan -&gt; Niat Patuh Wajib Pajak</b>	0,283	2,339	0,020	Diterima
<b>Tax Morale -&gt; Niat Patuh Wajib Pajak</b>	0,511	4,639	0,000	Diterima
<b>Love of Money -&gt; Niat Patuh Wajib Pajak</b>	0,068	0,833	0,405	Ditolak

Sumber: data diolah (2024)



Gambar 2. Bootstrapping

Tabel 6 menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berdampak positif yaitu 0,283 terhadap variabel Y dengan signifikansi yaitu  $0,020 < 0,05$  maka hipotesis pertama diterima.
2. *Tax morale* berdampak positif yaitu 0,511 terhadap variabel Y dengan signifikansi yakni  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis kedua diterima.
3. Sikap *love of money* berdampak positif yaitu 0,068 terhadap variabel Y dengan signifikansi yaitu  $0,405 > 0,05$  maka hipotesis ketiga ditolak.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 mengindikasikan pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada variabel Y, sehingga H1 diterima. Meningkatnya pengetahuan seseorang mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan mereka semakin meningkat, sehingga mereka senantiasa menjalankan kewajiban pajaknya. Hasil ini relevan dengan hasil studi dari Sugiyani et al. (2022) dan Sumule & Erawati (2023), yaitu pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa 2 mengindikasikan pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada variabel Y, sehingga H1 diterima. Semakin meningkatnya *tax morale* dari wajib pajak, maka kepatuhan mereka semakin tinggi dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pengaruh positif signifikan *tax morale* terhadap niat patuh wajib pajak mampu menjelaskan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban moral untuk memiliki sikap patuh terhadap mekanisme perpajakan yang berlaku, serta adanya motivasi dalam diri wajib pajak guna memenuhi pajak dengan tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, individu dengan *tax morale* yang tinggi tentunya akan berpotensi kuat menjadi individu yang patuh, dimana hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Temuan ini relevan dengan hasil studi Sumule & Erawati (2023) dan Wardani & Anugrah (2023), di mana *tax morale* berdampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Didasarkan hasil pengujian hipotesa 3 mengindikasikan *love of money* berdampak positif tidak signifikan pada variabel Y, sehingga hipotesis H3 ditolak. Secara konseptual, *love of money* menggambarkan suatu sikap atau perasaan yang berlebihan terhadap uang. Konsep ini erat kaitannya dengan ketamakan, di mana seseorang yang sangat mencintai uang cenderung memiliki sifat yang tamak atau serakah. Orang yang memiliki *love of money* yang tinggi biasanya lebih fokus pada aspek materialistik dan finansial dalam hidupnya. Mereka mungkin terobsesi untuk mendapatkan lebih banyak uang dan memprioritaskan kekayaan material di atas hal-hal lain dalam hidup. Individu yang menunjukkan rasa cinta terhadap uang akan memutuskan apakah akan membayarkan pajaknya atau tidak dengan membandingkan hasil yang akan dia dapatkan dari pembayaran pajak tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, kesimpulannya sikap *love of money* baik tinggi maupun rendah, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Wajib pajak secara umum menyadari dan percaya bahwa membayar pajak yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kontribusi mereka untuk masyarakat. Mereka meyakini bahwa dengan membayar pajak, mereka berkontribusi pada pembangunan dan mendapatkan manfaat yang sepadan dari kewajiban pajak yang mereka bayar (Choiriyah & Damayanti, 2020). Temuan ini relevan dengan hasil kaian (Ratnawardhani et al., 2020) dan (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023) dimana sikap *love of money* berdampak positif tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berlandaskan hasil studi memperlihatkan Pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada niat patuh WP OP. Ini mengindikasikan tingginya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar kewajiban pajaknya. *Tax morale* berdampak positif signifikan pada niat kepatuhan WP OP. Ini mengindikasikan tingginya *tax morale* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Sementara itu, *love of money* berdampak positif tidak signifikan pada niat patuh WP OP dalam membayar pajaknya, karena setiap orang memiliki orientasi yang berbeda dalam menilai uang. Dapat dikatakan bahwa tingkat *love of money* pada diri wajib pajak tidak berpengaruh pada ketaatan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sebab mereka menganggap bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat, di mana hasilnya nanti dapat dinikmati secara tidak langsung oleh masyarakat.

Berlandaskan kesimpulan di atas, saran yang hendak disampaikan yakni bagi KPP Pratama Denpasar Barat dapat memperluas sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat dan menanamkan motivasi dalam diri (*tax morale*) masyarakat sebagai wajib pajak sejak dini dengan cara memberikan edukasi dan pengenalan mengenai perpajakan di setiap jenjang pendidikan. Bagi para wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan atau mempelajari literasi perpajakan. Selain itu meningkatkan kesadaran untuk patuh terhadap sistem perpajakan yang berlaku (*tax morale*), sehingga wajib pajak lebih patuh dan menyadari atas keharusannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Individu yang cenderung memiliki sikap *love of money* juga diharapkan mampu memaksimalkan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat. Untuk peneliti selanjutnya yang bermaksud untuk mengkaji aspek serupa mengenai niat patuh WP OP non karyawan diharapkan untuk mengembangkan kajian serupa dengan menambahkan beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh pada niat patuh wajib pajak dan menggunakan populasi serta sampel yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh machiavellian dan love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486.
- Ghozali, I. (2021). Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2. 9 (3 rd). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Harfiani, H., & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 2(1), 140–154.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371.
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, religiusitas, love of money, dan etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30.
- Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674.
- Putri, N. K. D. A., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*,

- 4(1), 287–299.
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2), 177–187.
- Siswanto, D. (2023, October). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Belum Sentuh 50%*. <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Rasio-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Non-Karyawan-Belum-Sentuh-50>.
- Subiantoro, G., Hananto, H., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh tax morale terhadap tax evasion intention di surabaya dengan kepribadian conscientiousness & agreeableness sebagai moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21–33.
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2389–2395.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung. Alfabeta, 2019.
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273–280.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 443–455.
- Wardani, D. K., & Anugrah, W. (2023). Pengaruh Tax Morale Dan Pemahaman Tri Nga Terhadap Peningkatan Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(2), 221–226.
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 394–406.
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3.























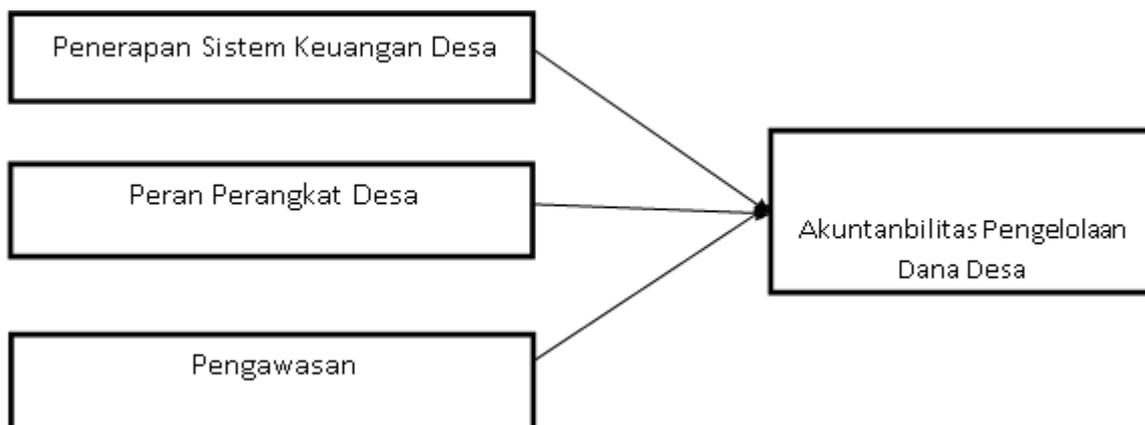












**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Populasi penelitian ini terdiri dari 128 orang yang bekerja sebagai perangkat desa di tujuh desa di kabupaten Ubud. Kriteria yang digunakan dalam survei pengambilan sampel adalah seluruh perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala desa, direktur keuangan, direktur perencanaan, direktur pemerintahan, direktur kesejahteraan masyarakat, dan direktur pelayanan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 56 orang”. Metode analisis dalam penelitian ini: Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi (R2), Uji F, Uji t

**Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut**

(Sugiyono, 2012):

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

“Hasil pengujian instrumen penelitian dapat dijelaskan oleh semua variabel yang mempunyai nilai koefisien lebih besar dari 0,30, dan koefisien alpha lebih besar dari 0,6, sehingga seluruh instrumen valid dan reliabel. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai asymp.sig (two-tailed) lebih besar dari 0,05 (0,143 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel “Pelaksanaan sistem keuangan desa” (X1) mempunyai nilai toleransi sebesar 0,256 dan nilai VIF sebesar 3,909. Variabel toleransi (X2) peran perangkat desa sebesar 0,275 dan nilai VIF sebesar 3,400. Nilai toleransi variabel yang dipantau (X3) sebesar 0,179 dan nilai VIF sebesar 2,642. Karena toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF tidak lebih besar dari 10, kita dapat berasumsi bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji Glejser dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai signifikansi variabel lebih





- Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa(Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di desa Banyudono Kecamatan Dukun. *JESYA (jurnal Ekonomi & Ekonomi syariah)*, 763-776. Faizah, D.
- N. (2021). "Pengaruh Peran Perangkat Desa ,Transparansi,Partisipasi,Dan kompetensi Terhadap Akuntabilitas Dana desa". *repository.upstegal.ac.id*, 1-109.
- Ghozali. (2016). Uji Validitas.
- Husna, & Abdullah. (2016). "Otoritas desa dapat lebih mudah melayani kepentingan publik".
- Indonesia. (2014). "Perangkat desa yang berperan penting malah tidak mengerjakan pekerjaannya".
- Iqbal, M. (2022). "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang". *Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian*, 1-68.
- Jeremias, & Setiawan. (2018). " Akuntabilitas berfungsi sebagai tolak ukur bagi pemerintah desa".
- Kharisma. (2014). Good Governance merupakan salah satu aspek yang berperan penting terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
- Krisnanti, N. P. (2022). "Pengaruh Kepemimpinan,Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".
- Kusmawardani, G., & Nurfadliyah. (2022). "Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi kasus di desa kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)". *Jurnal Tambora*, 113- 117.
- Maharini. (2019). "Pengelolaan dana desa yang baik tidak terlepas dari perencanaan pengelolaan dana desa yang baik".
- Mardiasmo. (2002). Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah.
- Mega, K. N., Kalangi, L., & M.Kapojos, P. (2022). "Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur". *Jurnal Riset Akuntansi 17(3),2022,150-161-*, 150-161.
- Nainggolan, F. A. (2017). "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)". *repository.uinsu.ac.id*, 106.
- Nurak, Y. V., Mitan, W., & Go'o, E. E. (2023). "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa". *Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 243-256.
- Olivia, C. R., & Utomo, R. B. (2023). "Pengaruh Partisipasi Masyarakat,Peran Perangkat Desa,dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".
- Riduan, M. A. (2021). "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Persepektif Akuntansi Syariah". *repository.radenintan.ac.id*, 45.
- Ridwan. (2019). Sistem Keuangan Akan memberikan Keuntungan.
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi,Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka". *Maro;Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 168.
- Wulandari, A. (2022). "Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES),Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi Empiris pada pemerintah Nagari di Kecamatan Kamang Baru,Kabupaten Sijunjung,Sumatera Barat)". *UIN SUSKA RIUA*, 1-120.

























penyampaian laporan keuangan pada tanggal 31 Maret setiap tahun, diberlakukan kembali seiring dengan mulai menandakan tanda-tanda perbaikan perekonomian Indonesia.

Banyak perusahaan yang masih merasakan keterlambatan penyampaian laporan keuangan karena perubahan peraturan mengenai tanggal jatuh tempo. Di antara 61 perusahaan yang diketahui gagal mengutarakan laporan keuangan tahun 2022, terdapat kejadian keterlambatan penyampaian. BEI akan memberi teguran tertulis II dan denda Rp50 juta dimulai kalender ke-31, sesuai klausul II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H yang mengatur mengenai sanksi. Perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan sampai dengan hari kalender ke-60 setelah tenggat waktu yang ditentukan. Tautan tersebut dikunjungi pada 4 Oktober 2023 dari <https://investasi.kontan.co.id/>.

Kemampuan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu sebagai suatu kriteria yang memengaruhi seberapa cepat laporan keuangan harus diungkapkan. Korporasi tidak akan menyembunyikan informasi yang memuat laba karena laba akan berdampak baik bagi perusahaan. Leverage suatu perusahaan dapat dijabarkan sebagai rasio total utang kepada nilai asetnya; rasio ini menandakan seberapa jauh industri bergantung pada pinjaman untuk mendanai operasinya. Bila suatu organisasi mempunyai banyak hutang dan tingkat leverage yang tinggi, itu berarti organisasi tersebut berisiko secara finansial dan mungkin berada dalam masalah. Kredibilitas Kantor Akuntan Publik (KAP) juga merupakan faktor penentu; saat melakukan audit, bisnis hanya akan bekerja sama dengan KAP yang telah mendapatkan reputasi yang baik di antara kliennya. Prosedur audit yang lebih cepat dalam menghasilkan laporan keuangan sebagai suatu cara menandakan reputasi kuat seorang KAP.

Tujuan dari riset ini ialah untuk menguji hubungan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada bisnis properti dan real estate yang terdaftar BEI dengan profitabilitas, leverage, dan reputasi KAP ketika 2019 sampai 2022. Dilihat dari kelebihan, riset ini sebagai alat dalam mengembangkan pengetahuan serta wawasan dan praktek dalam penerapan akuntansi selama perkuliahan untuk mahasiswa. Untuk universitas akan jadikan riset





keuangannya. Menurut teori sinyal, perihal ini dapat dilihat sebagai sinyal yang mengungkapkan situasi suatu perusahaan. Riset sebelumnya yang diselenggarakan oleh Agustina dan Rahmawati (2023) serta Ferdina dan Wirama (2017) menandakan yaitu leverage berdampak kepada kesesuaian waktu menyampaikan laporan finansial.

**H<sub>2</sub> : Leverage berdampak kepada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan**

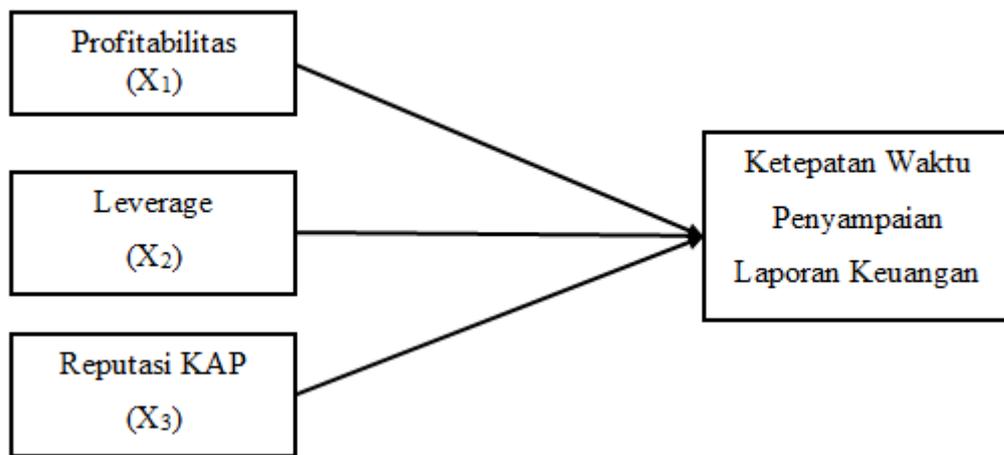
Ketika seorang KAP menjadi anggota Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4), sebuah KAP yang sangat besar dan terpandang, perihal itu menandakan yaitu mereka mempunyai reputasi yang baik. Dalam teori sinyal menyebutkan yaitu pemegang saham dan pihak-pihak lain dapat memakai ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai sinyal positif tentang kinerja dan integritas perusahaan. KAP dengan reputasi yang baik dapat mengindikasikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa industri tersebut dapat diandalkan. Akibatnya, dunia usaha mungkin merasakan tekanan yang lebih besar untuk mengutarakan laporan keuangannya tepat waktu. Rahmatia (2020) dan Tang & Elvi (2021) menemukan yaitu reputasi KAP sangat memengaruhi seberapa cepat laporan keuangan diungkapkan.

**H<sub>3</sub> : Reputasi KAP berdampak kepada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan**

**METODE PENELITIAN**

Riset ini memiliki desain sebagai berikut:

**Gambar 1. Desain Penelitian**



Sumber : Data diolah (2024)

















Koperasi rentan terhadap risiko kecurangan atau fraud, yang sering kali terjadi dalam bentuk manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan markup yang merugikan keuangan perusahaan. Untuk menghadapi hal ini, pencegahan kecurangan sangat penting. Ini melibatkan pengawasan yang ketat, mempersempit peluang kecurangan, mengurangi tekanan terhadap anggota, dan menolak alasan untuk membenarkan kecurangan. Pencegahan ini krusial untuk melindungi reputasi institusi dan individu serta mencegah kerugian lebih lanjut. (Kuswati, 2023)

Perkembangan koperasi di Bali pesat, dengan 5.394 unit tersebar di seluruh kabupaten. Di Kabupaten Badung, khususnya Kecamatan Mengwi, terdapat 32 Koperasi Serba Usaha, di mana satu di antaranya mengalami kasus korupsi. Koperasi Werdhi Sedana di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana nasabah senilai Rp 2,9 miliar. Audit menunjukkan penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP). Meskipun diundang berkali-kali, manajer koperasi tidak memenuhi undangan pengurus timsus untuk membahas hasil audit. Sembilan nasabah akhirnya melapor ke Polda Bali setelah upaya somasi tidak berhasil. Polda Bali sedang menyelidiki laporan tersebut. (Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Kabid Humas Polda Bali)

Kasus korupsi pada Koperasi Serba Usaha Werdhi Sedana di Desa Baha, Mengwi, Bali, menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan masih belum optimal. Faktor-faktor seperti birokrasi berlapis, rendahnya integritas lingkungan kerja, tekanan yang tinggi, dan kurangnya kontrol dapat menjadi penyebabnya. Komitmen organisasi memainkan peran penting dalam pencegahan kecurangan, dengan komitmen tinggi dapat mengurangi niat untuk melakukan kecurangan. Namun, penelitian menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Selain komitmen, budaya organisasi juga berperan dalam pencegahan kecurangan dengan menciptakan budaya kejujuran dan etika tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, namun hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang beragam. Untuk menguji hubungan antara komitmen organisasi, budaya organisasi, dan pencegahan kecurangan, perlu diperhatikan peran badan pengawas sebagai pemoderasi. Badan pengawas dapat membantu mengurangi kecurangan melalui pengawasan yang baik dan memberikan masukan kepada pengurus. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direncanakan untuk meneliti peran badan pengawas dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pada koperasi serba usaha di Kecamatan Mengwi, Bali.



mencegah individu melakukan kecurangan. Budaya kejujuran dan etika dengan nilai tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi (Septiani et al., 2023).

Dewan Pengawas adalah sebuah badan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan operasional suatu perusahaan. Tugas utamanya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, praktik, dan keputusan yang diambil oleh Direksi atau manajemen perusahaan. Namun, perannya tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga memberikan nasihat yang strategis kepada Direksi untuk memastikan bahwa kegiatan pengurusan perusahaan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan serta nilai perusahaan.

Komitmen organisasi juga menjadi faktor yang penting dalam pencegahan kecurangan. Komitmen organisasi merupakan salah ukuran yang dilakukan untuk memahami hubungan antara tujuan dan hasil kerja. Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja sangat menentukan kinerja yang akan dicapai organisasi. Individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi menyebabkan individu tersebut berupaya untuk semaksimal mungkin meraih tujuan organisasi, sehingga mereka akan patuh pada aturan-aturan yang berlaku dan dapat mengurangi terjadinya kecurangan (Anggoe & Reskino, 2023). Penelitian (Made et al., 2021) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan . Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.**

Budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan tindakan, menetapkan norma-norma perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, memandu pengelolaan dan alokasi sumber daya, dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan internal dan eksternal. Ketika karyawan menjunjung tinggi prinsip-prinsip panduan organisasi, budayanya dikatakan kuat. Perusahaan dan organisasi dengan budaya organisasi yang kuat memiliki tingkat penipuan yang lebih rendah, dan sebaliknya (Karyani dkk, 2024). Budaya yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika didalam sebuah organisasi dapat mengurangi tindak kecurangan yang dapat merugikan Perusahaan (Sumendap et al., 2019). Penelitian (Anggraeni Mersa & Niken Elok Larasatining Malini, 2021) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan**















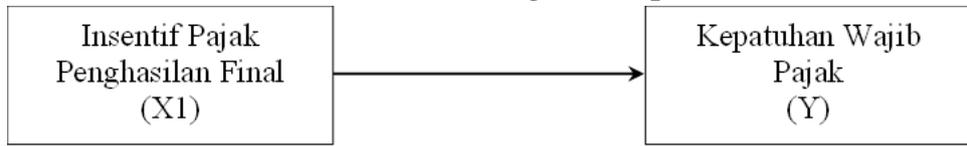






didapat dari observasi ini diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner ke seorang wajib pajak UMKM di Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini memiliki variabel bebas yaitu insentif pajak penghasilan final dan untuk variabel terikatnya yaitu kepatuhan WP.

**1. Gambar Kerangka Berpikir**



*Sumber : Kajian Teori dan Penelitian Sebelumnya*

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Tabel Simpulan Uji Validity serta Reliabilitas**

Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	R Product Moment	Ket.	Alpha Cronbach	Standar Alpha Cronbach	Ket.
Insentif Pajak Penghasilan Final (X1)	X1.1	0,426	0,300	Valid	0,613	0,6	Reliabel
	X1.2	0,765	0,300	Valid			
	X1.3	0,802	0,300	Valid			
	X1.4	0,716	0,300	Valid			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,565	0,300	Valid	0,783	0,6	Reliabel
	Y.2	0,743	0,300	Valid			
	Y.3	0,762	0,300	Valid			
	Y.4	0,646	0,300	Valid			
	Y.5	0,397	0,300	Valid			
	Y.6	0,704	0,300	Valid			
	Y.7	0,785	0,300	Valid			
	Y.8	0,421	0,300	Valid			

*Sumber : Data diolah, 2023*

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi di setiap item pernyataan nilainya > dari nilai R produk momen sebesar 0,300 dan nilai alfa cronbach setiap variabel nilainya > dari nilai standar alfa cronbach 0,6. Hal ini bisa dipahami bahwasannya setiap item pernyataan valid dan reliabel.

**Tabel Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak Penghasilan Final	10	12	20	16.85	1.982
Kepatuhan Wajib Pajak	10	27	40	34.01	3.307
Valid N (listwise)	10				

*Sumber : Data diolah, 2023*



**Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.631	.798		2.044	.044
Insesntif Pajak Penghasilan Flnal	-.028	.047	-.061	-.605	.547

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber : Data diolah, 2023 (Lampiran 4)

Hasil dari uji hetroskedastisitas menunjukkan tingkat sig. dari variabel Insesntif Pajak Penghasilan Final (X1) senilai  $0,547 > 0,05$ . Berarti variabele bebas dlam observasi ini terbebas dari gejala hetroskedastisitas.

**Hasil Analisis Regeresi Linear Sederhanna**

Pengkajian regresi linear yang simpel dimaksudkan untuk mengamati keterkaitan sebab-akibat yang timbul antarana variable ynag satu dengan laiannya dalam studi ini yakni Dampak Pemberian Insentif Pajaak Penghasilan Akhir Pada Ketaatan WP Umkm Selama Pamdemi Covid-19 Sesuai PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Di Wilayah Badung. Untuk hasilnya dapat disimak pada tabel berikut.

**Tabel Rangkurnan Hasil Analisis Data**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.864	1.281		6.920	.000
Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final	1.492	.076	.894	19.764	.000
R					.894
R Square					.799
Adjusted R Square					.797

Asal: Data diolah, 2023

Hasil evaluasi regeresi linear berjamak menunjukkan data ditemukan persamaan regresi linier berganda  $Y = 8,864 + 1,492x1$ . Berdasarkan persamaan itu menunjukkan data bahwa :

- a. Angka tetap (a) memiliki jumlah positif sebesar 8,864. Fakta ini mengindikasikan bahwa apabila variabel pemberian insentif pajak penghasilan akhir (X1) berjumlah 0 persen atau tidak berubah, maka nilai kepatuhan WP (Y) adalah 8,864.









## **Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Krisna Yuna Dana**

**Ni Kadek Natalia Pratiwi <sup>(1)</sup>**

**Ni Putu Trisna Windika Pratiwi <sup>(2)</sup>**

<sup>(1)(2)</sup> Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
*e-mail: kadeknataliapratiwi2001@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to ascertain how internal control system components are applied when granting credit at PT. BPR Krisna Yuna Dana. In order to gather information for this descriptive qualitative study of loan provision at PT. BPR Krisna Yuna Dana, informants were interviewed and observations were made. Data gathering, reduction, presentation, and conclusion/verification are the analysis techniques used. On the basis of the findings and debate, it is possible to draw the conclusion that PT. BPR Krisna Yuna Dana has successfully implemented the internal control system for credit provision. Nonetheless, there are gaps in the communication and informational components, and there is currently little knowledge on the awarding of approved or disapproved credit decisions, and failures still occur when authorizing the granting of credit in communication via the system. through the Banking Smart System application. Apart from that, in the control environment element, there is still a dual task and authority because the existing organizational structure is not yet clear and control activities include policies and procedures and there is no separation of credit giving functions between legal & credit analysis and monitoring & remedial. In this case, the credit provider is also responsible for monitoring the debtor's financial performance during the credit loan which results in arrears in payments, giving rise to bad credit or problematic credit.*

**Keywords:** *internal control system, credit provision*

### **PENDAHULUAN**

Khususnya di bidang ekonomi, perbankan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, bank terdiri dari bank umum dan bank BPR, akronim dari Bank Perkreditan Rakyat, yang fungsinya hanya menghimpun dana dan memberikan kredit kepada masyarakat. Namun, setelah UU. RI No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) mulai berlaku pada 12 Januari 2023, istilah "Bank Perkreditan Rakyat" atau BPR telah diganti menjadi "Bank Perekonomian Rakyat". Sri Mulyani mengatakan bahwa perubahan nama dilakukan untuk menghidupkan kembali peran BPR sebagai penggerak ekonomi Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah. bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah, termasuk upaya untuk meningkatkan literasi dan intermediasi perbankan melalui percepatan konsolidasi dan pengaturan dampak digitalisasi perbankan.

Menurut UU No. 4 Tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa meskipun BPR memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penyedia kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) karena stigma yang melekat pada BPR selama ini adalah bahwa mereka hanya menangani urusan kredit, meskipun sebenarnya BPR juga menyediakan layanan perbankan lainnya seperti tabungan dan deposito. Digitalisasi layanan, inklusi keuangan, dan pendidikan masyarakat semuanya dapat berfungsi. Dengan mengubah nama, fungsi BPR menjadi lebih kuat dengan memperluas bidang usaha ke transfer dana yang tetap diawasi oleh OJK dan penukaran valuta asing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran BPR dalam mendukung bisnis UMKM, yang pada gilirannya dapat membantu perekonomian Indonesia. Istilah BPR berubah menjadi perekonomian, membuka lebih banyak ruang kerja, terutama untuk sistem pengendalian internal. Agar tujuan perusahaan dapat dicapai, sistem pengendalian internal sangat penting. Selain menjaga keamanan aktiva, sistem pengendalian internal mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Tanpa sistem ini, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai (Tuanakotta, 2014:127). Komisi Sponsor Organisasi Komite Treadway (COSO) adalah model Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang sering dipergunakan oleh auditor sebagai pondasi untuk mengevaluasi dan mengembangkan SPI.

SPI membantu menjaga aset aman, memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan, mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan perusahaan, dan meningkatkan efisiensi operasional (Tuanakotta, 2014:127). Komisi Sponsor Organisasi Komite Treadway (COSO) adalah model sistem pengendalian internal yang sering digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi dan membangun sistem pengendalian internal.

Bank atau lembaga keuangan akan meminjamkan kredit jika mereka benar-benar yakin bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati oleh kedua pihak. Bisa ada konsekuensi di kemudian hari, seperti penunggakan pembayaran, jika debitur tidak mematuhi peraturan tersebut. Banyak faktor memengaruhi timbulnya tunggakan kredit, tetapi penelitian ini hanya membahas faktor sistem pengendalian internal. Dalam sistem ini, analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah debitur atau calon debitur layak untuk mendapatkan kredit.

Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian—hati-hati dalam pemberian kredit yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik—dibutuhkan. Akibatnya, peneliti tertarik untuk mempelajari situasi dan kondisi yang berkaitan dengan fenomena sistem pengendalian internal, yang sangat penting untuk pemberian kredit. Didasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin

melakukan penelitian pemberian kredit dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR KRISNA YUNA DANA”**

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pada 12 Januari 2023, UU.RI No. 4 Tahun 2023 tentang (RUU P2SK) menghidupkan kembali peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penggerak ekonomi Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah, adalah alasan mengapa namanya diubah. Ruang kerja BPR menjadi lebih luas karena istilah diubah menjadi "perekonomian". Selama ini, BPR dikenal hanya melayani urusan kredit, tetapi sebenarnya mereka juga menyediakan layanan perbankan seperti tabungan dan deposito. Digitalisasi layanan, inklusi keuangan, dan edukasi masyarakat semuanya dapat berfungsi.

Bagian Kedua, Pasal 1 RUU P2SK mendefinisikan Bank Perekonomian Rakyat sebagai bank yang melakukan bisnis secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Dengan perubahan nama, fungsi BPR semakin kuat karena bidang usahanya diperluas ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan peran BPR semakin besar dalam mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

SPI terdiri dari struktur organisasi, metode, dan dimensi, seperti yang dinyatakan oleh Mulyadi (2016:163). Semua elemen ini digabungkan untuk memastikan bahwa organisasi tetap kaya, memeriksa data akuntansi dengan hati-hati, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pelaksanaan kebijakan manajemen. Definisi ini menekankan tujuan daripada komponen—komponen yang membentuk sistem tersebut. Jason Scott (2014:226) mengatakan SPI yakni proses yang dilaksanakan untuk memastikan suatu tujuan pengendalian telah dicapai. Namun, menurut Komite Sponsoring Organisasi Komite Treadway (COSO) (1992), SPI yakni suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan staf lainnya. Dibangun untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (3) kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut COSO, sistem pengendalian internal terdiri dari dua unsur: (1) Lingkungan pengendalian, yang merupakan set aturan, prosedur, dan struktur yang membentuk dasar sistem pengendalian internal di seluruh organisasi, dan (2) Penaksiran risiko, yang merupakan proses

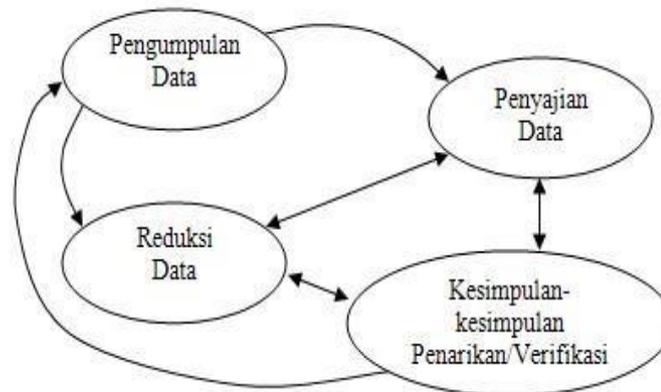
dan tujuan yang terus berubah yang menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Dalam hal ini, analisis, tindakan, dan evaluasi digunakan untuk menilai risiko perusahaan. Mengidentifikasi perubahan internal dan eksternal serta tindakan yang diperlukan adalah tahapan yang paling penting dari penilaian risiko. Untuk memastikan bahwa arahan organisasi tidak mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan dan prosedur mengatur tindakan yang dikenal sebagai pengendalian. Tahapan keempat adalah informasi dan komunikasi, yang mencakup informasi yang diperlukan entitas untuk memenuhi tanggung jawab sistem. Seluruh sistem pengendalian internal, yang mencakup pembentukan kebijakan, analisis risiko, dan pengawasan yang dilakukan, akan sangat sulit untuk dijalankan jika tidak ada informasi dan komunikasi ini. (5) Pemantauan adalah upaya untuk memastikan bahwa masing-masing dari lima bagian sistem pengendalian internal ada dan beroperasi dengan benar.. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh sistem mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan model atau metode yang disebut desain penelitian untuk mengarahkan penelitian mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka (Cresswell, 2016). Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Krisna Yuna Dana" membahas tentang lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Indikator juga dimasukkan dan dijelaskan tentang hasil dan diskusi.

Untuk analisis deskriptif, data dikumpulkan melalui pertanyaan lisan kepada bagian-bagian yang terlibat dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit, yaitu pimpinan, staf untuk pengendalian internal, bagian legal & analisis kredit, bagian marketing lending, dan bagian admin. Objek pada penelitian ini yaitu PT. BPR Krisna Yuna Dana yang merupakan salah satu Bank Perekonomian Rakyat yang berlokasi di Batubulan.

Peneliti memakai metode observasi, wawancara dokumentasi, dan studi pustaka untuk mengumpulkan data untuk analisis ini. Untuk menemukan solusi untuk rumusan masalah, peneliti menggunakan berbagai teknik analisis data, diantaranya yaitu :



Dua metode analisis data digunakan dalam penelitian ini. (1) Wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka adalah metode pengumpulan data; dan (2) Teknik reduksi data didasarkan pada tujuan yang telah dicapai sebelumnya. Selain itu, reduksi data adalah proses yang membutuhkan banyak pemikiran dan wawasan. Dalam hal ini, bisa melalui observasi untuk mendapatkan data awal dan mempersiapkan draft wawancara terkait topik penelitian, (3) Teknik penyajian data : Dalam penelitian kualitatif, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data. Dengan menyajikan data ini, data disusun dan diorganisasikan sehingga lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti akan mengklasifikasikan/menggolongkan data wawancara kemudian menguraikan hasilnya secara menyeluruh. (4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Hasil penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Hasil penelitian dapat berupa gambaran atau deskripsi dari hal-hal yang sebelumnya tidak jelas yang menjadi jelas setelah penelitian. Misalkan Anda membandingkan hasil data dengan bagian dan teori yang didasarkan pada prinsipnya. Teknik triangulasi data mencakup tiga komponen: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Mereka digunakan untuk mengukur metode uji keabsahan data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beberapa aspek lingkungan pengendalian diteliti dalam penelitian ini. Yakni :

1) Dari integritas dan nilai etika, Dalam hal ini, PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah memiliki kebijakan yang tertulis di dalamnya kebijakan tertulis dan lisan tentang etika dalam sistem pemberian kredit yang yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKPB). Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan integritas dan nilai etika dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 2) Dari komitmen terhadap kompetensi, PT. BPR Krisna Yuna Dana merekrut karyawan—pekerja yang memiliki bakat dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mereka ditempatkan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan

keterampilan mereka. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan komitmen terhadap kompetensi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

3) Dari dewan komisaris dan komite audit, Komite audit yang merupakan bagian pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yaitu dalam hal ini Direksi yang berperan dalam mengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan dewan komisaris dan komite audit dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 4) Pimpinan bank telah memberikan contoh yang baik dari filosofi manajemen dan gaya operasi dalam kebijakan manajemen dengan menunjukkan sikap tanggung jawab, memberikan arahan, dan selalu memotivasi karyawan untuk bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya., misalkan pada saat jam kerja, setiap pagi hari sebelum memulai aktivitas pekerjaan, Pimpinan Bank berkumpul dengan karyawan untuk mengadakan doa bersama dan membaca visi dan misi dari PT. BPR Krisna Yuna Dana beserta memberikan arahan, dorongan, dan semangat terhadap kinerja karyawan kedepannya. Selain itu juga, Pimpinan Bank selalu mengadakan kegiatan rutin rapat / meeting bulanan yaitu pada pertengahan bulan pada tanggal 15 (menyesuaikan situasi dan kondisi jika tidak ada halangan) dan pada saat semua pekerjaan karyawan sudah selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan filosofi manajemen dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

5) Dari struktur organisasi, masih terdapat perangkapan tugas dan wewenang yang terjadi karena struktur organisasi yang ada belum jelas, misalkan pada bagian legal & analisis kredit dalam tugas dan wewenang masih jadi satu antara fungsi legal dan fungsi analisis kredit. Selain itu juga, pada bagian monitoring & remedial juga dalam tugas dan wewenang masih jadi satu antara fungsi monitoring dan fungsi remedial. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak sesuai dengan penerapan struktur organisasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 6) Dari kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya, untuk mendukung operasional layanan perusahaan dan pengembangan sumber daya manusia, PT. BPR Krisna Yuna Dana telah melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan baik secara online maupun offline yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pajak, maupun lembaga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

Tujuan perusahaan secara keseluruhan, tujuan di setiap tingkat proses, identifikasi dan analisis risiko, dan pengelolaan perubahan adalah beberapa aspek penaksiran risiko dalam penelitian ini.

1) Dari tujuan perusahaan secara keseluruhan, Pimpinan Bank selalu melakukan estimasi penilaian risiko terhadap setiap kebijakan yang akan diambil. Dalam hal ini, BPR memiliki 4 eksposur risiko yang paling dominan dialami sesuai dengan ketentuan dari OJK, yakni : (1) Risiko Kredit, (2) Risiko Operasional, (3) Risiko Likuiditas dan (4) Risiko Kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan tujuan perusahaan secara keseluruhan dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 2) Dari tujuan di setiap tingkat proses, Pimpinan Bank selalu mengedepankan prinsip kehati – hatian dan prinsip tata kelola dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Agar setiap keputusan yang diambil memiliki potensi risiko yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan tujuan di setiap tingkat proses dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

3) Dari identifikasi risiko dan analisisnya, dalam hal ini PT. BPR Krisna Yuna Dana selalu melakukan evaluasi, identifikasi dan penilaian terhadap seluruh risiko yang ada dan kemungkinan muncul. Dalam hal ini, PT. BPR Krisna Yuna Dana telah memiliki Divisi Khusus yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko Bank yakni PE Kepatuhan / SPI. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan identifikasi dan analisis risikonya dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 4) PT. BPR Krisna Yuna Dana akan mengelola perubahan dengan meninjau keadaan dan kondisi saat ini jika terjadi masalah. Misalnya, mereka akan mengubah struktur organisasi jika diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan mengelola perubahan dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

Dalam penelitian ini, aktivitas pengendalian mengamati beberapa hal, yakni :

1) Dari kebijakan dan prosedur, adanya kebijakan dalam setiap proses, mulai dari proses permohonan kredit, proses SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), proses wawancara & survey ke lapangan (on the spot), proses komite kredit, proses pengikatan kredit dan proses pencairan kredit sesuai dengan ketentuan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan prosedur mengenai penanganan saat terjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Selain itu juga, terkait kebijakan pemisahan fungsi beserta tugas dan wewenang yang merupakan suatu prinsip dan praktik yang digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada satu individu pun yang memiliki kontrol penuh atas suatu proses bisnis atau

aktivitas yang bisa menghasilkan kecurangan atau pelanggaran. Dalam hal ini, tentu masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam SOP. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak sesuai dengan penerapan kebijakan dan prosedur dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

2) Dari keamanan aplikasi dan jaringan, PT. BPR Krisna Yuna Dana sesuai dengan Penerapan Standar Teknologi Informasi yaitu POJK No. 75/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2017 atau SOP Pedoman Kebijakan IT dan Rencana Bisnis Berkelanjutan di bidang IT tanggal 07 Desember 2017. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan keamanan dalam hal aplikasi jaringan dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 3) Aplikasi Smart Banking System digunakan dalam manajemen perubahan aplikasi untuk memberikan fasilitas kredit kepada pelanggan untuk memastikan bahwa berkas-berkas yang diajukan sesuai untuk memenuhi fasilitas kredit. Karena itu, PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan manajemen perubahan dan aplikasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 4) Dari kelangsungan bisnis, dari bagian IT melakukan strategi khusus mengenai penyimpanan cadangan dokumen, misalkan jika tiba – tiba terkendala atau komputer rusak, maka semua data yang ada di komputer sudah di backup di harddisk agar tidak hilang. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan kelangsungan bisnis dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

Dalam penelitian ini, informasi dan komunikasi mengamati beberapa hal, yaitu kualitas informasi dan efektivitas komunikasi.

1) Dari kualitas informasi, dalam hal penyampaian informasi, misalkan dalam hal komite kredit dalam hal pemberian keputusan kredit jika hasilnya tidak disetujui, maka dari pihak marketing lending akan menyampaikan ke nasabah dan jika disetujui maka dari pihak marketing lending akan memberikan informasi kepada nasabah untuk dibuatkan PK (Perjanjian Kredit). Namun dalam hal ini, masih kurangnya dalam penyampaian informasi terkait pemberian keputusan kredit disetujui atau tidak disetujui bahkan tidak ada respon / tanggapan dan jawaban sama sekali dari Pimpinan Bank. Hal ini tentu sangat menyimpang dari ketentuan SOP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak sesuai dengan penerapan kualitas informasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

2) Dari efektivitas komunikasi, dimana Pimpinan Bank memberikan pemahaman yang jelas tentang peranan dan tanggung jawab masing-masing karyawan sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif atau nyaman dalam hal berkomunikasi sesama karyawan / rekan kerja bisa melalui WA grup untuk memastikan keadaan situasi secara efektif dan efisien misalkan pada

karyawan yang bekerja di luar kantor, jika komunikasi lewat sistem misalkan pada karyawan yang bekerja dalam kantor, menggunakan aplikasi Banking Smart System dalam menginput data kredit tersebut sudah diapprove atau tidak di approve dilihat dari otorisasi dalam pemberian kredit, maka selanjutnya dari pihak karyawan akan berkomunikasi lewat telepon kantor kepada Pimpinan Bank untuk memberikan persetujuan terkait otorisasi dalam pemberian kredit tersebut. Namun dalam hal ini, masih saja terdapat kredit di sistem yang tidak diotorisasi oleh Pimpinan Bank sehingga menimbulkan kegagalan dalam otorisasi pemberian kredit. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko kredit yang tidak terkendali dan potensi pembengkakan portofolio kredit macet atau kredit bermasalah. Tentu ini yang menjadi pemicu terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah. Hal ini tidak sesuai dengan aturan SOP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah tidak sesuai dengan penerapan efektivitas komunikasi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

1) Pemimpin bank selalu mengawasi dan mengontrol semua tindakan pekerja.. Pemantauan kinerja karyawan yang berada di dalam kantor melalui perangkat CCTV. Pemantauan dari segi struktur yang berperan pada aktivitas karyawan dalam pemberian kredit yang terdiri dari PE Kepatuhan / SPI, Legal & Analis Kredit, Admin, Marketing Lending, dan Monitoring & Remedial. Akan tetapi, Karena aktivitas yang dilakukan sebagian besar di luar kantor, bagian marketing lending menerima pemantauan yang lebih ketat. Bagian ini harus memberikan laporan melalui grup WA yang dirancang khusus oleh Pimpinan Bank berupa foto yang dikirim melalui WA grup untuk mengetahui sejauhmana kinerja karyawan tersebut.

2) Dari evaluasi yang terpisah, setiap bulan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk semua divisi dan jika dinilai terdapat penyimpangan, kelemahan atau pelanggaran dalam pengendalian internal perkreditan, maka Pimpinan Bank akan melakukan tindakan koreksi dan dilakukan evaluasi secara berkala terkait efektifitas sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan evaluasi yang terpisah dalam unsur sistem pengendalian internal COSO. 3) Dalam melaporkan kekurangan – kekurangan yang terjadi, jika terdapat kekurangan, kelemahan atau pelanggaran dalam hal aktifitas pemberian kredit maka bagian kredit akan selalu berkomunikasi dengan Pimpinan Bank, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya beragam eksposur risiko dikemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPR Krisna Yuna Dana sudah sesuai dengan penerapan melaporkan kekurangan – kekurangan yang terjadi dalam unsur sistem pengendalian internal COSO.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Didasarkan analisis dan pembahasan penelitian yang dilaksanakann terkait penerapan sistem pengendalian internal yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan yaitu pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Krisna Yuna Dana telah menerapkan unsur sistem pengendalian internal menurut Teori COSO dalam pemberian kredit yang sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi dari lima unsur sistem pengendalian internal tersebut, masih ada yang perlu dievaluasi / diperbaiki yaitu pada unsur yang tidak sesuai yaitu pada informasi dan komunikasi masih kurangnya dalam penyampaian informasi terkait pemberian keputusan kredit disetujui atau tidak disetujui bahkan tidak ada respon / tanggapan dan jawaban sama sekali dari Pimpinan Bank dan juga masih terjadi kegagalan pada saat pemberian otorisasi dalam pemberian kredit dalam komunikasi lewat sistem melalui aplikasi Banking Smart System sehingga mengakibatkan banyaknya kredit yang tidak diotorisasi oleh Pimpinan Bank yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko kredit yang tidak terkendali dan potensi pembengkakan portofolio kredit macet atau kredit bermasalah. Tentu ini yang menjadi pemicu terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah.

Selain itu juga, pada unsur lingkungan pengendalian yaitu masih terdapat perangkapan tugas dan wewenang karena struktur organisasi yang ada belum jelas dan pada aktivitas pengendalian pada kebijakan dan prosedur dan tidak adanya pemisahan fungsi pemberi kredit antara bagian legal & analis kredit dan monitoring & remedial. Dalam hal ini, peranan tugas pemberi kredit adalah untuk menetapkan syarat – syarat kredit mengurangi risiko dan mengevaluasi risiko agar tetap terkendali dan analisis kelayakan terhadap calon debitur dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Pemberi kredit juga bertanggung jawab untuk memantau kinerja keuangan debitur selama peminjaman kredit berlangsung yang mengakibatkan tunggakan pembayaran sehingga menimbulkan terjadinya masalah kredit.

Berdasarkan analisis SPI pemberian kredit yang dilaksanakn ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan dan peneliti yang akan melakukan penelitian tentang subjek ini:

Untuk menghindari perangkapan tugas dan wewenang, perusahaan harus melakukan evaluasi terkait penambahan atau pembentukan karyawan baru. Ini karena fungsi dan tugas yang tidak sesuai dipisahkan dari tugas dan wewenang. Perusahaan juga dapat meminta pimpinan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan baru.

Selanjutnya dihimbau untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian untuk menemukan waktu yang tepat bagi peneliti untuk mencari / menemukan data dan tidak mengganggu pimpinan dan karyawan pada saat bekerja, dalam hal ini keterbatasan dalam hal

mencari pimpinan yang susah dicari, bisa melalui perwakilan dan mencari alternatif yang lain untuk ditambah dari hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliandu, B., Londa, Y., Marselina, A., & Akuntansi, P. S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat-Bina Usaha Dana Di Larantuka. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 1–7.
- Ayudia, R., Aswansyah, D., Ekonomi, F., Itb, B., & Jakarta, S. (n.d.). *REMITTANCE ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI DI BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU TEBET JAKARTA SELATAN*.
- F. F. D. Pasalbessy, V. (2021). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Phidectama Biak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 55–72. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.72>
- Kamaluddin, N., & Haryati, M. A. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit BUMDes Bangun Bersama. *Monex*, 9(1), 109–118. <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1772%0Ahttp://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/viewFile/1772/1101>
- Kartikasari, J. D., Nikmatuniayah, N., & Asrori, M. (2021). Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Ksp Lohjinawe Cabang Pembantu Kundurankantor Cabang Blora. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v4i1.2791>
- Ngurawan, Y. I., Morasa, J., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1579–1590.
- Pasaribu, A. R., Purba, D. H., & Sitorus, P. J. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Investasi Pada Bank Mandiri Pusat Pasar Medan. *Jurnal Skripsi Akuntansi*, 1(1), 17-26.
- Rangian, M. M., Nangoi, G. B., & Wokas, H. R. . (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Di PT Bukopin Finance Graha Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 415. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32197/30555>
- Wijoyo, H. (2020). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 157–162.









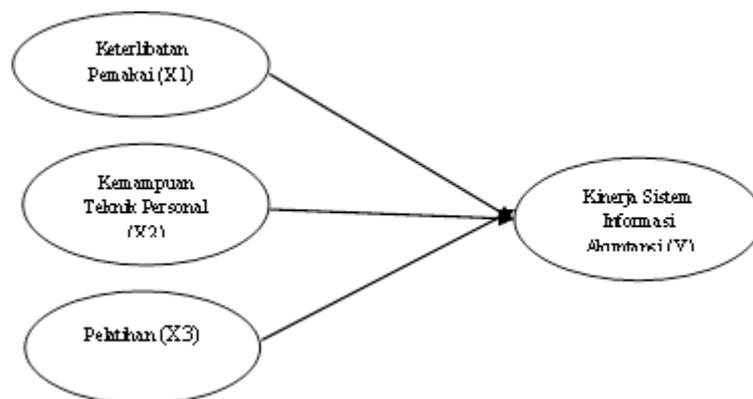


staf untuk meningkatkan kemahiran mereka dengan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi. Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi meningkat secara proporsional dengan intensitas pelatihan yang diberikan kepada mereka yang memanfaatkannya. Hasil penelitian (Krisna Dewi & Wiratmaja, 2020) dan (Pradnyana & Dharmadiaksa, 2018) mengklaim bahwa efektivitas Pelatihan dapat membantu membuat sistem informasi akuntansi menjadi lebih baik. Pembeneran ini memungkinkan kita untuk menyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Efisiensi sistem informasi akuntansi mendapat manfaat dari pelatihan.**

**METODE PENELITIAN**

Proses penelitian dapat dibantu dengan mengikuti rencana studi yang telah ditentukan. Tujuan dari desain penelitian adalah untuk memberikan peneliti kerangka kerja logis untuk melakukan studi mereka. Metode kuantitatif digunakan dalam metode ini. Jadi, metodologinya terlihat seperti ini:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Populasi adalah kelompok yang diperiksa dari mana kesimpulan dibentuk tentang kelompok secara keseluruhan berdasarkan fitur dan atribut yang dipilih oleh peneliti (Sugiyono, 2020). Sepuluh BUMDesa di Kabupaten Sukawati diikutsertakan dalam penelitian, dan total 36 pengguna SIA (direktur, bendahara, dan karyawan) memberikan tanggapan.

Sampel menurut (Sugiyono, 2020), Ciri-ciri yang ditemukan dalam sampel merupakan subset dari ciri-ciri yang ditemukan dalam populasi secara keseluruhan. Ini menekankan perlunya memastikan bahwa sampel benar-benar mewakili populasi dari mana ia diambil. Penelitian ini menggunakan sampel yang sepenuhnya representatif. Semua anggota populasi termasuk dalam sampel saat menggunakan metode sampling jenuh. Ada 36 peserta dalam sampel.

Pendekatan analitik berikut digunakan untuk penyelidikan ini: Dengan memeriksa nilai



























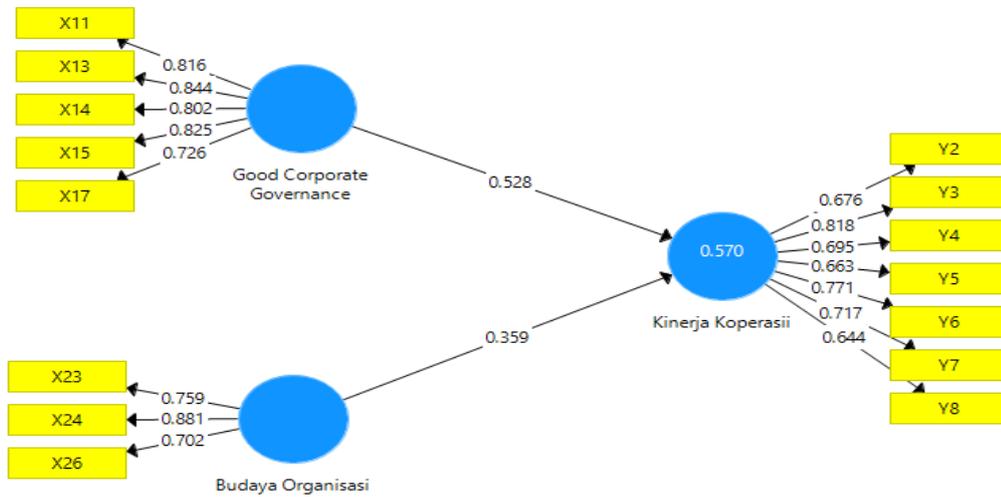


**Tabel 4.2 Nilai *Outer Loading* Hasil Estimasi Setelah Eksekusi**

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
Good Corporate Governance (X1)	X1.1	0,816
	X1.3	0,844
	X1.4	0,802
	X1.5	0,825
	X1.7	0,726
Budaya Organisasi (X2)	X2.3	0,759
	X2.4	0,881
	X2.6	0,702
Kinerja Koperasi (Y)	Y1.2	0,676
	Y1.3	0,818
	Y1.4	0,695
	Y1.5	0,663
	Y1.6	0,771
	Y1.7	0,717
	Y1.8	0,644

Sumber: Data diolah, 2023

**Gambar 4.2. Model struktural sesudah eksekusi**



Sumber: Data diolah, 2023

Berlandaskan perhitungan dan hasil yang disajikan melalui Tabel 4.2, angka outer loading di atas 0,60 menampilkan bahwasanya semua indikator terpenuhi syarat *convergent validity*.

**Tabel 4.3 Uji *Discriminant Validity***

Variabel	AVE	√AVE	GCG	Budaya Org
GCG	0,646	0,804		
Budaya Organisasi	0,615	0,784	0,428	
Kinerja Koperasi	0,510	0,714	0,682	0,585

Sumber : Data diolah, 2023













































































## **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu**

**Ni Ketut Erlina Yanti <sup>(1)</sup>**

**I Made Endra Lesmana Putra <sup>(2)</sup>**

**Ni Putu Trisna Windika Pratiwi <sup>(3)</sup>**

<sup>(1)(2) (3)</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238  
e-mail: [yantierlina66@gmail.com](mailto:yantierlina66@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Management of revenue from the Gunung Kawi Tourism Object in Sebatu Village, the transparency process is not good. The revenue management of the Gunung Kawi Sebatu tourist attraction has government involvement in revenue management which is good. Participatory management of the income of the Gunung Kawi Tourism Object in Sebatu Village has been carried out, namely there is community involvement in the receipt and utilization of income. Transparency in managing the income of the Gunung Kawi Tourism Object in Sebatu Village is good. management of the Gunung Kawi Tourism Object, Sebatu Village, availability and accessibility of documents, there are already documents used in the revenue management mechanism for the Gunung Kawi Tourism Object, Sebatu Village. Making reports and conveying them to the community in the Sebatu Traditional Village is not good. In this case, the report is presents verbally during a traditional village meeting. The openness of the process and regulatory framework that guarantees transparency is good, namely related to the openness of revenue management at the Gunung Kawi Tourism Object in Sebatu Village.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, and Revenue Management.*

### **PENDAHULUAN**

Banyak yang terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengenai organisasi sektor publik. Pemahaman yang beredar, berpandangan bahwa organisasi sektor publik berarti organisasi nonprofit yang sama sekali tidak berfokus pada pencarian keuntungan (laba). Padahal faktanya, organisasi sektor publik bukan sekadar organisasi pemerintahan, nonprofit, atau sosial saja, melainkan juga dapat berfokus pada pendapatan laba, yakni organisasi sektor publik tipe *quasi non-profit*.

Organisasi dengan tipe *quasi non-profit* dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan laba tersebut, sehingga laba yang diperoleh dapat berkontribusi ke pendapatan daerah atau negara. Selain itu, laba yang diperoleh organisasi juga menjadi modal keberlangsungan organisasi untuk jangka panjang supaya eksistensi dan operasionalnya tetap mampu berjalan. Sebagai organisasi pencari laba pada umumnya, organisasi sektor publik tipe *quasi non-profit* tetap memiliki tanggung jawab kepada para

investor (sumber pendanaan) organisasi. Biasanya, para investor organisasi ini dapat berupa pemerintah, swasta, atau kreditor. Adapun hubungan antara pelaku ekonomi ini, yakni organisasi dan investor, berjalan sesuai dengan *agency theory* (teori keagenan).

Menurut teori keagenan, hubungan dua pelaku ekonomi dengan perbedaan kepentingan disebut sebagai agen dan prinsipal (Sengaji, 2018). Kedudukan prinsipal dijelaskan sebagai pihak yang memberikan perintah ke orang lain (agen) supaya menjalankan aktivitas jasa atas nama prinsipal, dengan kewenangan berada di pihak agen untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk prinsipal (Octalianna & Rahayuningsih, 2013). Perintah yang diberikan prinsipal akan didukung dan dilaksanakan oleh agen apabila kedua pihak, baik prinsipal maupun agen, memiliki tujuan yang sama.

Namun, hubungan keagenan di antara keduanya bisa saja menimbulkan masalah apabila terjadi konflik atau perbedaan kepentingan di antara keduanya. Pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dengan fungsi pengendalian (*control*) kerap kali menjadi alasan permasalahan tersebut (Sukmawati, Pujiningsih, & Laily, 2016). Salah satu upaya untuk membatasi munculnya konflik dalam hubungan keagenan adalah dengan menentukan kontrak yang efisien. Namun, upaya ini juga belum efektif untuk menjadi solusi, sehingga munculah konsep *corporate governance* (Ahmad & Septriani, 2008).

Objek pada penelitian ini adalah Kelompok Pengelola Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yang berlokasi di Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Sebagai organisasi sektor publik, Pengelola Objek Wisata dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar tentu diharapkan telah mempraktikkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Alasan peneliti melakukan penelitian di Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yaitu adanya fenomena trend peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu.

Observasi yang telah dilakukan terlihat bahwa pada tahun 2020 dengan 2021 pendapatan pada Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu mengalami penurunan karena adanya wabah penyakit Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu mengalami peningkatan yang drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu memiliki daya tarik yang kuat sehingga dikunjungi banyak wisatawan.

Di samping alasan di atas, alasan lain dalam memilih Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu sebagai adalah karena terdapat ketimpangan antara teori dengan praktik di lapangan. Yaitu, pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Gianyar tidak memberikan laporan pengeluaran pendapatan kepada pemberi amanah (prinsipal), yaitu Pemerintah Desa Sebatu. Pihak pengelola hanya melakukan pembagian hasil yang diperoleh dari pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yaitu untuk Dinas Pariwisata sebesar 60% dan untuk Desa Adat sebesar 40% dari pendapatan. Hal tersebut menyalahi teori yang dikemukakan oleh Hehanussa (2015), bahwa pengelola (agen) wajib mempertanggungjawabkan, memberikan laporan, dan kegiatan kepada pemberi amanah (prinsipal). Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang berkedudukan sebagai agen, seharusnya mampu mengimplementasikan nilai akuntabilitas dan transparansi yang ditunjukkan kepada masyarakat desa sebagai prinsipal, apalagi dana yang dikelola juga berjumlah besar.

Pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yaitu dari penjualan tiket. Pendapatan dari penjualan tiket tersebut perharinya akan dibuatkan laporan lalu disetor ke dinas dalam bentuk kwitansi laporan. Lalu pendapatan dari Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu dikumpulkan perbulannya, dari pendapatan perbulannya itu akan dibagi ke desa adat Sebatu. Dari pendapatan tersebut desa adat sebatu mengajukan surat pengajuan ke dinas untuk mencairkan dana 40% yang akan dicairkan per tiga bulan ke rekening desa adat dan diberikannya laporan pendapatan tamu pengunjung Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu. Dari laporan yang diberikan oleh dinas akan di balance kan ke laporan Objek Wisata Gunung Kawi sebatu langsung. Dari pendapatan yang 40% itu akan di sampaikan ke masyarakat desa adat melalui pesangkepan secara lisan yang akan dilaksanakan per tiga bulan sekali dalam pesangkepan itu hanya total jumlah pendapatannya saja yang disampaikan ke masyarakat dan tidak ada laporan perinciannya. Berdasarkan penemuan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu.

Selain itu, ditemukan juga kasus serupa terjadi pada kelompok pengelola (agen) terhadap pihak pemerintah desa (prinsipal) di mana agen tidak memberikan laporan rincian pendapatan kepada prinsipal sehingga fenomena ini dapat menjadi informasi tambahan untuk mengatakan bahwa nilai akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola Objek Wisata Gunung Kawi belum dipraktikkan dengan baik. Padahal, penerapan nilai akuntabilitas publik merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para agen guna mempertanggungjawabkan segala tanggungjawabnya kepada para prinsipal, sebagaimana prinsipal juga memiliki berhak dan berwenang menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Urgensi penelitian ini juga didukung dengan minimnya penelitian yang mengangkat topik akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pada objek wisata.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*). Teori ini mengemukakan kesepakatan antara hubungan antara *agent* dan *principal*. Dalam konteks pemerintahan, teori ini diaplikasikan dengan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk memenuhi segala ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, wajib bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan demi kepentingan masyarakatnya. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa laporan yang berhak diketahui dan dinilai oleh masyarakatnya sendiri.

Akuntabilitas adalah sebuah keharusan untuk memberi laporan pertanggungjawaban dari kinerja atau kegiatan kepada pihak yang berhak memintanya (Kuswati, 2020). Pertanggungjawaban tersebut dilakukan untuk menjelaskan tindakan yang telah dijalankan oleh pelopor, kepala kantor, atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak menerimanya (Ardiyanti, 2019).

Adapun transparansi, menjadi hal dasar yang fundamental bagi para pengelola dana desa dalam menjalankan kegiatannya, sehingga nilai ini harus diterapkan pada tiap prosesnya, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dana (Hadi, 2019). Sebagaimana ditegaskan pada produk hukum Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa transparansi diartikan juga sebagai prinsip keterbukaan, yang menjamin laporan keuangan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan tepat. Hal ini agar amanah yang diberikan masyarakat untuk mengelola sumber daya dapat diketahui secara transparan dan dipahami bersama.

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menganalisis analisis akuntabilitas, transparansi, pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

























**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.855	3.457			
	X1	.182	.072	.263	.858	1.166
	X2	.756	.169	.469	.858	1.166

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Menurut (Ghozali, 2018), toleransi data > 0,10 dan VIF < 10 dapat digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Hasil pengujian memenuhi syarat lolos uji multikolinearitas, yang dalam penelitian ini sudah terpenuhi.

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.861	1.817		.474	.637
	X1	-.038	.038	-.134	-1.016	.314
	X2	.071	.089	.105	.801	.426

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Data diolah, 2023

Uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018), digunakan untuk menentukan dan membandingkan varians dan residual dari pengujian data tidak sama digunakan dalam sebuah model persamaan regresi dengan menggunakan kriteria nilai.

Hasil pengujian selanjutnya yaitu regresi linier berganda sebagai berikut.

**Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.855	3.457		4.297	.000
	X1	.182	.072	.263	2.523	.014
	X2	.756	.169	.469	4.487	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2023

Persamaan yang dapat diperoleh dari hasil pengujian tersebut yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 14,855 + 0,182X_1 + 0,756X_2$$

Tabel 3. Menunjukkan nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini.

**Tabel 3. Hasil Analisis Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.618 <sup>a</sup>	.382	.364	1.97456

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah, 2023

Jumlah total pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 36,4%, dengan 63,6% tambahan dipengaruhi oleh komponen tambahan diluar bahasan penelitian.

Pengujian secara simultan menggunakan uji F dibawah ini.

**Tabel 4. Uji Simultan (F-test)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159.223	2	79.611	20.419	.000 <sup>a</sup>
	Residual	257.328	66	3.899		
	Total	416.551	68			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah, 2023

Sebagai hasil dari pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 3, nilai F hitung sebesar 20,419 dengan sig. 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan karena variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersamaan.

## Pembahasan

Menurut hasil uji t-test tentang pengaruh kompetensi SDM terhadap laporan keuangan yang berkualitas, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,182, nilai t hitung 2,523, dan nilai signifikan sebesar 0,014 < 0,05. Menurut Khoirina (2018), kompetensi SDM adalah infikator sebagai penentu dan memengaruhi kinerja karyawan di setiap perusahaan. SDM pada dasarnya adalah orang yang bekerja untuk sebuah perusahaan untuk membantu mencapai tujuan mereka, berpikir, dan merencanakan (Juni, 2020). Kompetensi yang dimiliki pegawai menurut (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022) adalah hal yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan, dimana pegawai sebagai sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya/operasional perusahaan atau organisasi, lembaga yang memiliki manusia yang kompeten diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan dengan lebih cepat (Nyoman & Sujana, 2021). Pengaruh kompetensi SDM dilakukan oleh (Ishak & Syam, 2018) dan memberikan bukti bahwa kompetensi dapat memberikan dampak positif terhadap laporan keuangan yang berkualitas.











## KAJIAN PUSTAKA

### Koperasi

Menurut (Sumarsono, 2003), koperasi dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan dengan badan hukum yang diterbitkan oleh dinas koperasi dengan anggota para individu yang bersatu dalam prinsip gotong royong sebagai landasan operasionalnya, yang secara sekaligus dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Anggota koperasi bebas dipilih oleh koperasi itu sendiri, bebas keluar masuk anggota, mampu bekerjasama sebagai keluarga dalam menjalankan usaha koperasi yang nantinya hasil laba perusahaan digunakan untuk mensejahterakan pada anggota yang ada di dalamnya (Pemerintah Republik Indonesia, 1992).

### Penilaian Kesehatan Koperasi

Hasil penilaian kuantitatif atas berbagai elemen yang mempengaruhi koperasi, termasuk likuiditas, profit, dan *capital* (permodalan), disebut evaluasi kesehatan koperasi (Soedarsa & Natalia, 2016). Dari elemen-elemen tersebut di atas, masing-masing diberi nilai berdasarkan seberapa besar pengaruh mereka terhadap kesehatan koperasi. Kesehatan suatu koperasi diperiksa dan diawasi berdasarkan standar yang sama menggunakan pedoman dari Deputi Bidang Perkoperasian sebagai petunjuk yang dapat diterapkan dalam menentukan tingkat kesehatan koperasi, yang mana nantinya dapat diketahui penggolongan koperasi sehat, cukup, atau tidak sehat.

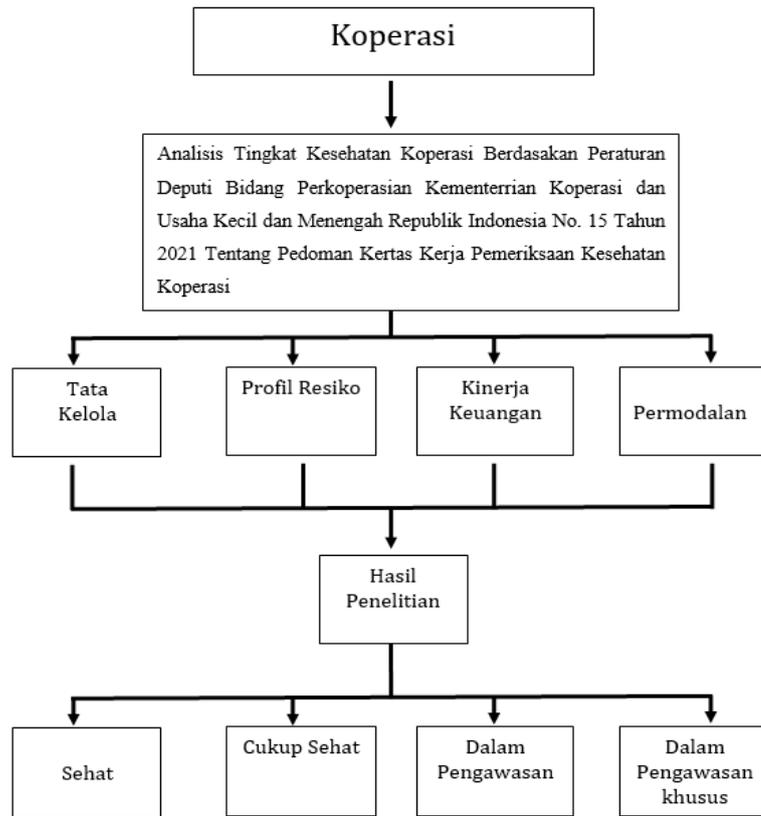
### Tata Kelola

Pengelolaan koperasi pada dasarnya harus meliputi prinsip kelembangaan dan manajemen, serta lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagai koperasi yang layak untuk menyelenggarakan pelayanan bidang keuangan agar tidak merugikan masyarakat luas sebagai nasabahnya. Koperasi diharuskan memiliki kerangka kerja yang jelas dengan pola yang terhubung satu sama lain meliputi peran dan aturan yang mencakup organ-organ dalam koperasi itu sendiri sehingga dapat menuntun jalannya usaha koperasi sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan koperasi tersebut (Budiyono & Maya, 2017).

### Profil Risiko

Profil risiko adalah daftar risiko atau ancaman yang dapat terjadi yang dapat berdampak negatif pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, risiko harus dikelola secara efektif melalui proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, penentuan sikap, penetapan solusi, serta memonitor dan manajemen risiko, atau dikenal sebagai "manajemen risiko" (BPPKPD, 2019). Dalam penelitian ini, profil risiko paling sedikit mencakup penilaian dan manajemen risiko itu sendiri.





**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

Menurut (Sugiyono, 2020) beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengelolaan, manajemen risiko, kinerja keuangan, dan modal dalam meninjau kesehatan koperasi. Koperasi di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem digunakan sebagai tempat penelitian, dengan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan jumlah sampel sebanyak 15 koperasi.

Menurut (Ghozali, 2018) penelitian memerlukan model analisis untuk pengujian awal dengan model-model penyederhanaan data yang dibutuhkan agar data pada pengujian utama dapat menggunakan data yang baik dan valid. Penelitian dilakukan berdasarkan pedoman dari Menteri Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2021 yang digunakan dalam penilaian kesehatan koperasi, serta peraturan tersebut juga berisi mengenai pedoman kepada pengurus dalam memeriksa, mengawasi, dan menganalisis kesehatan koperasi digunakan dalam penelitian ini untuk teknik analisis. Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi, gunakan kertas kerja yang meliputi:































































**Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Kepuasan Penggunaan  
Financial Teknologi (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending Di Denpasar**

**Ni Luh Putu Eka Anatasia<sup>(1)</sup>  
Ni Ketut Muliati<sup>(2)</sup>**

<sup>(1)(2)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238  
e-mail: ekanatasia340@gmail.com

**ABSTRACT**

*Fintech, short for financial technology, is an industry that combines information technology with financial services to provide innovation in financial management and services, changing traditional ways of carrying out transactions, investments, loans and payments. Technical regulations from Bank Indonesia and Financial Services Authority, such as OJK Regulation number 77/POJK.01/2016 and Bank of Indonesia Regulation number 19/12/PBI/2017, regulates fintech to facilitate healthy industry growth while protecting consumers and the stability of financial system. The research goals is to determinate influence of perceived convenience and security on satisfaction with the use of Fintech (financial technology) Peer To Peer (P2P) Lending in Denpasar. The population for research is all (P2P) Lending users in the city of Denpasar in 2022 totaling 164,896. Samples is 100 corespondend and use Slovin formula and tested with multiple linear regresion analysis techniques. Based on research, the conclusion is ease and security of using the P2P Lending application has positive significant influence on user satisfaction. Therefore, it is recommended that P2P Lending application developers continue for pay attention and improve the ease and security of transactions for users. In addition, future research could involve other variables to further enrich understanding of the factors that influence user satisfaction, as well as conduct testing on different applications to gain a broader perspective.*

**Keywords: Perception of Convenience, Security, Satisfaction, Financial Technology**

**PENDAHULUAN**

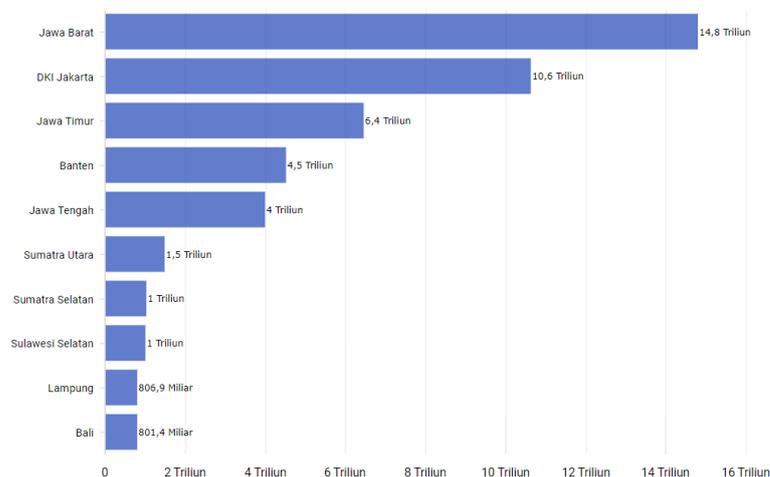
Pertumbuhan layanan perbankan daring terus bertumbuh seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan teknologi dan informasi. Inovasi dari produk dan juga teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sektor perbankan, memungkinkan dengan adanya peningkatan kualitas layanan dengan kecepatan, keunggulan, dan efisiensi yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, salah satunya yang relevan adalah fasilitas pembiayaan teknologi, yang memudahkan pelanggan dalam mengakses pembiayaan yang dibutuhkan melalui teknologi.

Zaman digital saat ini menantang kita untuk melihat peluang di baliknya, karena memberikan keleluasaan dan kegunaan yang lebih dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sektor yang mengalami transformasi besar adalah sektor keuangan, dengan munculnya teknologi finansial atau fintech. Pertumbuhan fintech yang pesat membutuhkan regulasi hukum untuk mengelola industri ini dan melindungi pengguna. Bertumbuhnya service dari financial technology,

terutama dalam hal peer to peer lending atau yang lebih dikenal dengan nama pinjaman secara online, dapat membawa manfaat seperti kemudahan pada saat mendapatkan pinjaman dana dengan instan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai masalah baru. Keluhan tentang tindakan intimidatif, fintech tidak resmi, pelecehan, penyelewengan data private debitur, dan kejahatan lainnya semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada konsumen.

Pemahaman tentang kemudahan bermain peran penting dalam membentuk Kepuasan penggunaan Financial Technology (Fintech) Peer-To-Peer (P2P) Lending. Fasilitas akses dan penggunaan platform P2P lending bisa menjadi dorongan bagi individu untuk mengadopsi teknologi ini. Konsep kemudahan meliputi elemen-elemen seperti antarmuka pengguna yang simpel, proses pendaftaran pinjaman yang lancar, dan ketersediaan informasi yang jelas. Dengan peningkatan kemudahan yang dirasakan, diharapkan penerimaan pengguna terhadap Fintech P2P Lending akan meningkat. Keamanan menjadi aspek krusial dalam Fintech P2P Lending, terutama bagi individu dan pengusaha. Perlindungan data, transparansi transaksi, dan pencegahan kejahatan keuangan daring menjadi kunci untuk membangun kepercayaan. Dengan tingkat keamanan yang tinggi, platform P2P lending dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keyakinan dalam solusi pendanaan ini.

Gambar 1. Data Pinjaman Online Nasiona



Sumber : Databoks, 2023

Pada bulan Agustus 2023, Bali menempati posisi ke-10 dalam jumlah utang pinjaman daring terbesar di Indonesia. Total utang pinjol di Bali mencapai Rp801,44 miliar pada periode tersebut, meliputi pinjaman yang diambil oleh masyarakat Bali melalui platform pinjol. Menurut laporan dari (Detik.com, 2023), Penyaluran pinjaman daring di Bali mencapai Rp258,75 miliar pada November 2022, menjadikannya yang tertinggi ke-4 di luar Pulau Jawa setelah pulau Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pertumbuhan yang signifikan dari



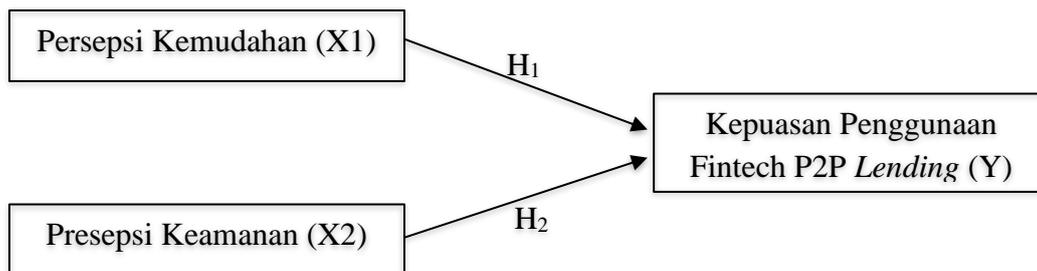


memengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi. Apabila pengguna merasa bahwa platform Fintech P2P Lending memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dan keuangan mereka, mereka akan cenderung memiliki sikap positif terhadap penggunaan teknologi tersebut. Kepercayaan yang terbangun penting bagi pengguna dalam mengadopsi dan menggunakan platform tersebut secara konsisten. Dengan demikian, Persepsi Keamanan berpengaruh terhadap Sikap Terhadap Penggunaan, yang pada gilirannya memengaruhi Kepuasan Penggunaan. Menurut TAM, persepsi terhadap kemudahan dan keamanan penggunaan suatu teknologi akan berdampak pada kepuasan pengguna, dengan kepercayaan pengguna terhadap keamanan platform menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepuasan mereka terhadap pengalaman menggunakan Fintech P2P Lending. Penelitian ini dilakukan (Marhaendra & Mahyuzar, 2023), (Salsabillah Ramadhani, 2021), (Hady et al., 2022) dan (Pranoto & Setianegara, 2020) menyatakan bahwa Presepsi Keamanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Penggunaan *Fintect P2P Lending*..

**H<sub>2</sub>: Pengaruh Presepsi Keamanan berpengaruh terhadap Kepuasan Penggunaan *Fintect P2P Lending***

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah studi kuantitatif yang menguji hipotesis tentang bagaimana Presepsi Kemudahan dan Keamanan berdampak pada Kepuasan Penggunaan Financial Technology (Fintech) Peer-to-Peer (P2P) Lending di Denpasar.



Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti, 2023

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar dengan fokus pada data kuantitatif, yang berupa data berbentuk angka. Populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan P2P Lending di Denpasar, yang jumlahnya sekitar 164.896 menurut data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik Stratified random sampling. Analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk Uji Asumsi Klasik, Uji Analisis Regresi Linear Berganda, Uji



disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hasil uji Glejser pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi variabel melebihi 0,05, menunjukkan tidak adanya indikasi heterokedastisitas.

**Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	3,871	1,120		3,457	,001
Kemudahan Pengguna (X1)	,234	,041	,342	5,660	,000
Keamanan (X2)	,605	,057	,636	10,516	,000
R					0,845
<i>R Square</i>					0,713
<i>Adjusted R Square</i>					0,707
Uji F					129,70
Sig. Model					4
					0,000

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 maka persamaan regresi yang dipakai adalah:

$$Y = 3,871 + 0,234X_1 + 0,605X_2 + e$$

Dari hasil pengujian di atas, didapatkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,713, yang menunjukkan bahwa persepsi tentang kemudahan penggunaan dan keamanan memiliki dampak sebesar 71,3% terhadap kepuasan penggunaan, sedangkan 28,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil Uji F menunjukkan Fhitung sebesar 129,704 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan dan keamanan terhadap kepuasan penggunaan fintech P2P. Berdasarkan hasil regresi, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Keamanan secara positif mempengaruhi kepuasan penggunaan fintech peer to peer lending.

Analisis menunjukkan bahwa nilai variabel Persepsi Kemudahan memiliki pengaruh positif sebesar 0,234 dengan tingkat signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa persepsi kemudahan penggunaan berdampak positif dan signifikan terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending. Dengan kata lain, semakin mudah aplikasi P2P digunakan oleh masyarakat, semakin tinggi tingkat kepuasan penggunaan aplikasi tersebut.

Analisis juga menunjukkan bahwa nilai variabel Persepsi Keamanan memiliki pengaruh positif sebesar 0,605 dengan tingkat signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa

tingkat keamanan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending. Dengan kata lain, semakin baik tingkat keamanan aplikasi P2P Lending, semakin tinggi tingkat kepuasan penggunaan aplikasi tersebut.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan penggunaan, semakin mudah aplikasi P2P Lending digunakan oleh masyarakat maka akan mampu meningkatkan kepuasan penggunaan akan aplikasi tersebut.
2. Keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan penggunaan, semakin baik tingkat keamanan yang dimiliki oleh aplikasi P2P Lending akan mampu meningkatkan kepuasan penggunaan akan aplikasi tersebut.

Berdasarkan simpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengguna aplikasi P2P Lending  
Aplikasi P2P Lending telah mampu memberikan kemudahan dan keamanan bagi penggunanya, diharapkan kemudahan dan keamanan ini mampu dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar para pengguna merasa nyaman dalam bertransaksi.
2. Peneliti selanjutnya  
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang mampu meningkatkan kepuasan penggunaan serta dapat juga melakukan pengujian pada aplikasi yang berbeda.

**Daftar Pustaka**

Ajzen, E. (1991). Teori perilaku terencana. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T>

bi.go.id. (2017). Peraturan BANK Indonesia NOMOR 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi FINANSIAL. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI\\_191217.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_191217.pdf)

Chatterjee, S., Chaudhuri, R., Galati, A., & Vrontis, D. (2021). Adoption Of Ubiquitous Crm For Operational Sustainability Of The Firms: Moderating Role Of Technology Turbulence. Sustainability (Switzerland), 13(18), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su131810358>

Davis. (1989). Technology Acceptance Model. <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/technology-acceptance-model>

Djaja, J., Tongli, B., & Tahendrika, A. (2022). Pengaruh Kemudahan Dan Keamanan Transaksi

































**Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)**

**Anak Agung Putu Agung Wahyu Pratama<sup>(1)</sup>**

**Putu Cita Ayu<sup>(2)</sup>**

**Ni Putu Trisna Windika Pratiwi<sup>(3)</sup>**

<sup>(1)(2)(3)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238  
*e-mail: agungwahyu250101@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to investigate and analyze how regional financial oversight, accountability, and budgetary participation affect the performance of local government. The research focuses on civil servants who work in 30 regional apparatus organizations located in Tabanan Regency. The study involved 177 individuals, and data was collected using a questionnaire. The sampling method utilized in this study was purposive sampling, while the analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results of the study indicated that regional financial oversight did not affect the performance of local government in Tabanan Regency's regional apparatus organization. However, accountability and budgetary participation had a significant and positive impact on local government performance.*

**Keywords: Regional Financial Supervision, Accountability, Participation in Budgeting and Regional Government Performance**

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan adalah sebuah kelompok orang atau organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola kewenangan, memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan serta pembangunan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah bertugas mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, ditunjukkan agar dapat mempercepat terselenggaranya pelayanan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pengaruh dan peran masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, mengikuti prinsip demokrasi dan keadilan, persamaan, keistimewaan. dan ciri khas daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Kinerja pemerintah daerah yang baik merupakan kinerja yang dapat diukur dengan beberapa indikator, yang pertama, dengan mengukur Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kemudian yang kedua, dengan bebas KKN (*Free Corruption*) diukur menggunakan indeks persepsi korupsi dan integritas, serta akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) diukur melalui nilai pada laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dilansir dari (Biizaa.com, 2022).



### KAJIAN PUSTAKA

Teori inti pada penelitian ini ialah teori *stewardship*. Teori *stewardship* menurut (Donaldson and Davis, 1991) suatu keadaan bahwa manager mereka memiliki kepentingan pribadi, tetapi mereka menganggap penting untuk menjadi orang utama. Pada dasarnya manusia bertindak bertanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan apa adanya. Teori *stewardship* ini menerangkan hubungan erat baik dari kinerja organisasi dengan keberhasilan organisasi, hingga organisasi tersebut bisa berjalan dengan optimal.

Menurut (Mahsun, 2009) Kinerja yaitu menerangkan mengenai tingkat implementasi kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai tujuan, perencanaan strategis suatu organisasi meliputi tujuan, misi dan visi organisasi. (Sari, 2018) Kinerja merujuk pada hasil yang dihasilkan dari interaksi antara kemampuan individu dan sikap individu terhadap pekerjaan dan organisasi.

Pengawasan keuangan daerah menurut (Kuswandi, 2016) merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan sedemikian rupa agar pengeluaran-pengeluaran daerah memang dimanfaatkan sebagaimana dengan sasaran yang ditetapkan, sedangkan disisi lain supaya penerimaan-penerimaan daerah dapat diserahkan pada kas daerah dengan waktu yang telah ditentukan, dan jumlah yang telah ditentukan dapat terlaksana untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah. Alatas *et al.*, (2022), menyatakan pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan serta aturan yang telah ditentukan.

Mokalu *et al.*, (2018). Menyatakan akuntabilitas mempunyai dua definisi, baik pada lingkup besar dan lingkup kecil. Pada lingkup besar, dalam hal akuntabilitas, pemegang amanah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan dan informasi mengenai seluruh kegiatan yang dilakukannya, sebagai bagian dari kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan amanah tersebut. Pada lingkup kecil, yakni akuntabilitas adalah suatu wujud tanggung jawab yang mengarah terhadap siapa dan organisasi bertanggung jawab untuk apa.

Menurut Rahayu, *et al.*, (2014), Partisipasi penyusunan anggaran yaitu suatu bentuk keikutsertaan pegawai dan pejabat pemerintah didalam suatu organisasi pemerintahan agar berpartisipasi dalam aktivitas yang berkaitan pada suatu capaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan pada anggaran organisasinya.

Hipotesis dalam penelitian ini:

Pengawasan keuangan daerah menurut *Alatas et al.*, (2022), menyatakan pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan serta aturan yang telah ditentukan. Penelitian ini merujuk pada *Purnama & Nadirsyah* (2016), menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H1: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut *Sedarmayanti*, Akuntabilitas merupakan keharusan dalam memberikan pertanggung jawaban baik menjawab dan menjelaskan tindakan serta kegiatan individu atau suatu badan atau lembaga memberikan keterangan atau pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memintanya. Penelitian ini merujuk pada, *Putra & Indraswarawati* (2021), *Wiguna et al.*, (2015), *Jatmiko* (2020), *Elkha & Wahidahwati* (2020), serta *Purnama & Nadirsyah* (2016), menyatakan bahwa Akuntabilitas Berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Partisipasi penyusunan anggaran menurut (*Nurchayani*, 2010) adalah salah satu bentuk proses keterlibatan orang-orang secara langsung yang mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran yang kinerjanya dievaluasi dan kemungkinan besar akan diberi imbalan berdasarkan pencapaian tujuan anggaran. Rujukan pada penelitian sebelumnya oleh *Rahayu et al.* (2014) dan *Cottalismewati et al.* (2022) menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berkontribusi pada kinerja pemerintah daerah.

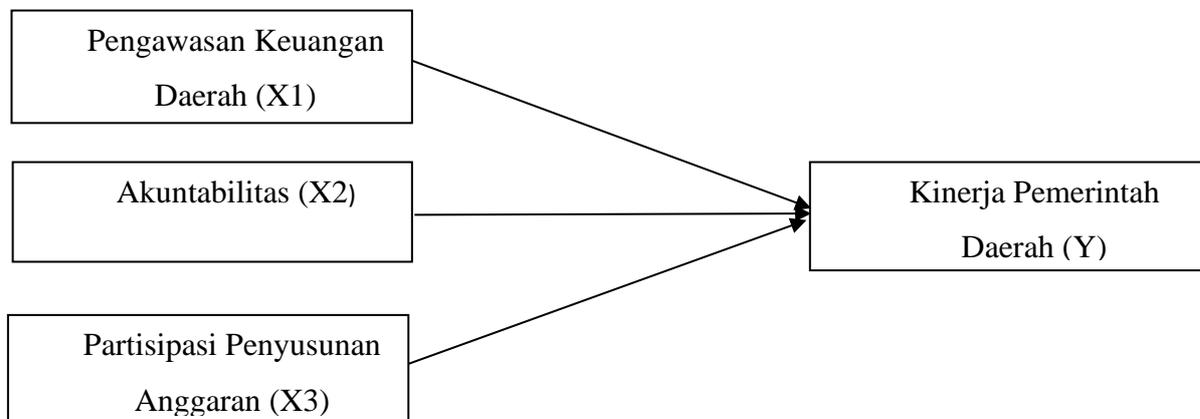
H3: Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

**METODE PENELITIAN**

Berlandaskan pada penjelasan latar belakang permasalahan serta pengembangan hipotesis penelitian “pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)”. Hal ini dapat dilihat dengan kerangka berpikir berikut ini:

Gambar 3.1

**Model Kerangka Pemikiran Teoritis dalam Penelitian Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**



Kinerja Pemerintah Daerah menurut (Mahsun, 2009) Kinerja yaitu menerangkan mengenai tingkat implementasi kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai tujuan, perencanaan strategis suatu organisasi meliputi visi/misi dan tujuan organisasi. Penilaian kinerja pemerintah daerah (Y) menggunakan lima indikator, yaitu dalam suatu sistem, terdapat masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dengan total sembilan item pernyataan (Yohana, 2020).

Menurut Alatas, *et al.*, (2022) menyatakan pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah beroperasi sesuai dengan rencana, tujuan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Indikator dalam variabel pengawasan keuangan daerah (X1) ada 4 yaitu: akurat, tepat waktu, perspektif dan operasional dan fleksibel dengan 5 item pernyataan (Aguspita, 2019).

Menurut Poae dan Saerangi (2013: 29), akuntabilitas berarti tanggung jawab baik orang atau badan yang dipilih atas pilihan dan tindakan mereka. Indikator dalam variabel akuntabilitas (X2) ada 4 yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dengan 6 item pernyataan (Aguspita, 2019).

Didalam penyusunan anggaran, partisipasi dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik salah saji, kecurangan dan yang lainnya dimana yang melibatkan individu-individu secara langsung yang sesuai dengan bidangnya. Indikator dalam partisipasi penyusunan daerah (X3) ada 4 yaitu: keikutsertaan, kepuasan, besarnya pengaruh, dan kebutuhan berpendapat dengan 8 item pernyataan (Kristiastanti, 2018). Dalam variabel partisipasi penyusunan anggaran ini menggunakan 8 pernyataan dengan 6 pernyataan positif dan 2 pernyataan negatif, yakni pada pernyataan X3.7 dan X3.8. Sehingga menggunakan konversi nilai dalam tabulasi data. Responden

yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) itu hasilnya 5, Sangat Setuju (SS) hasilnya 4, Netral hasilnya tetap 3, Setuju (S) hasilnya 2, dan Sangat Setuju (SS) hasilnya 1, dan sebaliknya.

Populasi dalam penelitian ini penulis mengambil Pegawai Negeri Sipil di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tabanan sejumlah 6.134 yang tersebar di 30 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini, yaitu *Purposive Sampling*. Sugiyono (2015: 67) menyatakan Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan 2. Kasubag Keuangan., Kasubag Umum serta Kasubag Perencanaan, 3. Tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

**Tabel 1. Data Kriteria Sampel**

<b>Kriteria Sampel</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Populasi	6.134
Jumlah sampel yang tidak masuk kriteria sampel	(5.957)
<b>Jumlah Sampel yang diperoleh</b>	<b>177</b>

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tabanan (2023)

Penelitian ini dalam pengolahan data dan menganalisis data dengan beberapa tahapan penelitian, yakni:

1. Analisis Statistik Deskriptif dipakai agar mengetahui keadaan data baik dilihat dari nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasinya.
2. Uji Instrumen dalam penelitian ini adalah Uji Validitas yaitu diukur dari nilai koefisien korelasinya diatas 0,3 maka item pernyataan dikatakan valid dan Uji Reliabilitas *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 maka instrumen yang digunakan reliabel dengan menggunakan rumus alpha.
3. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk memverifikasi bahwa distribusi data pada penelitian ini berdistribusi secara normal dan tidak mengandung nilai yang ekstrim (outlier).
4. Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$









1. Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti Pengawasan Keuangan Daerah tidak memiliki peran terhadap meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Jika dilihat dari pengertian Pengawasan Keuangan Daerah, yaitu segala kegiatan untuk mengendalikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, tujuan serta aturan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah khususnya di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan perlu meningkatkan pemahaman terkait Pengawasan Keuangan Daerah dan melaksanakan program pelatihan kepada seluruh pegawai agar dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Kinerja Pemda dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas. di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dari hasil ini, menunjukkan Pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan telah menerapkan dan mengimplementasikan akuntabilitas dengan baik dari segi laporan keuangan dan kinerja pegawai baik individu/organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik.
3. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa Pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan disepakati serta para pegawai sudah terlibat dan berpartisipasi sebagaimana mestinya dalam penyusunan anggaran sehingga bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik.

**Saran**

Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Untuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan  
Diharapkan untuk dapat meningkatkan pemahaman terkait Pengawasan Keuangan Daerah baik dari pimpinan, sub bagian, serta pegawai lainnya baik dengan program pelatihan dan melakukan pengkajian ulang terkait dengan Pengawasan Keuangan Daerah dan sebaiknya pengawasan dilakukan sewajarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta meningkatkan dan mengefektifkan Akuntabilitas dan Partisipasi Penyusunan Anggaran agar dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah sehingga Kinerja Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan optimal.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan uji R pada penelitian ini, bahwa terdapat 77,4% yang



Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2011. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Jatmiko, Bambang.2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). Volume 7.Issue 2.

Jitmau, Fanny Kalangi, Lintje Lambey, Linda.2017.Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ( Studi Empiris di Kabupaten Sorong).Universitas Sam Ratulangi.

Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial.

Kristiastanti, E.2018.Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten).

Kuswandi, Aos.2016.Manajemen Pemerintahan Daerah.Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).

Lilis Saidah Napisah, Cecep Taufiqurachman.2020.Model Pengolahan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Badung.STIE Ekuitas Bandung.Volume 6 No 2 Juli 2020.

Mahsun,Mohamad.2009.Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Edisi 1.Yogyakarta BPFE , Yogyakarta.

Meiryani.2021.Memahami Analisis Regresi Linear Berganda.Jakarta Indonesia., diakses tanggal 24 Juni 2022.

[https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linearberganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20\(Ghozali%2C%202018\)](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linearberganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20(Ghozali%2C%202018))

Morad, Ayuwandira M et al.,.2022.Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating.Volume 4, Nomor 1, Juni 2022. E-ISSN: 2685-0915 , P-ISSN: 2685-080X.

Nurchayani, Kunwawiyah.2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening.Uninersitas Diponegoro Semarang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Poae, Dedy Aries, Saerang, David P.E.2013.Pengaruh Akuntabilitas dan Aksibilitasnya Terhadap Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan kabupaten Kepulauan Talaud.Jurnal Accountability, Vol.2 No. 1, hal 29-34.

Purnama, Fifit, Nadirsyah, Dan.2016.Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya.Universitas Syiah Kuala. Vol 1, No 2, (2016) Halaman 01-15.

Putra, C.Y.M.2022.Tiga Kabupaten di Bali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi, diakses tanggal 11 Januari 2022 jam 17.50 WIB.

Putra, Putu Deddy Samtika, Indraswarawati, Sang Ayu Putu Arie.2021.Pengaruh Pengawasn Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kelungkung.Universitas Hindu Indonesia.

Pratama,, I.R.2022. Kasus DID Tabanan, KPK Periksa Direktur Eksekutif Pusaka Negara dan 3 PNS Kemenkeu., diakses tanggal 16 Februari 2022, jam 13.59 WIB.

Rahayu, Ni Luh Sri, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, Sinarwa, Ni Kadek.2014.Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja, Indonesia. Volume 2 No. 1 Tahun 2014.

Republik Indonesia.2004.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Riana Mayasari.2021.Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya. Deepublish.ISBN: 978-623-02-3658-7.

Sari, Putri Kartika.2018.Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisaasi Perangkat Daerah Kota Magelang).Universitas Muhammadiyah. Magelang.

Sugiyono.2018.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta.

Tiga Kabupaten di Bali Raih Predikat Kepatuhan Tinggi.2022., diakses tanggal 24 Juni 2022.

Warisman, Kika Sakinah Wulandari, Endang.2022.Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021.E-ISSN : 2829-2006.

Wiguna, Budi Sastra, Yuniartha, Gede Adi Ari, Nyoman Darmawan, Surya.2015.Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.Universitas Pendidikan Ganesha.Singaraja, Indonesia. Volume 3 No. 1 Tahun 2015.

Yohana, V.B.2020.Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan Good Governance (Tata kelola Pemerintahan yang baik) (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan).







tambahan dalam domain perpajakan mengenai ketaatan yang harus dipatuhi oleh pemilik kendaraan bermotor. Selain itu, 2) Temuan dari riset ini dapat berfungsi sebagai pijakan bagi penyelidikan yang akan dijalankan selanjutnya. 3) Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bernilai, tambahan informasi, ide dan bahan yang dapat dipertimbangkan oleh suatu instansi/lembaga dalam upaya meningkatkan ketaatan para wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Serta 4) Penelitian ini memiliki tujuan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pendidikan tingkat tinggi dengan kenyataan yang ada.

### KAJIAN PUSTAKA

Menurut regulasi yang diatur UU No. 28 (2007) Mengenai Regulasi Umum dan Prosedur Perpajakan, kewajiban pembayaran Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dilaksanakan oleh individu atau entitas kepada pemerintah, yang pada hakikatnya mengikat tanpa menerima kompensasi secara langsung dan dimanfaatkan oleh negara demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau entitas yang memiliki atau mengendalikan alat transportasi berbasis mesin.. Dalam hal ini, individu yang mempunyai kendaraan bermotor diharuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka serta menjalankan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara benar dan bertanggung jawab penuh. (Ilhamsyah, 2016). Apabila tingkat ketaatan para wajib pajak meningkat, dampaknya akan tercermin pada peningkatan penerimaan pajak.

Atribusi merupakan proses pembuatan kesan yang mengacu pada langkah seorang individu menguraikan tingkah laku individu lain atau dirinya sendiri kemudian menarik kesimpulan. Dalam teori atribusi ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang berperan dalam menentukan perilaku seseorang. Faktor internal merujuk pada elemen yang bersumber dari dalam individu, seperti kemampuan atau upaya yang dilakukan, kesadaran maupun kepribadian. Faktor eksternal merupakan variabel yang timbul dari lingkungan eksternal individu yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu sebagai respons terhadap situasi yang dihadapi. Dalam penelitian ini terdapat faktor eksternal seperti penghapusan sanksi administratif, pembebasan pembayaran pajak balik nama kendaraan serta penyebarluasan informasi tentang regulasi perpajakan.



semakin sering dilakukan, ketaatan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan juga akan meningkat.

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan, hipotesis dirumuskan:

**H3 : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Ketaatan dari pihak yang terutang pajak diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan apabila mereka memahami sepenuhnya tentang keberadaan program penghapusan sanksi administratif. Sosialisasi perpajakan menguatkan ikatan interpersonal antara penghapusan sanksi administratif dengan ketaatan wajib pajak. Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, informasi tentang pentingnya membayar pajak dan program pemutihan akan tersebar lebih luas. Hal ini tentunya dapat menguatkan kepatuhan para pembayar pajak dalam melakukan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor mereka merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam Saputra Deni (2022) dan Kusasih & Kustiningsih (2023) yang menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kewajiban ketaatan dari para pemilik kendaraan bermotor terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, kemudian dibentuklah suatu asumsi:

**H4 : Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi (Memperkuat) Pengaruh Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

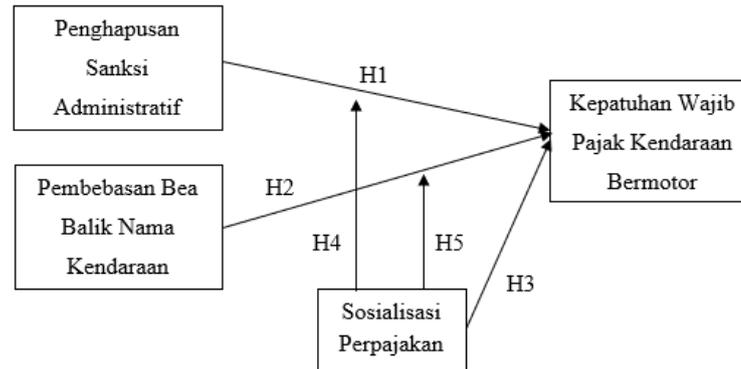
Peningkatan ketaatan wajib pajak dapat terjadi ketika wajib pajak menyadari program penghapusan biaya pengalihan kepemilikan kendaraan. Sosialisasi mengenai sistem perpajakan memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan antara penghapusan biaya pengalihan kepemilikan kendaraan dengan ketaatan para wajib pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan, informasi mengenai arti pentingnya membayar pajak hingga adanya program pembebasan bea balik nama ini akan tersebar lebih luas sehingga hal tersebut tentunya meningkatkan kepatuhan para kontributor pajak dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran pajak terkait kendaraan bermotor.

Dari uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

**H5 : Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi (Memperkuat) Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### METODE PENELITIAN

Dengan merujuk pada latar belakang permasalahan serta proses perumusan hipotesis, pengaruh penghapusan sanksi administratif, pembebasan dari kewajiban membayar bea balik nama kendaraan diberikan sesuai dengan ketaatan Terhadap regulasi perpajakan kendaran bermotor, dengan melakukan sosialisasi perpajakan sebagai faktor moderasi dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagai berikut.



Sumber: data diolah, 2023

Metode riset yang digunakan pada kajian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sampel penelitian mencakup seluruh jumlah individu yang berkewajiban membayar pajak, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 346.285 orang. Dalam metodologi pengambilan sampel, peneliti juga menetapkan standar yang sesuai untuk calon responden sebagai sumber data. Standar tersebut mencakup syarat bahwa responden harus merupakan pemilik kendaraan dengan plat nomor berwarna hitam atau putih, telah terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gianyar, dan juga merupakan wajib pajak langsung, bukan perantara. Dalam studi ini, populasi penelitian terdiri dari 100 individu yang berstatus sebagai wajib pajak, yang dipilih berdasarkan metode penarikan sampel menggunakan rumus Slovin. Pendekatan analisis data yang diterapkan adalah Structure Equation Modeling (SEM), dimana perangkat lunak Partial Least Squares (PLS) digunakan sebagai alat utama untuk analisis. Dalam kerangka analisis SEM-PLS, terdapat dua tahapan yang diterapkan untuk menguji kecocokan model yang diajukan, yang dikenal sebagai Metode Pemodelan Persamaan Struktural Dua Langkah. Pendekatan ini dimulai dengan melakukan estimasi terhadap model pengukuran terlebih dahulu, yang merujuk pada Outer Model dalam konteks SEM-PLS. Langkah selanjutnya melibatkan estimasi terhadap model struktural, yang dikenal sebagai Inner Model.













### **Pengaruh Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar**

Temuan dari uji coba menunjukkan bahwa eliminasi sanksi administratif tidak berdampak secara signifikan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar. Akibatnya, hipotesis awal dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa efektivitas program penghapusan sanksi administratif terkait pajak kendaraan bermotor belum mencapai peningkatan yang berarti dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemungkinan timbulnya dugaan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mengalami peningkatan manfaat dari kebijakan penghapusan sanksi administratif tersebut. Tindakan ini merupakan respons terhadap permasalahan yang signifikan, yaitu meningkatnya jumlah kontributor pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka, sehingga mengakibatkan akumulasi denda pajak kendaraan bermotor yang mengkhawatirkan.

Selain itu, Kemauan untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh penghapusan sanksi administratif terkait pajak kendaraan bermotor, meskipun upaya pemerintah untuk mengurangi denda keterlambatan, dikarenakan Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya yang masih tertunggak.

Temuan yang didapat dari kajian ini sesuai dengan hasil yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sasana dan rekan-rekannya pada tahun 2021, serta riset yang dilakukan oleh Dzulfitriah dan Saepuloh pada tahun yang sama. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan sanksi keuangan pajak kendaraan bermotor tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketaatan para wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar. Karena itu, proposisi kedua yang diusulkan dalam penelitian ini tidak dapat disetujui. Tujuan dari penerapan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Namun, rendahnya dampak dari pembebasan bea balik nama ini disebabkan oleh rendahnya

tingkat kesadaran masyarakat tentang prosedur balik nama kendaraan serta kurangnya pemanfaatan insentif yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pembebasan bea balik nama. Temuan studi ini konsisten dengan temuan yang diungkapkan oleh Kusasih & Kustiningsih (2023) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari pembebasan bea balik nama terhadap tingkat ketaatan para wajib pajak.

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar**

Temuan dari pengujian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi perpajakan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat ketaatan yang diwajibkan kepada wajib pajak, yang pada gilirannya mendukung hipotesis ketiga dalam kerangka penelitian ini. Fiskus memanfaatkan sosialisasi perpajakan sebagai saluran untuk mengkomunikasikan informasi terbaru seputar regulasi dan kebijakan perpajakan kepada masyarakat secara efektif. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, yang berpotensi meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai aspek-aspek perpajakan yang relevan, termasuk pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin intensif sosialisasi perpajakan yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat ketaatan yang termanifestasikan oleh wajib pajak kendaraan bermotor dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini konsisten dengan temuan yang disajikan oleh Rahayu & Amirah pada tahun 2018 serta oleh Saputra Deni pada tahun 2022, yang menegaskan bahwa proses sosialisasi terkait perpajakan berperan signifikan dalam memengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

**Interaksi Penghapusan Sanksi Administratif Dengan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar**

Hasil riset menyatakan bahwa proses sosialisasi terkait perpajakan tidak berhasil memperkuat efek pengurangan sanksi administratif terhadap ketaatan para wajib pajak, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis keempat dalam kajian ini tidak dapat disetujui. Tidak didukungnya hipotesis ini, dapat dijelaskan bahwa ketika penghapusan sanksi administratif tidak mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak, sehingga diperlukan peran para fiskus dalam memberikan sosialisasi perpajakan.

Namun kehadiran fiskus ini dalam memberikan sosialisasi tidak mampu memperkuat hubungan penghapusan sanksi administratif terhadap ketaatan yang diharuskan dari pihak yang membayar pajak.. Hal ini diduga, sosialisasi yang diberikan belum maksimal dan wajib pajak



Saran yang dapat diberikan adalah pertama, disarankan agar Kantor SAMSAT Gianyar mempertahankan upaya sosialisasi secara teratur guna memastikan penyebaran informasi terkait program pemerintah yang lebih luas. Tindakan ini diharapkan dapat memperkuat ketaatan wajib pajak di wilayah tersebut. Kedua, penelitian ini menyoroti adanya batasan tertentu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pembaruan metodologis serta menambahkan variabel tambahan yang mungkin dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan wajib pajak.

### Daftar Pustaka

- Ammy, B. (2023). ... Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan .... *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*.  
<http://polgan.ac.id/owner/index.php/owner/article/view/1257>
- Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Garut. *FRIMA: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 4
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). ... , Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan .... *Jurnal Revenue* ....  
<https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/111>
- Miftahur Rohmah, R. F., Suyanto, U. Y., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 5(1).
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (n.d.).

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1).

Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).

Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127–134.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (n.d.).

Yuliawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Kab. Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2).







Berdasarkan SAK EMKM 2016 (2.24:6), penghasilan dicatat saat adanya penambahan potensi manfaat ekonomi dimasa depan terkait kenaikan aset ataupun pengurangan liabilitas, di mana kenaikannya dapat diestimasi dengan akurat. Berdasarkan SAK EMKM 2016 (2.25:6), Beban dicatat saat adanya penurunan potensi kegunaan ekonomi dimasa mendatang terkait penurunan aset ataupun peningkatan liabilitas, di mana penurunannya dapat diestimasi dengan akurat. Didasarkan pada SAK EMKM 2016 (2.19:5), Entitas menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip akrual, di mana entitas menyetujui beberapa pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, perolehan, serta beban.

Si APIK adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama IAI, yang dikhususkan bagi UMKM. Metode pencatatan yang digunakan dalam aplikasi tersebut yaitu debit-kredit menerapkan sistem satu masukan sesuai jenis transaksi. Aplikasi Si Apik memiliki kemampuan untuk menyajikan laporan meliputi neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan detail dari pos-pos keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan komparatif. Dalam studi kualitatif, penghimpunan datanya berupa informasi tertulis maupun lisan dari individu atau tindakan yang bisa diobservasi. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data deskriptif serta untuk memahami suatu kejadian berdasarkan informasi yang terkumpul.

Informan pada studi ini adalah Bapak Timbul sebagai pemilik Anugerah Bali Computer. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria dimana informan harus berkaitan dengan pencatatan keuangan dan pembuatan laporan keuangan Anugrah Bali Computer. Sedangkan datanya berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari data keuangan usaha. Pada studi ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data berupa observasi dengan cara mengamati objek penelitian, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi.

Miles & Huberman menjelaskan analisis data kualitatif melalui proses interaktif dan dilakukan hingga tuntas dan data yang diperoleh jelas. Langkah-langkah dalam analisis data diantaranya: mereduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Peneliti menggunakan uji kredibilitas guna mengetahui keabsahan data, yang dalam studi ini dilakukan dengan teknik triangulasi.

Studi ini akan menerapkan teknik triangulasi dalam menganalisis keabsahan data. Triangulasi teknik dilakukan melalui proses pengecekan data dari sumber yang sama dan menggunakan beberapa metode penghimpunan data.



mencatatnya hanya sebagai pembelian barang tidak ada daftar aset tetap yang tercatat. Dan karena tidak ada daftar aset tetap maka penyusutan juga tidak di tercatat. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Timbul selaku pemilik pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pada pukul 09.00 WITA:

“Untuk persediaan, pertama kami catat dulu pembelian barangnya, kemudian baru catat barang apa saja yang kami beli. Barang yang pertama kami beli yang kami jual terlebih dahulu. Untuk pembelian peralatan dan bangunan kami catat beli. Tapi kami tidak membuat daftar apa saja peralatan dan bangunan yang kami miliki karena itu sudah lama sekali kami beli. Kami tidak melakukan pencatatan penyusutan, alat-alat dan lainnya kami pakai begitu saja kalau rusak ya kami perbaiki atau kami beli baru.”

Untuk modal, Anugerah Bali Computer hanya mencatat di awal saja ditambah lagi bahwa tidak adanya laporan posisi keuangan menyebabkan tidak adanya modal yang di catat oleh Anugerah Bali Computer. Hal ini juga berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Timbul selaku pemilik pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pada pukul 09.00 WITA:

“Modal awal saya catat di awal pada saat pertama kali saya memulai usaha. Tapi seterusnya saya sudah tidak mencatat lagi.”

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa hasil observasi sesuai dengan hasil wawancara dimana Anugerah Bali Computer hanya membuat laporan laba rugi saja. Laporan laba rugi Anugerah Bali Computer berisi informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan serta keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran secara kredit dan secara tunai dipisah. Karena pencatatan tersebut dipisah sehingga Anugerah Bali Computer juga telah mencatat piutang dagang dan hutang dagangnya. Untuk rumus pencatatan persediaan Anugerah Bali Computer adalah biaya masuk-pertama keluar-pertama (MPKP). Untuk pembelian barang secara kredit memiliki alur dimana ketika pembelian dilakukan

dan barang serta nota diterima maka akan langsung di catat barang apa saja yang di beli atau bertambah namun jika pembelian secara tunai maka pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diterima begitu pula untuk penjualan. Anugerah Bali Computer tidak mencatat pembelian aset tetap sebagai aset tetap, namun langsung mencatat pembelian aset sebagai beban pada periode pembelian. Sehingga Anugerah Bali Computer juga tidak mencatat penyusutan aset tetapnya. Terkait pencatatan modal, Anugerah Bali Computer tidak mencatat jumlah modal.

Berlandaskan SAK EMKM laporan laba rugi menggambarkan performa keuangan suatu entitas, berisikan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang terjadi selama periode tertentu, dan dari hasil wawancara serta observasi menunjukkan laporan laba rugi Anugerah Bali Computer telah berisi informasi terkait penghasilan dan beban saat pelaporan serta keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Anugerah Bali Computer tidak laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan, Sehingga laporan keuangan Anugerah Bali Computer tidak mengikuti ketentuan dalam SAK EMKM.

Selain dari jenis laporan keuangan, SAK EMKM juga mengatur terkait komponen-komponen dalam laporan keuangan UMKM, yang pertama adalah bagian aset yaitu persediaan. Berlandaskan SAK EMKM, entitas menyetujui persediaan saat didapatkan sebesar biaya yang diperoleh. Entitas mempunyai pilihan menggunakan metode MPKP atau pendekatan rerata tertimbang dalam pengelolaan biaya. Dan hasil wawancara serta observasi menunjukkan bahwa Anugerah Bali Computer telah melakukan pencatatan persediaan barang dagangnya sebesar biaya perolehannya dan menggunakan rumus MPKP dalam menentukan biaya perolehan persediaan. Sedangkan untuk aset tetap, Anugerah Bali Computer tidak mencatat aset tetap sebagai aset, namun langsung mencatatnya sebagai beban pada saat periode pembelian aset tetap. Hal ini menyebabkan pencatatan aset Anugerah Bali Computer tidak mengikuti ketentuan dalam SAK EMKM.

Unsur kedua adalah liabilitas, berdasarkan SAK EMKM Liabilitas dicatat dalam laporan keuangan ketika terdapat kewajiban yang memerlukan penggunaan sumber daya ekonomi yang pasti untuk memenuhinya, dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan akurat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Anugerah Bali Computer telah melakukan pencatatan hutang dagangnya yang dimana setiap pembelian secara kredit dilakukan maka akan dicatat pada jurnal pembelian yang berisi tanggal pembelian, jumlah barang yang di beli, total biaya yang ditagihkan, nama pemasok dan termin atau batas waktu pelunasan. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa Anugerah Bali Computer dalam pencatatan hutangnya sudah sesuai aturan dalam SAK EMKM.



**Tabel 1. Hasil Triangulasi Data**

<b>Unsur-Unsur dan Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Hasil Observasi</b>	<b>Triangulasi Data</b>
Kas dan setara kas	Ada	Ada	Valid
Persediaan	Ada	Ada	Valid
Aset tetap	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Penyusutan aset tetap	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Liabilitas	Ada	Ada	Valid
Ekuitas	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Penghasilan	Ada	Ada	Valid
Beban	Ada	Ada	Valid
Dasar akrual	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Laporan laba rugi	Ada	Ada	Valid
Laporan posisi keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Valid
Catatan atas laporan keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Valid

Sumber : Diolah Mandiri 2024

Data yang dimasukkan ke aplikasi Si Apik adalah data profil UMKM. Profil tersebut meliputi logo badan usaha, nama badan usaha, nomor telepon pemilik, nama pemilik, jenis usaha, KTP pemilik. Setelah *input* data profil usaha, langkah selanjutnya adalah mengisi manajemen data. Berdasarkan observasi, pemilik hanya mengisi data barang dagang, data bank, data aset tetap, data pemasok dan data pelanggan serta saldo awal karena tidak semua fitur pada Si Apik yang diperlukan pada usaha ini. Selanjutnya Pemilik dapat langsung melakukan *input* transaksi setelah mengisi manajemen data. *Input* transaksi yang dilakukan seperti, *input* transaksi penjualan, pembelian dan pengeluaran. Hasil *output* dari Si Apik berlandaskan SAK EMKM mencakup laporan keuangan dan laporan laba rugi. Namun, untuk memenuhi standar pelaporan keuangan SAK EMKM, juga disusun Catatan atas Laporan Keuangan secara manual.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Berlandaskan hasil temuan dari Anugerah Bali Computer hanya membuat laporan laba rugi dan untuk unsur-unsur laporan keuangan, seperti liabilitas dan penghasilan telah mengikuti SAK EMKM sedangkan untuk unsur aset, ekuitas, beban serta dasar akrual tidak sesuai ketentuan SAK EMKM. Kesimpulan bahwa laporan keuangan Anugerah Bali Computer tidak sesuai SAK EMKM.

Implementasi pembuatan laporan keuangan dalam aplikasi Si Apik melalui dua tahapan yakni *input* dan *output*. Proses *Input* dilakukan mulai dari pembuatan atau pendaftaran sampai penginputan transaksi. Sedangkan *Output* dari aplikasi Si Apik berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pencatatan tambahan untuk laporan keuangan dalam Si Apik masih kurang lengkap, sehingga peneliti harus menyusunnya secara manual.

Saran yang dapat penulis berikan bagi para pelaku usaha yaitu Anugerah Bali Computer adalah untuk lebih rutin menggunakan Si Apik dalam menyusun laporan keuangannya. Sedangkan untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk menerapkan SAK EMKM dan Si Apik pada berbagai jenis usaha agar dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh setiap jenis usaha.

### Daftar Pustaka

- Dwi, B. O., & Agustina, Y. (2020). Implementasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Pastellia Intermoda Bumi Serpong Damai dengan menggunakan aplikasi Si Apik periode 2018 – 2019. *4*(2).
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). Prospek implementasi standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah berbasis kualitas laporan keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2018.
- Hendika, W., & Wibowo, D. (2015). Analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, *29*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Kurniawansyah, D. (2016). Penerapan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *2*(4).
- Nuvitasari, A., Citra, N., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *3*(3).
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. *086507*, 1–121.
- Rizki, T., & Rahayuningsih, D. A. (2021). Faktor yang mendukung penerapan konservatisme akuntansi perusahaan manufaktur di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *1*(3).
- Setyaningsih, T., & Farina, K. (2021). Pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM (Studi kasus pada UMKM di PD Pasar Jaya Kramat Jati). *10*(1).
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Vol. 1(2).
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian manajemen*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.



dari segi pekerjaan, pegawai swasta menduduki peringkat dari atas dengan proporsi 40% dari total investor. Selanjutnya, terdapat pelajar sebanyak 20%, pengusaha 15%, dan sekitar 13% lainnya. Pegawai negeri menyumbang sekitar 5%, sementara ibu rumah tangga mencapai 4%, pensiunan 1%, TNI/Polri 0%, dan guru sekitar 1%. Proyeksi ke depannya menunjukkan bahwa minat masyarakat Bali terhadap investasi saham diperkirakan akan terus meningkat, dengan jumlah investor saham yang terus bertambah (bisnisbali.com, 2022).

Minat investasi adalah dorongan kuat atau keinginan seseorang untuk menggali pengetahuan tentang investasi dan pada akhirnya mulai melakukan investasi. Faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi termasuk pengetahuan tentang investasi. Pengetahuan merupakan fondasi dari pemahaman tentang suatu konsep atau objek tertentu, dan mengerti dasar mengenai investasi yang sehingga dapat membantu investor dalam oebfambilan sebuah keputusan. Keputusan yang didasarkan oleh pengetahuan memiliki potensi untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul melalui analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain pemahaman/pengetahuan mengenai investasi juga diperlukan fasilitas pendukung dalam upaya meningkatkan invermasi pada pasar modal. selain pengetahuan investasi, diperlukan juga fasilitas pendukung lainnya agar dapat menarik berbagai lapisan masyarakat untuk memulai investasi di Pasar Modal. Oleh sebab itu, (BEI) telah berkolaborasi bersama (KSEI) bersama perusahaan sekuritas untuk mengagendakan berbagai bentuk kegiatan yakni talkshow, seminar, hingga workshop, serta (SPM) Sekolah Pasar Modal (Merawati & Putra, 2015).

Selain itu, modal minimum juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap minat berinvestasi dalam penelitian ini. Dari sekian banyak investor, terutama seorang mahasiswa, berpendapat bahwa investasi memerlukan jumlah modal yang besar. Sebagian besar mahasiswa masih bergantung pada uang dari orangtua dan ini membuat mereka merasa ragu untuk memulai investasi di pasar modal.

Inisiatif untuk mengenalkan dunia akademis terhadap pasar modal adalah dengan dibuatnya ruang pameran oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Galeri BEI menganut konsep (3 dalam 1) melibatkan kerja sama antara BEI, universitas, dan perusahaan sekuritas. Tujuannya agar Galeri BEI tidak hanya memberikan wawasan mengenai pasar modal dari sudut pandang teoritis, namun juga dari sudut praktis. Di Universitas Hindu Indonesia, Galeri BEI didirikan pada tahun 2019. Ketua Galeri Investasi UNHI, Agus Artawan (2022), mencatat bahwa minat berinvestasi mahasiswa di UNHI masih tergolong rendah. Ini disebabkan karena sedikitnya jumlah mahasiswa, terutama yang mengambil jurusan akuntansi, yang aktif berpartisipasi dalam investasi.



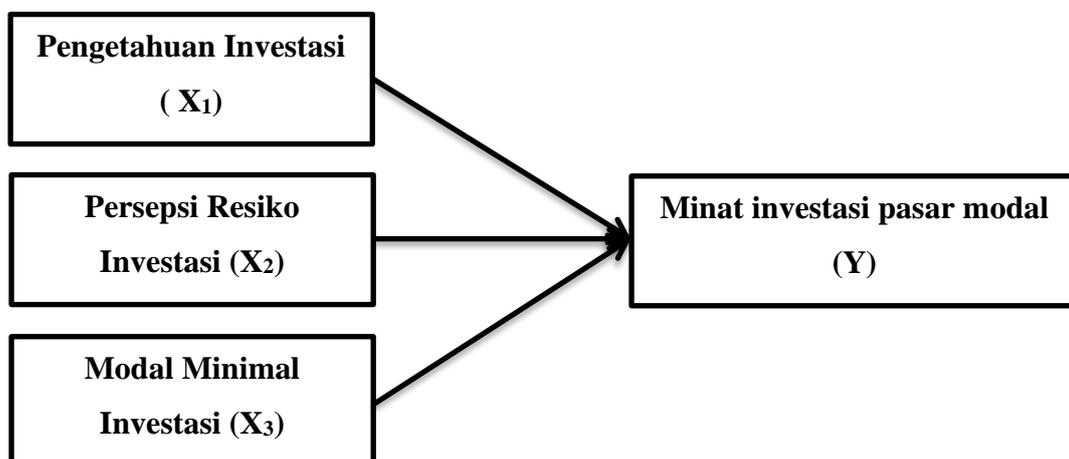
Factor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan saat berani membuat keputusan berinvestasi yakni modal minimal. (Pajar, 2017). Modal minimal seringkali berhubungan dengan penawaran yang besar yang ditawarkan di pusat perbelanjaan, dan tawaran ini dapat mendorong orang untuk membelanjakan uangnya. Nisa (2017) menunjukkan tentang modal minimal mempunyai hasil yang kuat. Temuan N. Hikmah dkk. (2021) dan Burhanudin dkk. (2021), yang mengindikasikan didasarkan pada hasil ini, memiliki modal awal yang terbatas secara positif dan kuat memengaruhi minat investasi mahasiswa. Berdasarkan itu, dapat disimpulkan bahwa Minat mahasiswa dalam hal ini adalah berinvestasi yang lebih tinggi ketika modal yang diperlukan relatif lebih kecil.

H3: Minat investasi dipengaruhi secara positif dan kuat oleh modal minimal

**METODE PENELITIAN**

Rangka konseptual dipakai untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai hubungan antar variable penelitian. Penelitian ini menggunakan *quantitative method* dan Menggunakan survei dengan kuesioner sebagai metode untuk mengumpulkan informasi. yang disampaikan melalui Google form ( data primer). Populasi adalah mahasiswa jurusan Akuntansi di FEBP UNHI yang berada pada semester 5 dan 7, karena pada semester ini mereka biasanya telah mengikuti mata kuliah pasar modal secara langsung. Jumlah sampel yang ditentukan adalah sebanyak 78,4 responden, yang dibulatkan menjadi 78 responden setelahnya. Selanjutnya, jumlah sampel pada masing-masing semester ditentukan sesuai dengan proporsi jumlah mahasiswa yang sedang diteliti. Maka, didasarkan oleh hal itu, kerangka pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar 1.1.**  
**Research Framework**















2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas lingkup objek penelitian dan mendalaminya lebih lanjut dengan mempertimbangkan hal Hal lain yang mungkin memengaruhi ketertarikan memulai investasi. Hal ini bertujuan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil dalam Meningkatkan ketertarikan seorang mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Selain itu, sebaiknya menggunakan cakupan sampel yang luas agar hasil penelitian yang didapatkan memiliki tingkat generalisasi tinggi.
3. Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pasar modal dan memahami berbagai informasi yang diberikan, sehingga keinginan berinvestasi mereka untuk berinvestasi di pasar modal lebih tinggi.

**Daftar Pustaka**

Afifudin, Amin, M., & Purnama, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang). E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang , Vol.11, No 08,1-14.

Junaidi, Diana, N., & Hasan, M. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univesitas Islam Malang). E-JRA , Vol.11,No. 04, 49-57.

Junaidi, Diana, N., & Hikmah, N. (2021). Pengaruh Pemahaman Investasi, Resiko Investasi, Modal Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Bursa Efek Indonesia Melalui Galeri Investasi FEB UNISMA (Studi Kasus Mahasiswa FEB Unisma). E-JRA Fakults Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang , Vol. 10, No.08,114- 122.

Sudaryanti, D., Maslichah, & Hanum, E. L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal Dan Aktivitas Galeri Investasi Universitas Islam Malang Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang). E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang , Vol. 11, No.09, 114-122.

Suesti, D. A., Wahyuningtyas, E. T., & Fuadatul, H. (2022). Dampak Motivasi Investasi, Persepsi Resiko, Literasi dan Efikasi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal. AKUNESA :Jurnal Akuntansi Umum, Vol 10, No 02, 1-10.

Sujono, Suparlinah, I., & Suaputra, G. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pasar Modal, Persepsi Resiko Investasi, Penggunaan Teknologi Terhadap Perilaku Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Empiris Pada Galeri Investasi Di Purwokerto). Jurnal Ilmiah Akuntansi , Vol. 19, No.1, 70-89.

Supiati, & Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pasar Modal Dan Persepsi Atas Risiko Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal . Jurnal Akuntansi, Program Studi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha , Volume 12, Nomor 1, 13-22.

ERMANDO, B. (2019). Bab II Kajian Pustaka 2.1 Landasan Teori 2.1.1 TheoryOf Planned Behaviour (TPB). Link : <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16117/05.2%20bab%20.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Luky, M. R. Minat Berinvestasi di Pasar Modal : Aplikasi Theory PlannedBehaviour Serta Persepsi Berinvestasi di Kalangan Mahasiswa.

Dwiyani Sudaryanti, M. E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal dan Aktivitas Galeri Investasi Universitas Islam Malang Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang). E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang , 09, 74-83.

Junaidi, M. Y. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal Investasi dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang). E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IslamMalang , 11, 49-57.

Utami, N. K. (2022). Pengaruh Investment Knowledge, Modal Minimal Investasi dan Keajuan Teknologi Informasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal.

Herawati, N. T., & Prasini, N. K. (2022). Pengaruh Motivasi, Modal Investasi Minimal Dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Mahasiswa Universitas Negeri di Bali Untuk Berinvestasi Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana. JIMAT (Journal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha , 13, 91-102.

Eka, I. G., & Harta, S. (2023). Pengaruh Risiko Terhadap Minat Investasi Dengan Pengetahuan Investasi Sebagai Moderasi Terkait Kasus Trading Binomo Dan Robottrading. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 15(1), 139–148.

Bisnisbali.com. Investor Saham Bali Kembali Bertambah 19,81 Persen. Diakses dari website : <http://bisnisbali.com/investor-saham-bali-kembali- bertambah- 1981-persen/>.

## Pengaruh *Good Corporate Governance* , *Whistleblowing System* Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan//Kecurangan (*Fraud*) Dalam Lembaga Perkreditan Desa.

I Ketut Bagus Demi Ryana Putra <sup>(1)</sup>

Ni Komang Sumadi <sup>(2)</sup>

Ni Wayan Alit Erlinawati<sup>(3)</sup>

<sup>(1)(2)(3)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238

*e-mail: Bagussdemi@gmail.com*

### ABSTRACT

*This study aims to obtain empirical evidence on the Effect of Good Corporate Governance , Whistleblowing System and Internal Control on Fraud Prevention in village Credit Institutions in Mengwi Badung district. The Mengwi district LPD was chosen in this study because of the phenomenon of fraud that occurred in one of the Mengwi District LPDs. The number of samples taken was 161 respondents. Data collection techniques by observation, interviews, and questionnaires. Multiple linear regression analysis technique is the analysis technique used in this study. It was found that Good Corporate Governance had a positive and significant effect on the variable of accounting (fraud), Whistleblowing System had a positive and significant effect on the variable of accounting (fraud) and Internal Control had a positive and significant effect on accounting (fraud) in the Village Credit Institution Mengwi district. This research can support the fraud triangle theory as a theoretical research implication. It is hoped that this research can provide input to improve Good Corporate Governance, Whistleblowing System, and Internal Control against fraud committed by LPD internal parties with practical research implications.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Whistleblowing System, and Internal Control of Fraud Prevention*

### PENDAHULUAN

LPD, yang merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh komunitas Desa Adat di Bali, berlandaskan konsep Tri Hita Karana, terutama mengarah pada kegiatan keagamaan dan budaya sosial. Menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1988 dan No. 8 Tahun 2002 tentang LPD, tujuan didirikannya LPD adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan dengan meningkatkan budaya menabung di kalangan masyarakat desa dan memberikan kredit kepada usaha kecil. Hal ini dilakukan untuk menghapus bentuk eksploitasi dalam sistem kredit, memberikan peluang yang sama bagi usaha di tingkat desa, dan meningkatkan tingkat moneter di pedesaan.

Kecurangan, yang juga dikenal sebagai *fraud*, adalah tindakan disengaja yang dilakukan oleh pihak dalam manajemen dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan. Pencegahan terhadap kecurangan bisa dilakukan melalui penerapan pengendalian internal yang efektif, praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta sikap independen dari setiap individu. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk mencegah kecurangan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, integritas,







koefisien korelasi alpha ( $\alpha$ ) Cronbach di atas 0,60. Uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,112, yang menunjukkan bahwa residual data memiliki distribusi normal karena nilainya lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi karena nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10. Hasil uji heteroskedastisitas dengan Metode glejser menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak mengandung heteroskedastisitas karena nilai absolut residualnya lebih besar dari 0,05.

**Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients	Coefficients			
B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-0,214	2,360		-0,091	0,928
1 Good Corporate Governance	0,324	0,154	0,271	2,103	0,040
Whistleblowing System	0,503	0,234	0,277	2,149	0,036
Pengendalian Internal	0,317	0,129	0,278	2,449	0,017

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan Akuntansi

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 4.8 maka persamaan regresi yang dipakai adalah:

$$Y = -0,214 + 0,324 X_1 + 0,503 X_2 + 0,317 X_3 + error$$

Dari hasil uji diatas dapat diketahui nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.445 menunjukkan bahwa 44.5% variabel Pencegahan Kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan Pengendalian Internal, sedangkan sisanya sebesar 55.5% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil Uji F menghasilkan Fhitung yaitu sebesar 17.281 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini adalah layak digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil uji t bahwa variabel *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai variabel *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang positif sebesar 2,103 dengan tingkat signifikansi 0,040 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan

signifikan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi. Artinya semakin baik *Good Corporate Governance* maka Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Mengwi akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil anaalisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai variabel *Whistleblowing System* memiliki pengaruh yang positif sebesar 2,149 dengan tingkat signifikansi 0,036 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi. Artinya semakin baik *Whistleblowing System* yang diberikan maka Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi akan meningkat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai dari variabel Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif sebesar 2,449 dengan tingkat signifikansi 0,017 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi. Artinya semakin tinggi Pengendalian Internal maka Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada LPD di kecamatan Mengwi akan meningkat.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud* pada LPD di Kabupaten Mengwi.
2. *Whistleblowing System* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud* pada LPD di Kabupaten Mengwi.
3. Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan *Fraud* pada LPD di Kabupaten Mengwi.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan pihak Lembaga Perkraditan Desa (LPD) memahami penerapan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *transparansi* dan pelaksanaan fungsi akuntansi akan semakin baik dan dapat menekan kecurangan.
2. Disarankan pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-kecamatan Mengwi menerapkan *Whistleblowing System* yang mana mekanisme pelaporan ini dapat mencegah terjadinya kecurangan *Fraud*.
3. LPD diharapkan untuk mengurangi risiko kecurangan dengan selalu memperhatikan







## Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Menjalani Program Brevet Pajak

Ni Komang Juliantari<sup>(1)</sup>  
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati<sup>(2)</sup>  
Rai Dwi Andayani W<sup>(3)</sup>

<sup>(1)(2)(3)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
Jln. Sangalangit, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238  
e-mail: juliantaarii@gmail.com

### ABSTRACT

*The tax brevet serves as the initial phase for students and individuals aspiring to embark on a career in taxation, marking their initial foray into the intricacies of tax practices and regulations. Within this context, several factors come into play in shaping students' decisions regarding the pursuit of the tax brevet, encompassing dimensions such as Career Motivation, Quality Motivation, Economic Motivation, and Tax Knowledge Motivation. This research endeavors to delve into the intricate interplay of these motivational factors and their influence on students' inclination towards undertaking the tax brevet program, particularly within the academic framework of the accounting program at Hindu University of Indonesia. In order to comprehensively analyze this phenomenon, the study encompasses a diverse cohort of active students enrolled in the Accounting Study Program spanning the years from 2017 to 2020 at Indonesian Hindu University, constituting a total of 374 individuals who have successfully completed all requisite taxation courses. Employing probability sampling techniques, specifically simple random sampling methods, the study recruited a sample size of 193 respondents, as determined by the Slovin formula. Through the administration of questionnaires calibrated on a Likert scale for data collection purposes, the study gathered valuable insights into the multifaceted motivations driving students' decisions. Leveraging statistical analysis techniques, including multiple linear regression conducted using SPSS 24.0, the research findings elucidate the significant and positive impact of economic motivation, tax knowledge motivation, quality motivation, and career motivation on accounting students' propensity to pursue the tax brevet program, both collectively and individually.*

**Keywords: Motivation, Tax Knowledge, Economic, Career, Quality, and Tax Brevet.**

### PENDAHULUAN

Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam mempengaruhi dinamika ekonomi dan administrasi pemerintahan secara keseluruhan. Sebagai salah satu instrumen utama dalam mengatur alokasi sumber daya dan redistribusi pendapatan, sistem perpajakan memainkan peran krusial dalam mendukung keberlangsungan program-program pemerintah yang beragam. Pendapatan yang diperoleh dari pajak tidak hanya diarahkan untuk membiayai program-program publik yang penting, seperti

pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas administrasi pemerintah dalam menyediakan layanan masyarakat yang berkualitas.

Dengan diberlakukannya sistem *self-assessment* di Indonesia, tanggung jawab dan otoritas dalam memenuhi kewajiban perpajakan diberikan kepada para wajib pajak secara mandiri. Mereka bertanggung jawab untuk melaporkan, menghitung, dan melakukan pembayaran pajak yang terhutang harus dibayarkan dengan ketentuan yang diberlakukan. Namun, kompleksitas dan dinamika yang terkait dengan kebijakan perpajakan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa pembayar pajak. Peraturan pajak yang rumit dan perubahan-perubahan dalam kebijakan perpajakan dapat menyulitkan pemahaman mereka tentang kewajiban mereka, bahkan dalam melakukan kalkulasi dan pengelolaan pembayaran pajak yang tepat. Ketidakpastian yang terkait dengan proses perpajakan, bersama dengan persyaratan yang semakin kompleks, dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para pembayar pajak. Ini dapat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak, serta menimbulkan risiko ketidakpatuhan yang berpotensi berujung pada konsekuensi hukum dan finansial. Dengan demikian, pemerintah harus terus memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap para pembayar pajak, serta untuk mempertimbangkan perbaikan dan penyederhanaan dalam kebijakan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan dan keadilan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.

Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa jumlah profesi konsultan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang tidak seimbang, sementara jumlah wajib pajak mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Ketika ekonomi suatu negara berkembang, jumlah bisnis dan pendapatan individu juga cenderung meningkat, sehingga banyak orang atau entitas memiliki kewajiban pajak. Hal ini turut memengaruhi pertumbuhan jumlah wajib pajak. Untuk memastikan akurasi jumlah wajib pajak, pemerintah menerapkan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP sebagai langkah untuk mengidentifikasi secara tepat jumlah wajib pajak yang sebenarnya. Program Brevet Pajak diartikan sebagai program pendidikan atau pelatihan yang bermaksud guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan pada bidang perpajakan. Ini mencakup pemahaman tentang peraturan perpajakan, prosedur pelaporan pajak, serta teknis-teknis terkait lainnya. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada pesertanya agar mereka dapat bekerja secara efektif dalam bidang perpajakan, baik sebagai praktisi pajak maupun dalam kapasitas lain yang berkaitan dengan administrasi dan kepatuhan pajak.

Menurut hasil survei awal yang dijalankan oleh peneliti pada 30 mahasiswa yang sedang mengikuti program studi akuntansi di Universitas Hindu Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yakni sebanyak 60%, menyatakan ketidaktertarikan mereka dalam menjalani

program brevet pajak. Hal tersebut diduga karena rendahnya pemahaman mereka terhadap perpajakan, yang tercatat mencapai 56,7%. Selain itu, sebanyak 60% dari responden juga mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap manfaat memiliki sertifikat brevet pajak dalam pengembangan karier mereka. Atas dasar ini, dibutuhkan upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai tujuan dan manfaat dari menjalani program brevet pajak. (Aniswatin et al., 2020). Survei awal yang dilakukan oleh peneliti menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mendorong minat mahasiswa dalam menjalani program brevet pajak di Universitas Hindu Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami ketidakpercayaan terhadap manfaat sertifikat brevet pajak terhadap perkembangan karier mereka. Selain itu, rendahnya pemahaman mereka terhadap aspek-aspek perpajakan juga menjadi faktor penghambat.

Setiap mahasiswa perlu memiliki motivasi yang jelas untuk memastikan bahwa keputusan mereka dalam menjalani program brevet pajak merupakan hal tepat. Adapun sejumlah faktor motivasi yang memengaruhi minat mahasiswa terhadap program brevet pajak, dan salah satu di antaranya adalah motivasi pengetahuan perpajakan. Faktor ini memicu mahasiswa agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka terkait dengan konsep-konsep dasar perpajakan, memahami berbagai jenis pajak yang berlaku, serta prosedur pelaporan pajak yang berlaku. Selain itu, motivasi ekonomi juga merupakan faktor penting yang mampu memengaruhi minat mahasiswa terhadap program brevet pajak. Motivasi ini termasuk pendorong mahasiswa dalam meningkatkan potensi finansial mereka dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan, yang diharapkan akan membuka peluang baru dalam karier dan pengembangan finansial mereka di masa depan.

Selanjutnya, motivasi karir juga memainkan peran penting, dimana mahasiswa memiliki keinginan untuk meningkatkan kualifikasi dan mendapatkan posisi atau jabatan yang lebih baik. Terakhir, ada motivasi kualitas, di mana mahasiswa memiliki dorongan untuk meningkatkan kemampuan mereka pada bidang yang mereka tekuni, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan efisien dan berdasarkan standar yang ditetapkan. Penelitian ini berfokus pada Universitas Hindu Indonesia, terutama di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata dengan Program Studi akuntansi. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Universitas Hindu Indonesia baru-baru ini mendirikan sebuah organisasi tax center dan memperkenalkan program kerja brevet pajak pertamanya, yang berpotensi memengaruhi minat mahasiswa. Selain itu, pemilihan program studi akuntansi juga mempertimbangkan keberadaan mata kuliah perpajakan yang menjadi bagian penting dari kurikulum.



Minat, sebagai dimensi individual, mencerminkan kompleksitas psikologis individu yang mempengaruhi preferensi atau kecenderungan terhadap suatu objek, aktivitas, atau topik tertentu. Konsep ini tidak hanya terkait dengan respons individu terhadap stimulus eksternal, tetapi juga dengan kesiapan psikologis dan emosional individu dalam menanggapi atau mengambil tindakan terkait objek yang menarik minatnya. Dalam konteks ini, teori ini mengakui bahwa minat merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal yang membentuk kepribadian individu. Pemahaman ini diperkuat oleh kontribusi pemikiran Ratnaningsih (2022), yang menyoroti bahwa minat merupakan refleksi dari berbagai kebutuhan individu yang beragam, mulai dari kebutuhan akan pencapaian, pengakuan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan ini menegaskan bahwa minat bukanlah suatu entitas statis yang telah ditentukan, tetapi lebih sebagai proses dinamis yang berkembang seiring waktu dan pengalaman hidup individu. Dengan kata lain, minat seseorang dapat berubah sejalan dengan perkembangan kepribadian dan lingkungan sekitarnya. Atas dasar tersebut, pemahaman mendalam terkait faktor-faktor yang membentuk minat menjadi penting dalam konteks psikologi individu dan pengembangan diri.

Menurut Pramesti (2019), indikator – indikator yang berpengaruh pada minat mampu diperinci lebih lanjut menjadi dua kategori utama, yakni faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor intrinsik, yang bersumber dari dalam individu itu sendiri, melibatkan dorongan-dorongan internal seperti persepsi, kebutuhan batiniah, konsep diri, nilai-nilai personal, serta rasa kepuasan atas pencapaian. Ini mencerminkan dimensi psikologis yang mendalam yang mempengaruhi preferensi individu terhadap suatu objek atau aktivitas. Di sisi lain, faktor ekstrinsik mencakup pengaruh dari luar individu, seperti lingkungan sosial, keluarga, kesempatan yang tersedia, dan pengalaman pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal juga memainkan peran penting dalam membentuk minat seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas. Oleh karena itu, minat individu seringkali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik, yang saling memengaruhi dan membentuk preferensi individu secara holistik.

Motivasi, seperti yang dijabarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengacu pada pendorong internal yang berpengaruh terhadap individu, baik dengan sadar maupun tidak sadar, dalam bertindak dengan tujuan tertentu. Ini mencakup serangkaian dorongan psikologis dan emosional yang memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan meraih kepuasan pribadi. Motivasi tidak hanya muncul sebagai dorongan abstrak, tetapi juga tercermin dalam perilaku yang dapat diamati, seperti tindakan konkret yang diambil oleh individu untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, motivasi bukanlah sekadar keinginan atau harapan,

tetapi juga merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk bertindak dan melakukan usaha menuju pencapaian yang diinginkan.

Motivasi pengetahuan perpajakan adalah dorongan internal yang mendorong seseorang dalam menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai beragam konsep dan ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. Hal ini mencakup pemahaman tentang berbagai tarif pajak yang berlaku, subjek dan objek pajak, jenis pajak yang diberlakukan, proses perhitungan pajak, pencatatan transaksi, serta prosedur pelaporan pajak yang berlaku di Indonesia. Dengan mengikuti pelatihan brevet pajak, mahasiswa mempunyai kesempatan dalam memperluas pengetahuan mereka terkait aspek-aspek tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka dalam bidang perpajakan. Selain itu, dengan meningkatnya pemahaman mereka, mahasiswa juga dapat mengurangi ketergantungan pada pihak lain dalam menangani berbagai masalah yang terkait dengan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri dan kemandirian mereka dalam menghadapi tantangan dalam bidang perpajakan. Motivasi ini, sejalan dengan *Theory Planned Behavior*, memiliki potensi untuk membentuk sikap positif mahasiswa terhadap program brevet pajak, dikarenakan mereka memiliki minat yang tinggi dalam memahami perpajakan dan melihat nilai dari program tersebut dalam meningkatkan pengetahuan mereka. Penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh (Rahayu *et al.*, 2021) dan (Aniswatin *et al.*, 2020) menunjukkan bahwasanya motivasi pengetahuan perpajakan membawa dampak signifikan pada minat mahasiswa dalam menjalani pelatihan brevet pajak.

H<sub>1</sub>: Motivasi pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi menjalani program brevet pajak.

Motivasi ekonomi menjadi pendorong internal yang signifikan bagi individu dalam upaya meningkatkan kemampuan finansial mereka serta mencapai stabilitas ekonomi yang diinginkan. Hal ini tidak hanya memengaruhi keputusan individu terkait pilihan karier dan pendidikan, tetapi juga merupakan aspek krusial dalam manajemen organisasi secara keseluruhan. Manajemen perusahaan sering kali menggunakan insentif keuangan sebagai alat untuk memotivasi karyawan agar tetap produktif dan berkinerja optimal sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Besarnya penghargaan finansial yang diberikan oleh manajemen seringkali sejalan dengan tingkat keahlian dan kontribusi yang diberikan oleh tenaga kerja. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan keterampilan, motivasi ekonomi juga memegang peranan penting sebagai penentu minat mahasiswa terhadap berbagai program pelatihan atau sertifikasi, termasuk pelatihan brevet pajak. Temuan dari riset sebelumnya, seperti yang dijalankan oleh Rahayu *et al.* (2021) dan Ramadhini & Chaerunisak (2022), yang mana mengindikasikan bahwasanya tingkat motivasi ekonomi

dengan signifikan mempengaruhi minat mahasiswa dalam menjalani pelatihan brevet pajak. Hal tersebut menegaskan bahwasanya pemahaman akan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari program pelatihan tersebut menjadi salah satu faktor kunci yang memotivasi mahasiswa dalam memilih jalur pendidikan tertentu.

H<sub>2</sub> : Motivasi Ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk menjalani program brevet pajak.

Motivasi dalam konteks karier tidak hanya mencakup dorongan dalam meraih jabatan atau posisi yang lebih tinggi, tetapi juga mencerminkan keinginan intrinsik seseorang untuk terus meningkatkan keterampilan dan pencapaian pribadinya. Menurut Sarjono (2011), hal ini tercermin dari upaya individu untuk meraih pencapaian yang signifikan dalam karier mereka, yang seringkali diukur melalui pengalaman kerja dan kontribusi yang mereka berikan terhadap perkembangan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai dorongan karier yang tinggi cenderung akan berkomitmen yang kuat pada pengembangan diri mereka sendiri dan kesuksesan organisasi tempat mereka bekerja (Prayitno, 2021). Pilihan karier bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, tetapi merupakan hasil dari kombinasi motivasi, pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh Suyanto et al. (2023) dan Aniswatin et al. (2020) mengindikasikan bahwasanya motivasi dalam karier membawa dampak yang signifikan pada minat mahasiswa dalam menjalani program pelatihan brevet pajak. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman akan hubungan antara minat mahasiswa dan motivasi karier dalam memilih jalur pendidikan tertentu, seperti program brevet pajak, sebagai bagian dari upaya mereka dalam meraih tujuan karier dan pengembangan pribadi yang lebih baik.

H<sub>3</sub>: Motivasi Karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk menjalani program brevet pajak.

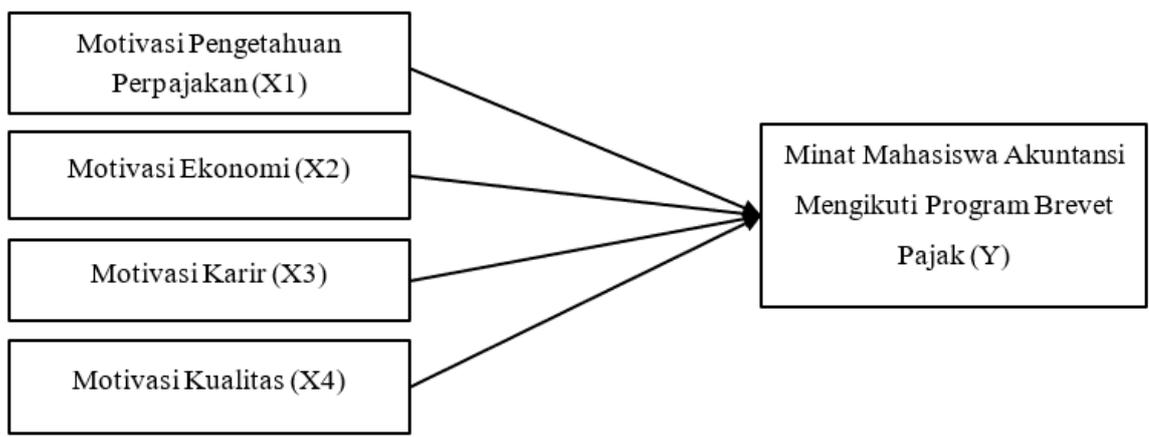
Motivasi kualitas ialah dorongan batin seseorang agar terus memaksimalkan kualitas keterampilan pada bidang yang diminatinya, dengan tujuan akhir mampu menjalankan tugas dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi (Aniswatin et al., 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa individu yang memiliki motivasi kualitas yang kuat cenderung memiliki keinginan yang besar dalam mengasah keterampilan mereka untuk menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang mereka tekuni, termasuk dalam hal perpajakan. Motivasi ini tidak hanya mencerminkan keinginan individu untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka, tetapi juga untuk mencapai standar kualitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Motivasi kualitas ini sangat relevan dalam konteks perpajakan, di mana partisipasi dalam pelatihan brevet

pajak dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapai peningkatan kualitas yang diinginkan. Mahasiswa yang berhasil memperoleh keahlian dan sertifikasi brevet pajak cenderung dinilai lebih tinggi oleh perusahaan, karena kemampuan mereka dalam mengelola masalah perpajakan dianggap lebih terpercaya dan berkualitas. Penelitian sebelumnya oleh Rahayu et al. (2021) dan Ramadhini & Chaerunisak (2022) telah menegaskan bahwa motivasi untuk meningkatkan kualitas membawa dampak yang signifikan pada minat mahasiswa dalam menjalani program brevet pajak. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengembangan motivasi kualitas dalam meraih keberhasilan dalam bidang perpajakan.

H4: Motivasi Kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk menjalani program brevet pajak.

### METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan sebuah studi kuantitatif yang bermaksud guna mengetes hipotesis terkait pengaruh variabel independen pada variabel dependen yang diteliti. Melalui penggunaan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data empiris yang diperlukan untuk menguji hubungan antar variabel dan menguji keabsahan hipotesis yang diajukan. Langkah-langkah ini harapannya mampu memberi pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang berpengaruh pada variabel dependen, serta implikasinya dalam konteks yang diteliti. Variabel independen yang menjadi fokus pengujian adalah Motivasi Karir, Motivasi Ekonomi, Motivasi Pengetahuan Perpajakan, dan Motivasi Kualitas. Studi ini akan meneliti bagaimana variabel-variabel ini membawa dampak pada variabel dependen, yakni Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Menjalani program brevet pajak. Penelitian ini akan dilakukan secara empiris, yaitu dengan mengumpulkan data dari mahasiswa yang terdaftar di jurusan Akuntansi di lingkungan Universitas Hindu Indonesia.





distribusi yang signifikan dari kecenderungan normal. Hal ini penting untuk memastikan kevalidan analisis statistik yang dilakukan, karena normalitas data merupakan salah satu asumsi dasar dalam sebagian besar teknik analisis statistik parametrik.

Dengan menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, hasil uji normalitas ini memberikan keyakinan tambahan terhadap keakuratan dan keandalan dari hasil analisis statistik yang dilakukan. Terlebih lagi, penggunaan teknik-teknik statistik parametrik membutuhkan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi distribusi normal untuk memastikan interpretasi yang tepat dari hasil-hasil analisis tersebut. Dengan demikian, hasil dari uji normalitas ini memberikan dasar yang kuat bagi keberlanjutan analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian tersebut, serta memperkuat kepercayaan pada kesimpulan yang diambil dari analisis data tersebut.

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Motivasi Pengetahuan Perpajakan	.538	1.859
	Motivasi Ekonomi	.617	1.620
	Motivasi Karir	.521	1.918
	Motivasi Kualitas	.488	2.049

Pengujian multikolinearitas yang mengindikasikan bahwasanya semua variabel bebas bernilai Variance Inflation Factor (VIF) yang di bawah 10 dan angka toleransi melebihi 0,10 adalah indikasi yang sangat positif dalam konteks analisis regresi. Penemuan ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinearitas yang signifikan pada model regresi yang dipergunakan. Multikolinearitas yaitu keadaan di mana dua maupun lebih variabel bebas dalam model regresi mempunyai keterkaitan yang kuat satu sama lain, yang mampu mengganggu interpretasi hasil regresi.

Dengan tidak adanya indikasi multikolinearitas, kepercayaan terhadap hasil analisis regresi meningkat. Hal ini karena ketika terdapat multikolinearitas, interpretasi koefisien regresi menjadi sulit dilakukan karena variabilitas yang berlebihan dalam estimasi koefisien. Namun, dengan nilai VIF di bawah 10 serta angka toleransi melebihi 0,10, mampu disimpulkan bahwasanya setiap variabel bebas pada model regresi memberikan kontribusi unik terhadap perubahan dalam variabel dependen tanpa adanya gangguan dari multikolinearitas.

Penemuan ini memperkuat validitas hasil analisis regresi dan memungkinkan peneliti untuk membuat interpretasi yang lebih akurat tentang hubungan antara variabel dependen dan variabel bebas dalam konteks penelitian. Dengan demikian, hasil regresi dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk membuat keputusan atau rekomendasi dalam bidang yang bersangkutan,





kompleks, tetapi juga pada pemahaman bahwa pengetahuan yang mendalam dalam hal ini nantinya menjadikan mereka lebih unggul pada persaingan pasar kerja yang kian kompetitif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan dan praktik terkait, mahasiswa menjadi lebih siap ketika dihadapkan oleh tantangan yang ada di dunia profesional. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa mengikuti program brevet pajak akan membuka peluang yang lebih luas untuk karier yang sukses dan berkembang di bidang akuntansi, karena pengakuan dan penghargaan atas kemampuan khusus ini semakin meningkat.

2. Di samping motivasi pengetahuan perpajakan, faktor ekonomi juga membawa dampak yang signifikan dalam membentuk minat mahasiswa akuntansi menjalani program brevet pajak. Motivasi ekonomi ini mencakup tidak hanya keinginan untuk mencapai stabilitas finansial yang baik, tetapi juga untuk mencari peluang penghasilan yang lebih besar di masa depan. Dalam lingkungan ekonomi yang terus berubah, mahasiswa menganggap investasi dalam pendidikan tambahan seperti program brevet pajak sebagai langkah yang cerdas dan strategis untuk mencapai tujuan finansial mereka.
3. Motivasi karir juga menjadi faktor penting dalam membentuk minat mahasiswa akuntansi dalam menjalani program brevet pajak. Mahasiswa yang memiliki ambisi dalam mencapai posisi yang lebih tinggi pada karier mereka di bidang akuntansi menyadari bahwa memiliki kualifikasi tambahan dalam perpajakan dapat membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Mereka melihat program brevet pajak sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik mereka bagi perusahaan dan membuka pintu untuk peluang promosi yang lebih baik di masa depan.
4. Terakhir, motivasi terkait kualitas juga memainkan peran penting dalam membentuk minat mahasiswa akuntansi dalam menjalani program brevet pajak. Mahasiswa yang memiliki dorongan guna mencapai standar kualitas yang tinggi dalam pekerjaan mereka menyadari bahwa memiliki sertifikasi atau kualifikasi tambahan dalam perpajakan adalah langkah yang penting dalam mencapai tujuan tersebut. Mereka percaya bahwa program brevet pajak akan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan bermutu tinggi terhadap klien atau perusahaan di masa depan. Dengan demikian, motivasi terkait kualitas menjadi dorongan yang kuat bagi mahasiswa untuk mengambil langkah ekstra dan mengikuti program brevet pajak sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai kesuksesan profesional yang lebih besar.

Menurut simpulan diatas alhasil saran dari penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Bagi Mahasiswa, penting untuk mempertimbangkan pelatihan brevet pajak sebagai fondasi untuk perencanaan masa depan setelah menyelesaikan studi S1 Akuntansi. Mengambil langkah ini tidak hanya akan memperluas wawasan mereka tentang bidang perpajakan, tetapi juga akan membuka peluang karier yang lebih luas di dunia profesional. Melalui program brevet pajak, mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola dan menganalisis isu-isu perpajakan yang kompleks, yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan dengan cepat. Selain itu, sertifikasi tambahan dalam perpajakan juga mampu memaksimalkan daya saing mereka pada pasar kerja.
2. Bagi Universitas Hindu Indonesia, hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya motivasi karir dan motivasi pengetahuan perpajakan membawa dampak yang signifikan dalam membentuk minat mahasiswa dalam menjalani program brevet pajak. Oleh karena itu, penting bagi universitas untuk mengintegrasikan pembelajaran perpajakan lebih awal dalam kurikulum akuntansi mereka. Ini akan memungkinkan mahasiswa untuk memahami konsep dasar perpajakan dan mempertimbangkan pilihan karier mereka dengan lebih baik di masa depan. Selain itu, menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau lembaga terkait lainnya juga dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dengan memberikan wawasan langsung tentang peluang karir yang tersedia setelah menyelesaikan program brevet pajak. Kerjasama semacam ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh universitas, tetapi juga akan membantu membekali mahasiswa agar menjadi profesional yang berketerampilan dan siap untuk menghadapi persaingan di pasar kerja global.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan perbandingan antara minat mahasiswa di perguruan tinggi lainnya yang belum mengikuti pelatihan brevet pajak dengan yang telah menjalani pelatihan serupa. Penelitian semacam ini dapat membantu memperluas pemahaman tentang indikator – indikator yang berpengaruh pada minat mahasiswa untuk menjalani program brevet pajak. Di luar faktor behavior belief, penelitian juga dapat mempertimbangkan faktor normative belief seperti pengaruh teman sebaya atau gender, serta faktor Control Belief seperti biaya pendidikan. Dengan memperluas cakupan variabel yang diteliti, penelitian selanjutnya mampu meningkatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang indikator – indikator yang memengaruhi minat mahasiswa dalam mengambil program brevet pajak, yang pada gilirannya dapat membantu universitas dan



Suhendra, F. A. (2023). *Pengaruh Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Ekonomi, Motivasi Karir, Dan Motivasi Kualitas Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Brevet Pajak* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. etheses.uin-malang.ac.id

Suyanto, Yakin, A. M., Putri, F. K., & Nur, A. C. P. (2023). DETERMINAN MINAT MAHASISWA MENGIKUTI BREVET PAJAK. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(2). <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n2.p147>

Wildan. (2022). *Indonesia Masih Membutuhkan Lebih Banyak Ahli Pajak, Ini Alasannya*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/indonesia-masih-membutuhkan-lebih-banyak-ahli-pajak-ini-alasannya-42607>



Kasus penyelewengan dana desa oleh aparatur desa, seperti yang terjadi pada Ni Putu Ariyaningsih di Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, menimbulkan stigma negatif pada peran aparat desa dalam menjalankan kewajibannya. Kasus korupsi dana SiLPA APBDes sebesar Rp 988 juta lebih mencuatkan tindakan memperkaya diri yang dilakukan oleh bendahara desa bersama rekan-rekannya. Kasus ini terungkap ketika terdapat selisih antara SILPA APBDes tahun 2020 dengan dana yang masih dipegang oleh mantan Perbekel, Bendahara, dan Kaur Keuangan. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,03 miliar menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan minimnya kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Upaya pengembalian sebagian dana oleh beberapa tersangka masih belum mencakup seluruh kerugian yang terjadi.

Pada tahun 2023, data dari [dpd.go.id](http://dpd.go.id) menunjukkan bahwa selama tujuh tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 pelaku, di mana 50% di antaranya adalah kepala desa. Untuk mengatasi penyelewengan dana desa, pemerintah secara aktif melakukan evaluasi aliran dana dan pemeriksaan di berbagai daerah, termasuk yang pernah mengalami masalah seperti Bali, Pulau Jawa, dan daerah lainnya. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan *accountability* dalam pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan. Seorang pemimpin, khususnya Kepala Desa, memiliki tanggung jawab utama atas seluruh aktivitas pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana desa. Peran kunci kepala desa dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel terletak pada kemampuannya untuk memotivasi dan membimbing karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Kepemimpinan yang terampil hasil dari pendidikan dan pengalaman membentuk individu tersebut. Keterampilan kepemimpinan yang memahami kepentingan masyarakat dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perangkat daerah (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019). Selain kepemimpinan, faktor penting lain yang memengaruhi *accountability* Manajemen Dana adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi yang memadai dalam aparatur desa sangat penting untuk mencapai *accountability* yang baik (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019). Penelitian ini memperhatikan peran kunci kepemimpinan kepala daerah dalam membentuk kebijakan dan tindakan terkait keuangan daerah. Selain itu, penekanan diberikan pada kompetensi aparatur daerah, yang mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan efektif. Selanjutnya, penelitian ini juga mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses Manajemen Dana pemerintahan daerah. Partisipasi ini dianggap sebagai elemen penting dalam mencapai tingkat







4,3638, dan standar deviasi sekitar 0,30748. Hal ini menunjukkan bahwa skor kepemimpinan responden cenderung berkisar antara 4,00 hingga 5,00, dengan tingkat variasi yang relatif rendah. Sementara itu, varbel kompetensi (X2) menunjukkan nilai minimum 4,00, nilai maksimum 5,00, rata-rata sebesar 4,4241, dan standar deviasi sekitar 0,30962. Hasil ini menandakan bahwa responden dalam penelitian memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, dengan skor yang umumnya berada di atas 4,00. Varbel partisipasi masyarakat (X3) memiliki nilai minimum 3,86, maksimum 5,00, rata-rata sebesar 4,2500, dan standar deviasi sekitar 0,27177. Hasil ini menunjukkan variasi yang cukup kecil dalam tingkat partisipasi masyarakat, yang secara keseluruhan cenderung tinggi. Terakhir, varbel *accountability* pengelolaan daerah (Y) menunjukkan nilai minimum 4,00, maksimum 5,00, rata-rata sebesar 4,3848, dan standar deviasi sekitar 0,29823. Ini menggambarkan bahwa tingkat *accountability* pengelolaan dana daerah oleh responden cenderung tinggi, dengan skor rata-rata di atas 4,00. Secara keseluruhan, statistik deskriptif ini memberikan gambaran tentang distribusi dan variasi dari setiap varbel penelitian, menciptakan dasar pemahaman yang baik sebelum melakukan analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Varbel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
<b>(Constant)</b>	6,396	3,662		1,746	<b>,016</b>
<b>Kepemimpinan (X1)</b>	,326	,140	,295	2,334	<b>,023</b>
<b>Kompetensi (X2)</b>	,376	,113	,010	3,325	<b>,002</b>
<b>Partisipasi (X3)</b>	,618	,162	,493	3,806	<b>,000</b>
<b>R</b>					<b>0,737</b>
<b>R Square</b>					<b>0,544</b>
<b>Adjusted R Square</b>					<b>0,521</b>
<b>Uji F</b>					<b>23,830</b>
<b>Sig. Model</b>					<b>0,000</b>

Berdasarkan Tabel 2 dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6,396 + 0,326 X_1 + 0,376 X_2 + 0,618 X_3 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta 6,396 menunjukkan bahwa jika nilai kepemimpinan, kompetensi, dan partisipasi adalah nol, maka nilai *accountability* Manajemen Dana daerah diperkirakan sebesar 6,396. Koefisien regresi 0,326 untuk varbel kepemimpinan menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam varbel kepemimpinan berkontribusi terhadap peningkatan 0,326 dalam *accountability* Manajemen Dana daerah, dengan asumsi varbel lain konstan. Koefisien regresi 0,376 untuk varbel kompetensi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam varbel



Dana daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Transparansi dan integritas kepala daerah dalam memimpin pemerintahan daerah dapat menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan dapat meningkatkan motivasi perangkat daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah sebagai langkah strategis dalam upaya mencapai *accountability* pengelolaan dana daerah yang lebih baik di Kecamatan Denpasar Barat.

### **kompetensi aparatur daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana**

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur daerah memiliki positif signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. kompetensi aparatur daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana," kita dapat membayangkan sebuah cerita tentang bagaimana tingkat keahlian dan kualifikasi dari aparat daerah memainkan peran penting dalam mengelola dana publik di tingkat lokal. Dalam sebuah daerah, aparat daerah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan dan prosedur keuangan, serta keterampilan teknis yang baik dalam pelaporan keuangan, dapat secara positif memengaruhi bagaimana dana daerah digunakan dan dipertanggungjawabkan. Mereka mungkin dapat merancang sistem Manajemen Dana yang efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada integritas dan tanggung jawab.

Sebaliknya, jika kompetensi aparatur daerah rendah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam Manajemen Dana, membuat sulit untuk memahami dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana daerah. Dalam cerita ini, kompetensi aparatur daerah menjadi faktor penentu dalam membentuk tingkat *accountability* Manajemen Dana di tingkat daerah tersebut. Artinya, semakin tinggi kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, semakin optimal dan akuntabel pengelolaan dana daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, 2017) dan (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019), yang juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Dana daerah. Kompetensi aparatur daerah melibatkan kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Hasil ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur daerah sebagai strategi untuk meningkatkan *accountability* dalam pengelolaan dana daerah. Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia di tingkat daerah, termasuk pelatihan dan pembinaan, dapat menjadi langkah efektif dalam mencapai tingkat kompetensi yang optimal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan kompetensi aparatur daerah dapat memiliki dampak positif pada *accountability* Manajemen Dana daerah.. Hal ini termasuk dalam menjaga integritas, mencegah korupsi atau



mencapai *accountability* yang optimal dalam pengelolaan dana daerah. Semakin banyak masukan, saran, dan evaluasi yang diberikan oleh masyarakat, semakin baik pula pengelolaan dana daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada proses perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat menjadi mekanisme pengawasan alami terhadap pengelolaan dana daerah. Dengan memberikan masukan dan evaluasi, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyelewengan dana daerah. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dianggap penting untuk mendukung *accountability* pengelolaan dana daerah dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang ditarik dari analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah, kompetensi aparatur daerah, dan partisipasi masyarakat memiliki positif dan signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana daerah. Semakin baik kepemimpinan kepala daerah, semakin tinggi kompetensi aparatur daerah, dan semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka Manajemen Dana daerah cenderung lebih akuntabel dan optimal. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diberikan kepada kantor daerah di Kecamatan Denpasar Barat: Tingkatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk kepala daerah guna meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam mengelola dana daerah. Pertahankan dan tingkatkan komunikasi terbuka dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mendukung transparansi dalam pengelolaan dana daerah. Teruskan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah dalam Manajemen Dana daerah, sehingga mereka dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan kepada masyarakat. Tingkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan publikasi secara rutin di website dan media sosial tentang informasi penggunaan keuangan daerah. Sosialisasikan penggunaan dana daerah secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam pengawasan pengelolaan dana daerah. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan varbel lain yang dapat mempengaruhi *accountability* Manajemen Dana daerah. Luaskan area penelitian ke berbagai kecamatan atau daerah untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif.







Kecil Menengah. UMKM sendiri pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam hal *financial*. Dalam hal ini pelaku bisnis dituntut memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi bisnis serta pengelolaan keuangannya, bukan hanya mampu melakukan perencanaan saja untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelaku usaha juga harus mampu untuk mengambil keputusan secara efisien dan efektif. Penelitian oleh Yanti (2019) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Sajuyigbe et al. (2020) juga menemukan bahwa literasi keuangan mempengaruhi usaha kecil. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Denpasar

Teknologi keuangan (*Fintech*) adalah jenis informasi yang digunakan dalam penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi. *Financial Technology (Fintech)* merupakan sebuah industri berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertransaksi (Ginantara & dkk, 2020). UMKM dapat memanfaatkan *fintech* dengan kalsifikasi *paymet* sebagai strategi dalam meningkatkan kemajuan usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajar & Larasati, 2021), (Utami & Sitanggung,2021) yang menunjukkan bahwa *financial technology* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : *Financial Technology* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Denpasar

*E-commerce* merupakan suatu perusahaan yang menyediakan platform jual beli secara online dan menyediakan kemampuan untuk melakukan transaksi yang melibatkan barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dalam suatu aplikasi yang dapat diakses menggunakan alat-alat elektronik. Adanya *e-commerce* membuat para penjual dan pembeli menjadi lebih efektif dan efisien dalam memasarkan produknya dengan jangkauan yang lebih luas. Penelitian dari Ramdhani et al. (2022) menunjukan terdapat pengaruh signifikan antara penerapan *E-commerce* teradap kinerja UMKM. Octavia et al. (2020) juga memperoleh hasil bahwasannya *E-commerce*

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. sejalan dengan penelitian Setiawati et al. (2021) yang menjelaskan bahwa e-commerce berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Penggunaan *E – Commerce* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Denpasar

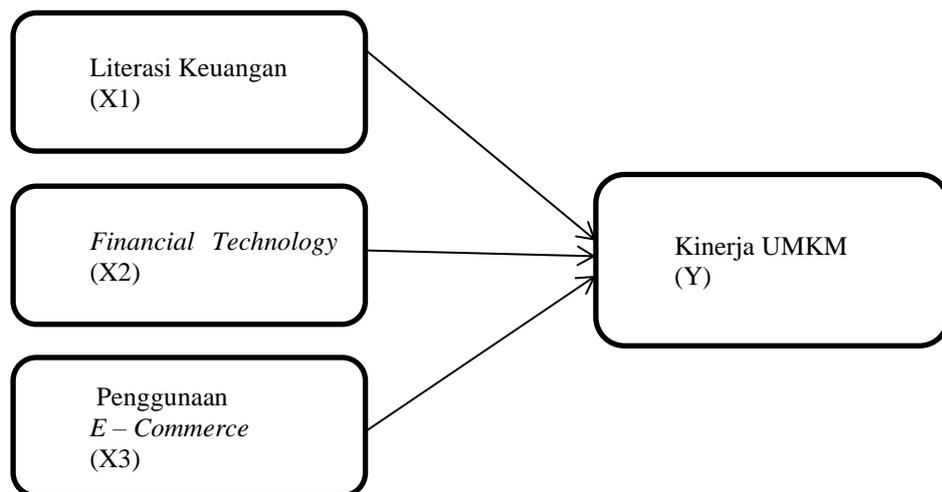
Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Definisi kinerja UMKM menurut Pramestiningrum dan Iramani (2020) adalah hasil kerja yang dicapai oleh UMKM pada periode waktu tertentu yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu serta menyesuaikan dengan peran atau tugas dari tujuan UMKM.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai variabel literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM, *financial technology* berpengaruh terhadap kinerja UMKM, dan penggunaan *e-commerce* berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

**Gambar 1.3**

**Desain Penelitian**



sumber : hasil pemikiran peneliti, 2023

Populasi untuk penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang ada di kota Denpasar pada tahun 2022 sejumlah 32.476 UMKM. Penelitian ini menggunakan data tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 sedang dilaksanakan pembangunan basis data tunggal KUMKM melalui





Hasil dari analisis koefisien determinasi dilihat pada nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,657 menunjukkan bahwa 65,7% variabel Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM dipengaruhi oleh Literasi Keuangan, *Financial Technology* Dan Penggunaan *E-Commerce*, sedangkan sisanya sebesar 34,3% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil uji F menunjukkan nilai F. Hitung sebesar 64,260 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa Literasi Keuangan, *Financial Technology* Dan Penggunaan *E-Commerce* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Berdasarkan hasil Uji hipotesis (Uji t) pada tabel 4.6 variabel Literasi Keuangan, *Financial Technology* Dan Penggunaan *E-Commerce* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel Literasi Keuangan, *Financial Technology* Dan Penggunaan *E-Commerce* berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman Literasi Keuangan akan meningkatkan Kinerja UMKM di Denpasar. *Financial Technology* berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin baik pemanfaatan *Financial Technology* akan meningkatkan Kinerja UMKM di Denpasar. Penggunaan *E-Commerce* berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM Di Denpasar Dalam Mengadopsi Digitalisasi UMKM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin efektif dan aktif Penggunaan *E-Commerce* akan meningkatkan Kinerja UMKM di Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : Bagi UMKM di Kota Denpasar, peningkatan literasi keuangan dan bijak dalam mengadopsi financial technology menjadi kunci sukses dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Pemahaman mendalam terhadap penggunaan teknologi finansial dapat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, aktif dan efektif memanfaatkan platform e-commerce dengan strategi pemasaran kreatif dapat memperkuat daya saing UMKM di pasar digital yang berkembang pesat. Bagi penelitian selanjutnya, hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai materi serta contoh dalam menelaah studi kasus pada mata kuliah tertentu serta penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM di Denpasar selain dari tiga variabel bebas yang diteliti saat ini sehingga dihasilkan data yang lebih akurat.

### Daftar Pustaka

- Ramdhani, M. L., Nurleli, & Anandya, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Penerapan E-commerce terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Alamsyah, M. F. (2020). Pengaruh literasi keuangan dan kualitas manajemen keuangan terhadap kinerja keuangan pada ukm meubel di kota gorontalo *The effect of financial literation and quality of financial management towards financial performance in meubel smes in gorontalo city. FORUM EKONOMI*, 22 (2) 2020, 245-255 .
- Aprayuda, R., & Dalam, W. W. (2022). Apakah Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan dapat Mempengaruhi Kinerja UMKM ? *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Apriliyan, Y., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2022). Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risma*, Vol. 2 No. 2.
- Arifuddin, Nurnaluri, S., & Intani, F. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan DAN Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada Cafe Di Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 08, No. 01.
- Budiarto, D. S, Vivianti, E, & Diansari, R. E. (2021). Maintaining the Performance and Sustainability of MSMEs with E Commerce: Research during the Covid- 19 Pandemic. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(3).
- Chaidir, T., Suprpti, I. A., Arini, G. A., & Ismiwati, B. (2020). Determinan Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1–19.
- Christoper, S. W., & Kristiati, I. (2020). HUBUNGAN E-Commerce DAN Literasi Keuangan Terhadap Kelangsungan USAHA Di Boyolali. *Jurnal Akuntansi*, 1 - 12.
- Fadilah, I., Rahman, S., & Anwar, M. (2022). Analisis pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Financial Technology terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung . *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Fathimah, V. (2019). Determinan Adopsi E-Commerce dan Dampaknya Pada . *Jurnal Riset Akuntansi Dan* , 7(3), 445–464.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginantara, N. W. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Hanum, H. N., & Sinarasri, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi E Commerce Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Umkm (Studi Kasus Umkm Di Wilayah Kota Semarang). *Maksimum*, 8(1), 1.
- Harfie, A. P., & Lastiati, A. (2022). Adopsi Penggunaan E-Commerce Terhadap Kinerja UMKM (Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Dki Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 11 No. 1.
- Hutabarat, F. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology terhadap Inklusi Keuangan pada Masyarakat Jabodetabek.
- Irianto, H, Rahayu, E. S, Handayani, S. H, Sundari, M. T, Setyowati, Wicaksono, & Rahmadwiati, R. (2020). *Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan*. Surakarta: CV Indotama Solo.
- Kustina, K. T., & Aji, W. S. (2023). Cashless Society Sebagai Pemoderasi Pengaruh Fintech Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Denpasar. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 10 No. 1.
- Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: evidence and implications. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 155(1).
- Maghfiroh, L., & Biduri, S. (2022). Adopsi E-Commerce Memediasi Hubungan Kesiapan Teknologi, Lingkungan Eksternal dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8) .
- Marini, M., Linawati, L., & Putra, R. E. (2020). Peran Fintech terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Tangerang Selatan. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5 (2).
- Marisa, O. (2020). Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Berpengaruh Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 139–152.
- Mawarni, Riswan, & Fithrayud. (2023). Pengaruh Financial Technology, E-Commerce, Literasi Keuangan DAN Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM Di Kabupaten BATANG Dengan Pengetahuan Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Neraca*.
- Nasution, A. W., & Fatira, M. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. *Jurnal academia.edu*.



Suyanto. (2022). FAKTOR Demografi, Financial Technology, DAN Kinerja Keuangan USAHA Mikro Kecil DAN Menengah (UMKM): Inklusi Keuangan Sebagai . Akuntansi Dewantara, VOL. 6 NO 1.

Tambunan, C. R. (2023, 6 23). djp.kemenkeu.go.id. Retrieved 10 3, 2023, from Artikel: Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>

Winbaktianur, & Siregar, L. M. (2020). Kinerja Keuangan Usaha Mikro Dan Kecil. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa.

Winbaktianur, & Siregar, L. M. (2021). Kinerja . Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 5(02), 121–129.

Yanti, W. I. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2(1).